

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
PADA DAERAH OTONOMI BARU  
(STUDI KASUS KOTA TUAL PROVINSI MALUKU)**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**MAHMUD MUHAMMAD TAMHER**

**NIM. 016759906**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

**ABSTRACT**  
**Policy Development in the Area will the New Autonomous Region (Case Study Tual City of Maluku Province)**

**Mahmud Muhammad Tamher**  
**Universitas Terbuka**  
**mmtamher@yahoo.com**

**Keywords:** Policy, Development in the Area, New Autonomous Region

This study aims to determine the condition of the development of the city of Tual after expansion and regional development policy interventions Tual City Government during the period of 2009 to 2012. Study uses a qualitative approach with the intention of describing or outlining in detail the development of the region as a single case of Tual City.

The informant is the perpetrators of this research area development consisting of elements of the Regional Government of Tual City Head Unit (SKPD), city council, the public element, and the element of entrepreneurs/ owners of capital. Instrument of data collection used in the study were interview guides and observation. Analysis of the data in this study is done by using the design data analysis by Miles and Huberman interactive model, which reflects the existence of three sub-processes that take place interactively, such as data reduction, performance data, and conclusions or verification.

The results showed that: (1) Development of Tual City area during the period of 2009 to 2012 showed that the economy is growing quite rapidly Tual. This condition is indicated by the magnitude of the value of GDP at constant prices increasing from 2009 to 2012, the level of prosperity in the city of Tual population continues to increase shown by the increase in regional income per capita population of Tual City from 2009 through 2012, support the role of the community as object and subject of development and the role of entrepreneurs as owners of capital in the form of partnerships with local governments Tual also contribute to the development of the city of Tual, (2) development of policy intervention areas Tual City Government policy consists of budget management, resource development policy human, and policy development data and information which are a series of Tual City Government action to overcome constraints of limited budgets, limited human resources, and limitations of data and information in relation to the development of Tual City area.



**ABSTRAK**  
**Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru**  
**(Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)**

**Mahmud Muhammad Tamher**  
**Universitas Terbuka**  
**mmtamher@yahoo.com**

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pengembangan Wilayah, Daerah Otonom Baru

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengembangan wilayah Kota Tual setelah pemekaran dan intervensi kebijakan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud mendeskripsikan atau menguraikan secara detail pengembangan wilayah Kota Tual sebagai kasus tunggal.

Informan penelitian ini adalah para pelaku pengembangan wilayah yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah Kota Tual yakni Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD, unsur masyarakat, dan unsur pelaku usaha/pemilik modal. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan analisis data menurut model interaktif Miles dan Huberman, yang mencerminkan adanya tiga sub proses yang berlangsung secara interaktif, seperti reduksi data, penampilan data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengembangan wilayah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tual berkembang cukup pesat. Kondisi ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012, tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tual terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, dukungan peran masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan serta peran pelaku usaha selaku pemilik modal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah Kota Tual juga turut berkontribusi besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual, (2) Intervensi kebijakan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual terdiri dari kebijakan pengelolaan anggaran, kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan pengembangan data dan informasi yang merupakan serangkaian tindakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam mengatasi kendala keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan data dan informasi kaitannya dengan pengembangan wilayah di Kota Tual.

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tual, 28 Oktober 2013  
Yang Menyatakan,



**(MAHMUD MUHAMMAD TAMHER)**  
**NIM. 016759906**



**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : Mahmud Muhammad Tamher  
NIM : 016759906  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul Tesis : Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 April 2014  
Waktu : Pukul 10.00 – 12.00 WIT

dan telah dinyatakan LULUS

**KOMISI PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji  
Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Penguji Ahli  
Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA

Pembimbing I  
Dr. Muhammad Yunus, M.A

Pembimbing II  
Dr. Suratinah, MS. Ed

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

**LEMBAR LAYAK UJI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : Mahmud Muhammad Tamher / 016759906  
Judul TAPM : Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar *90...*% sehingga dinyatakan sudah layak uji/~~belum layak uji~~ dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Tual, 28 Oktober 2013

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Muhammad Yusus M.A.**  
NIP. 195910301987031003

  
**Dr. Suratiana MS.Ed.**  
NIP. 195609021983012001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, karena atas petunjuk, rahmat, dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM dengan judul **“Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)”**, tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya TAPM ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga terutama kepada Bapak Dr. Muhummad Yunus, M.A dan Ibu Dr. Suratinah, MS. Ed, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II TAPM yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan maupun petunjuk kepada penulis pada saat pembimbingan sehingga TAPM ini dapat diselesaikan.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UPBJJ UT Pusat, UPBJJ UT Ambon maupun Pengelola PPs UT Gabungan Tual-Maluku Tenggara yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis selama menempuh pendidikan, seluruh Tutor Tutorial Tatap Muka dan Tutor Tutorial Online pada Program Studi Magister Administrasi Publik UPBJJ UT. Teruntuk istriku tercinta, Rubiyanti Tamher, rasa terima kasih ini kusampaikan atas segala kesabaran, pengertian dan keikhlasan yang sungguh tak terbatas dalam mendampingi saya serta mendidik anak-anak dengan penuh rasa cinta dan kasih



sayang, teman pendamping setia dalam melewati masa pendidikan ini. Anak-anakku yang amat saya cintai dan banggakan. Kalian jualah, sumber inspirasiku, motivatorku dalam menyelesaikan pendidikan ini, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersama menciptakan suasana nyaman dan indah selama pelaksanaan pendidikan di Universitas Terbuka. Tiada kata yang dapat penulis sampaikan sebagai ucapan rasa terima kasih, hanya berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga dilipatgandakan pahalanya.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala kritik dan saran konstruktif sangat Penulis harapkan demi memboboti TAPM ini. Penulis berharap semoga keberadaan TAPM ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama kepada Pemerintah Daerah Kota Tual sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan pengkajian pengembangan wilayah guna lebih mendekatkan pelayanan publik dan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.



Tual, September 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Abstrak</b> .....	i
<b>Lembar Pernyataan Orisinalitas</b> .....	iii
<b>Lembar Persetujuan</b> .....	iv
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	v
<b>Lembar Layak Uji</b> .....	vi
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Bagan</b> .....	xii
<b>Daftar Tabel</b> .....	xiii
<b>Daftar Gambar</b> .....	xv
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Penelitian sebelumnya .....	14
B. Kebijakan .....	19
C. Pengembangan Wilayah .....	21
D. Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Administrasi Publik .....	27
E. Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Pengembangan Wilayah .....	31
F. Kebijakan Pengembangan SDM dalam Pengembangan Wilayah .....	34
G. Kebijakan Pengembangan Data dan Informasi dalam Pengembangan Wilayah .....	38

H. Otonomi Daerah .....	41
I. Pemekaran Daerah/Wilayah .....	45
J. Kerangka Berpikir .....	56
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>61</b>
A. Desain Penelitian .....	61
B. Subyek Penelitian/Narasumber/Informan .....	64
C. Instrumen Penelitian .....	67
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	68
E. Metode Analisis Data .....	69
<b>BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Gambaran Umum Kota Tual .....	74
B. Pengembangan Wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru .....	80
C. Intervensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun Waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012 .....	102
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>159</b>
A. Simpulan .....	159
B. Saran .....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>168</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009-2013 .....	173
2    Peta Wilayah Kota Tual .....	177
3    Pedoman Wawancara .....	178
4    Transkrip Hasil Wawancara .....	186
5    Pedoman Observasi.....	246



6	Lembar Hasil Observasi .....	247
7	Dokumentasi Hasil Observasi .....	257
8	Program/Kegiatan SKPD Kota Tual dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Selama Tahun 2011-2013 .....	267
9	Keputusan Walikota Tual Nomor 08.d Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual .....	273
10	Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/LL/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan Data dan Informasi Penelitian .....	277
11	Surat Keterangan Izin Penelitian Kepala Badan Kembangpolinmas Kota Tual, Nomor 070/170/2013, Tanggal 3 Juni 2013 .....	279
12	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan Kembangpolinmas Kota Tual Nomor 070/006/SKSP/2013, Tanggal 18 Juli 2013 .....	280
13	Biodata Penulis .....	281

## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	60

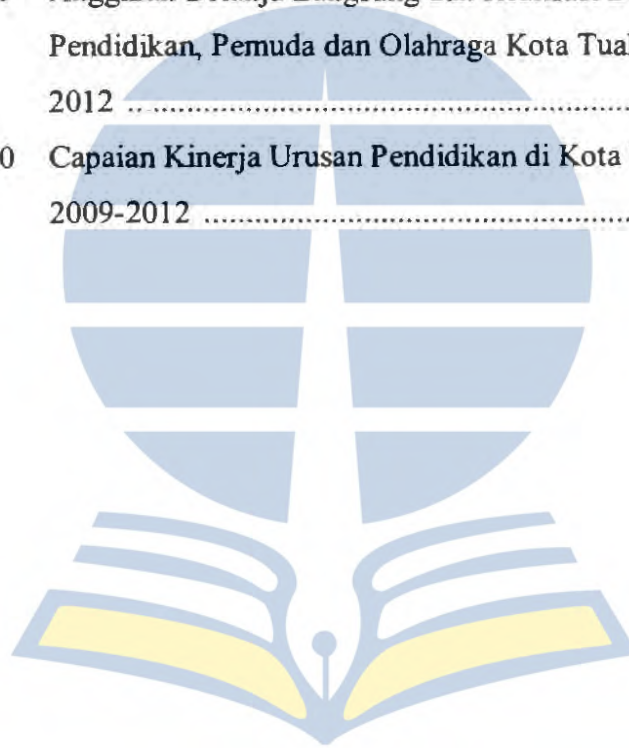


## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Dusun di Kota Tual Tahun 2012 .....	75
Tabel 4.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Kota Tual Tahun 2012 .....	75
Tabel 4.3 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Tual Tahun 2012 .....	76
Tabel 4.4 Jarak Kota Tual dengan Ibukota Provinsi serta Ibukota Kecamatan .....	77
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kota Tual menurut Jenis kelamin dan Kecamatan Tahun 2010-2011 .....	78
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun 2011-2012 .....	79
Tabel 4.7 Kondisi Lahan dan Produksi tiap Kecamatan di Kota Tual Tahun 2011 .....	82
Tabel 4.8 Struktur Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun 2009-2012 .....	92
Tabel 4.9 Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Tual Periode TA 2008 sampai dengan TA 2012 (dalam ribuan rupiah) .....	108
Tabel 4.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tual 2009-2012 menurut Sumber Pendapatan (dalam ribuan rupiah) .....	109
Tabel 4.11 Realisasi Dana Perimbangan Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah) .....	109
Tabel 4.12 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah) .....	110
Tabel 4.13 Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah) .....	111
Tabel 4.14 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Tual Tahun	



	2009-2012 (dalam ribuan rupiah) .....	111
Tabel 4.15	Alokasi Dana APBD terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tual selama Tahun 2010-2012 .....	116
Tabel 4.16	Perkembangan Bantuan Kegiatan Perikanan Tangkap bagi Masyarakat di Kota Tual Tahun 2009-2012 .....	121
Tabel 4.17	Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2009-2012 .....	122
Tabel 4.18	Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual Tahun 2010-2012 .....	123
Tabel 4.19	Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun 2009- 2012 .....	127
Tabel 4.20	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kota Tual periode 2009-2012 .....	130



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Pengusulan Wilayah Pemekaran di Tingkat Daerah .....	50
Gambar 2.2 Tahapan dan Prosedur Pembentukan Kabupaten/Kota .....	51
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	70
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual (%) Tahun 2009-2012 .....	81
Gambar 4.2 Distribusi PDRB Kota Tual Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 .....	87
Gambar 4.3 Struktur Ekonomi Kota Tual Tahun 2009-2012 .....	92
Gambar 4.4 Tingkat Pendapatan Perkapita Kota Tual (Rp) Tahun 2009-2012 .....	93
Gambar 4.5 Laju Inflasi Harga Produsen Barang dan Jasa Kota Tual Tahun 2009-2012 .....	94
Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tual Tahun 2009-2011 .....	131



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tual Tahun 2009-2013 ..... 173
Lampiran 2	Peta Wilayah Kota Tual ..... 177
Lampiran 3	Pedoman Wawancara ..... 178
Lampiran 4	Transkrip Hasil Wawancara ..... 186
Lampiran 5	Pedoman Observasi..... 246
Lampiran 6	Lembar Hasil Observasi ..... 247
Lampiran 7	Dokumentasi Hasil Observasi ..... 257
Lampiran 8	Program/Kegiatan SKPD Kota Tual dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Selama Tahun 2011-2013 ..... 267
Lampiran 9	Keputusan Walikota Tual Nomor 08.d Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual ..... 273
Lampiran 10	Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/LL/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan Data dan Informasi Penelitian ..... 277
Lampiran 11	Surat Keterangan Izin Penelitian Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Tual, Nomor 070/170/2013, Tanggal 3 Juni 2013..... 279
Lampiran 12	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan Kesbangpolinmas Kota Tual Nomor 070/006/SKSP/2013, Tanggal 18 Juli 2013 ..... 280
Lampiran 13	Biodata Penulis ..... 281



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, pengembangan pemekaran daerah terjadi begitu pesat dan tidak terkendali. Tercatat sampai dengan tahun 2012 telah terbentuk daerah otonom baru di Indonesia sebanyak 635 yang terdiri dari 34 provinsi, 502 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif, dan 1 kabupaten administratif. APBN pun membengkak karena bertambahnya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) untuk semua wilayah pemekaran yang mencapai triliunan rupiah. Dua tahun terakhir, pada 2010 pemerintah mengeluarkan DAU sebesar 203,60 triliun, dan pada 2011 kembali menggelontorkan 225,53 triliun (Kompasiana, 2012).

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penjabaran UUD 1945 pada Pasal 18, 18A, dan 18B menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah tersebut adalah untuk memacu kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin, tersedianya lapangan pekerjaan, tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai di setiap wilayah meningkatnya prakarsa dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab.

Otonomi daerah menurut Mardiasmo (2004), diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: 1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, 3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Implikasi dari kewenangan otonomi daerah diantaranya menuntut daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*). Indikasi keberhasilan otonomi daerah adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan.

Sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban daerah, kabupaten/kota sebagai daerah otonom yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 Bab IV Bagian Ketiga Pasal 21 dan Pasal 22 tersebut yaitu mengenai hubungan hak dan kewajiban daerah berupa hubungan antara penggunaan sumberdaya-sumberdaya dengan keluaran dan hasil harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara efisien dan efektif. Oleh karena itu sebagai daerah otonom (kabupaten/kota) diberi hak, berkewenangan dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah, sedangkan daerah otonom melaksanakan kewenangan yang diberikan Pemerintah tersebut. Dengan



demikian, pemerintah daerah harus dapat menggali sumberdaya yang dimiliki daerah yang akan digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah pada saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan ataupun penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan interaksional antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Pemerintah Daerah diharapkan lebih aspiratif terhadap aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan yang dibuat menguntungkan rakyat. Melalui interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah otonom yang baru, maka masyarakat sipil (*civil society*) diharapkan akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Beberapa alasan utama daerah mengajukan pemekaran menurut Putra (2006) dan Pratikno (2007) antara lain adalah: 1. Kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Menurut data berbagai Inspektorat Daerah, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi menjadi alasan paling populer digunakan untuk memekarkan sebuah daerah, 2. Kondisi geografis yang terlalu luas. Banyak kasus di Indonesia, proses pendistribusian pelayanan publik tidak pernah terlaksana dengan optimal karena infrastruktur yang tidak memadai. Akibatnya luas wilayah yang sangat luas membuat pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik tidak efektif, 3. Perbedaan Basis Identitas. Alasan perbedaan identitas (etnis, asal muasal keturunan) juga muncul menjadi salah satu alasan pemekaran. Tuntutan



pemekaran muncul karena biasanya masyarakat yang berdomisili di daerah pemekaran merasa sebagai komunitas budaya tersendiri yang berbeda dengan komunitas budaya daerah induk, 4. Kegagalan pengelolaan konflik komunal. Kekacauan politik yang tidak bisa diselesaikan seringkali menimbulkan tuntutan adanya pemisahan daerah, 5. Adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil Sumber Daya Alam, dan Pendapatan Asli Daerah.

Secara umum pemekaran wilayah didorong adanya keinginan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan berbagai bidang potensial di daerah, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta adanya tuntutan untuk pemerataan ekonomi di daerah menjadi alasan pentingnya suatu daerah dimekarkan. Tuntutan pemerataan ekonomi didasarkan atas kondisi nyata adanya ketimpangan (*disparitas*) pembangunan ekonomi antara calon daerah otonom baru dengan daerah induknya.

Keseimbangan antarkawasan menjadi penting karena keterkaitan yang bersifat simetris akan mampu mengurangi disparitas antar wilayah dan pada akhirnya mampu memperkuat pembangunan ekonomi wilayah secara menyeluruh. Ketidakseimbangan pertumbuhan antarwilayah akan mengakibatkan kondisi yang tidak stabil. Disparitas antar wilayah dalam kenyataannya telah menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan politik.

Permasalahan perbedaan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan pengembangan wilayah. Dalam hal ini pengembangan wilayah dipandang sebagai keseluruhan upaya pemanfaatan potensi wilayah yang ada untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Indikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan wilayah merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan pemerataan tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antarwilayah. Singkatnya, dengan pemerintahan daerah otonomi baru ini, diharapkan pemerintah daerah akan lebih fokus untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan wilayahnya.

Praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan pada daerah otonom baru selama ini masih didominasi oleh peran pemerintah daerah pada segala aspek kehidupan termasuk dominasi peran pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah, sedangkan peran pelaku usaha maupun masyarakat sangat rendah kontribusinya bagi percepatan pembangunan di daerah. Kaitannya dengan pengembangan wilayah, tentunya hal ini merupakan permasalahan yang dapat berdampak buruk bagi daerah karena keberhasilan pengembangan wilayah mutlak membutuhkan peran seimbang pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat melalui penciptaan pola kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan semua pihak yang bermitra. Hal ini didasari bahwa pada kenyataannya pemerintah daerah memiliki sejumlah keterbatasan, sehingga membutuhkan pihak lain guna mewujudkan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.



Keberlangsungan pengembangan wilayah dalam kerangka otonomi daerah diakui sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dari pemerintah pusat. Persoalan yang muncul kemudian terletak pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk daerah otonom dapat berkembang secara mandiri. Disisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk memenuhi dana yang dibutuhkan bagi kegiatan pembangunan di daerah otonom baru, yang cenderung semakin besar setiap tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terhadap 145 daerah otonomi baru menunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Mayoritas (86%) sumber pendapatan APBD kabupaten/kota dan 53% APBD provinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan Kemenkeu. Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan biaya pembangunan cuma 21% (Puspen Kemendagri, 2011).

Kondisi ideal yang diharapkan dengan adanya pembentukan daerah otonom baru tidak jarang juga dihadapkan dengan masalah ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Faktor ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas ini selanjutnya menjadi penghambat terselenggaranya pelayanan masyarakat yang lebih baik dan percepatan pembangunan di wilayah daerah otonom baru. Permasalahan umum keterbatasan SDM para pelaku pengembangan wilayah baik di bidang kuantitas, keahlian, wawasan, etos kerja, maupun integritas, untuk pelaksanaan pengembangan wilayah, serta keterbatasan kemampuan merencanakan dan melaksanakan koordinasi, konsistensi dan sinkronisasi serta mengatur sinergitas program di dalam suatu sektor/satuan kerja



maupun program-program antar sektor satuan kerja menjadi kendala utama pelaksanaan pengembangan wilayah (Mulyanto, 2008).

Sebagai daerah otonom baru, ketersediaan data dan informasi sangat dibutuhkan bagi perencanaan pembangunan termasuk juga perencanaan pengembangan wilayah. Kendala lainnya yang juga sebagai penghambat pelaksanaan pengembangan wilayah pada daerah otonom baru yaitu ketersediaan data dan informasi. Tidak lengkapnya/tersedianya data dan informasi penunjang yang diperlukan dalam merencanakan program-program pengembangan wilayah yang tepat sasaran menurut Mulyanto (2008) sebagai salah satu kendala utama kelancaran pelaksanaan pengembangan wilayah.

Kedudukan data dan informasi memiliki peranan sangat penting dalam perencanaan pengembangan wilayah. Sebagai input, melalui pengumpulan data, perencana dapat memperoleh gambaran mengenai fakta yang ada. Perolehan ini dapat membantu dalam proses berikutnya, yakni proses analisis, sebuah proses yang mampu menggambarkan berbagai potensi, masalah, kecenderungan, dan harapan berdasarkan pengolahan data dan informasi yang diterima. Setelah melalui proses tersebut, barulah perencana mampu menyajikan sebuah produk output berupa rencana pengembangan wilayah.

Berdasarkan data statistik Kabupaten Maluku Tenggara dalam Angka Tahun 2008 menunjukkan sampai tahun 2007, beberapa kecamatan yang saat ini masuk dalam wilayah Kota Tual yakni Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam pertumbuhan pembangunan di wilayahnya sangat lambat. Padahal 2 (dua) kecamatan ini merupakan bagian atau wilayah dari Kabupaten Maluku Tenggara yang seharusnya dikembangkan secara adil dan

merata seperti kecamatan-kecamatan lainnya dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Fakta yang diperoleh yakni jumlah puskesmas pada Kecamatan Pulau-pulau Kur hanya sebanyak 1 (satu) buah dan puskesmas pembantu hanya 3 (tiga) buah dengan tenaga perawat umum sebanyak 10 orang untuk melayani 5.873 jiwa. Jumlah puskesmas pada Kecamatan Tayando Tam hanya sebanyak 1 (satu) buah dan puskesmas pembantu hanya 3 (tiga) dengan tenaga perawat umum sebanyak 7 orang untuk melayani 7.213 jiwa tanpa tenaga dokter. Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Jenis transportasi yang digunakan untuk menjangkau dua kecamatan ini berupa transportasi laut dan hanya bertumpu pada alat transportasi laut lokal seperti perahu motor berukuran kecil atau disebut dalam bahasa setempat katinting dan tidak dapat digunakan pada saat cuaca buruk.

Berdasarkan pengamatan masih banyak kawasan yang terisolasi dari pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pulau-pulau kecil, pesisir, dan daerah pedalaman yang sebagian besar pada wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam serta Desa Dullah Laut yang berada di Kecamatan Dullah Utara. Keterbatasan infrastruktur dasar pada Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam serta beberapa desa lainnya sangat jelas terlihat. Pengembangan jaringan jalan hingga tahun 2007 di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Tayando Tam tidak nampak. Jalan yang dibangun berupa jalan aspal dengan kondisi rusak berat, sedangkan pengembangan jaringan jalan menuju desa-desa terpencil di wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Tayando Tam tidak pernah dilakukan.

Jaringan listrik nasional (PLN) masih sangat sulit menjangkau kecamatan dan beberapa desa dimaksud tanpa ada upaya pemerintah daerah Kabupaten



Maluku Tenggara dalam pengembangan listrik di wilayah ini. Pelayanan air bersih hanya bertumpu pada PDAM Maluku Tenggara dengan kapasitas produksi dibawah 80 liter/detik dengan cakupan wilayah hanya dapat menjangkau desa-desa yang berada di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Belum dibangun jaringan transmisi dan distribusi yang menjangkau wilayah Kecamatan Dullah Utara, bahkan wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Kota Tual seperti Pulau Dullah Laut, Pulau-pulau Kur dan sekitarnya serta Tayando Tam dan sekitarnya. Bak penampung air hujan yang dibangun berukuran kecil sehingga tidak dapat menampung air hujan yang banyak jika curah hujan tinggi. Semua ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kota Tual sesuai UU Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 telah dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Secara substantif pemekaran wilayah yang menghasilkan Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru dinilai sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Tual merupakan Kota Kepulauan dengan 66 pulau dan 3 gugus pulau, di awal pemekaran wilayahnya memiliki sejumlah permasalahan diantaranya rentang kendali pemerintahan, letak geografis antar pulau yang sangat jauh dan berpengaruh terhadap aksesibilitas pelayanan publik. Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru juga masih dihadapkan pada beberapa persoalan lainnya seperti ketersediaan anggaran yang



belum memadai, belanja aparatur yang tinggi dibandingkan dengan belanja publik, keterbatasan sumberdaya manusia baik aparatur maupun masyarakat, serta keterbatasan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan wilayah.

Pada awal pemekaran wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru masih dihadapkan pada beberapa persoalan, namun yang nampak sejak terjadinya pemekaran, pengembangan berbagai sektor di empat kecamatan dalam wilayah Kota Tual yakni Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam terlaksana dengan baik. Pengembangan kegiatan ekonomi wilayah Kota Tual dikembangkan dengan berbasis pada sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan lautan dengan memperhatikan aspek potensi sumberdaya perikanan setempat. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap dikembangkan di wilayah perairan Kecamatan Pulau-pulau Kur. Hal ini sesuai dengan kondisi geografi dan potensi daerah setempat yang berhadapan langsung dengan Laut Banda dan Arafura yang kaya akan sumberdaya perikanan lautnya seperti ikan pelagis yaitu ikan yang umumnya berenang mendekati permukaan perairan hingga kedalaman 200 meter, baik pelagis besar, kecil maupun ikan-ikan dasar (demersal). Di kawasan ini juga dikembangkan wisata bahari pantai dan perikanan tangkap (wilayah pemancingan).

Pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut diarahkan di wilayah Kecamatan Tayando Tam dan bagian utara wilayah Kecamatan Dullah Utara yang dipadukan dengan wisata bahari budidaya laut, snorkling dan wisata pantai. Pengembangan Kawasan sumberdaya perikanan dan hutan mangrove di

Tanjung/Teluk Un di Kecamatan Dullah Selatan yang terus dijaga dan telah dijadikan kawasan konservasi yang hanya boleh dimanfaatkan secara terbatas.

Pengembangan jaringan jalan di wilayah Kota Tual yang dititikberatkan pada peningkatan aksesibilitas wilayah daratan Pulau Dullah dengan Pulau Kei Kecil serta pusat ibukota kecamatan terjauh yakni Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Tayando Tam dengan desa-desa terpencil dalam wilayah dua kecamatan ini telah mampu membuka daerah-daerah yang selama ini terisolir. Pengembangan sistem angkutan antar pulau dengan tersedianya moda angkutan feri dan speed boat (perahu motor).

Kebutuhan listrik di wilayah yang selama ini sulit terjangkau pelayanan listrik PLN oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dilakukan pengembangan listrik berupa teknologi tenaga surya dan mesin diesel. Pengembangan jaringan air bersih melalui peningkatan jaringan transmisi dan distribusi serta tenaga listrik, dan pembangunan bak penampung air hujan berukuran besar yang meliputi kecamatan yang terletak di pulau-pulau seperti Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur. Pengembangan wilayah Kota Tual yang nampak juga berupa pengembangan sistem drainase dan persampahan, pengembangan sistem telekomunikasi, dan pengembangan permukiman.

Pada saat banyaknya daerah otonom baru yang dinilai gagal dalam melaksanakan pengembangan wilayah sebagai upaya pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, kondisi berbeda ditunjukkan oleh Kota Tual sebagai daerah otonom yang baru berusia lima tahun yang mengalami percepatan dan pemerataan dalam pengembangan wilayahnya. Berdasarkan keseluruhan uraian sebelumnya, mendorong penulis untuk meneliti



dan membahas tentang bagaimana pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru dan apa saja intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dalam pengembangan wilayahnya yang penulis tuangkan dalam TAPM dengan judul **“Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru?
2. Apa saja intervensi kebijakan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012?

### **C. Tujuan Penelitian**

Terkait dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru.
2. Menganalisis intervensi kebijakan pengembangan wilayah Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh berupa manfaat akademis maupun praktis yang dijelaskan sebagai berikut.



### 1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep dan teori-teori menyangkut kebijakan pengembangan wilayah dan terutama bagi pengembangan ilmu administrasi publik pada umumnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya yang melakukan penelitian-penelitian sejenis.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi seluruh pelaku pengembangan wilayah baik pemerintah daerah, masyarakat maupun pelaku usaha terkait pengambilan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan pengembangan wilayah di Kota Tual sebagai upaya meningkatkan kualitas pengembangan wilayah dan bagaimana mengantisipasi kendala yang akan muncul dalam penyelenggaraan pengembangan wilayah di Kota Tual.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Berbagai hasil penelitian yang terkait dengan masalah pengembangan wilayah di daerah secara umum masih memfokuskan pada upaya pengembangan wilayah-wilayah tertentu saja atau terbatas pada sub-sub kasus pengembangan wilayah diantaranya seperti pengembangan wilayah pesisir, pengembangan wilayah kecamatan tertentu yang dinilai masih tertinggal pembangunannya dan belum mengkaji pengembangan wilayah secara keseluruhan. Selain itu, penelitian sebelumnya masih banyak menganalisis sebatas peran pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah dan belum banyak menganalisis pentingnya pola kemitraan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan wilayah pada suatu daerah otonom baru.

Kemitraan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan wilayah pada suatu daerah otonom baru merupakan suatu bahasan penting karena percepatan dan keberlanjutan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh peran aktif pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adapun analisis kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan wilayah juga masih mendominasi penelitian-penelitian sebelumnya dan belum menganalisis kebijakan pengembangan sumberdaya manusia dan kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah.

Penelitian yang membahas tentang pengembangan wilayah pesisir telah dilakukan oleh Bohari (2012), Dosen pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



Universitas Hassanudin Makassar melalui analisis prospektif dalam rangka menghasilkan skenario pengembangan wilayah pesisir secara berkelanjutan di Kota Makassar untuk masa yang akan datang dengan menentukan faktor kunci yang berpengaruh terhadap kinerja sistem. Penelitian dengan judul Strategi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Berkelanjutan di Perairan Pantai Makassar ini adalah untuk menganalisis strategi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Guna mencapai tujuan utama tersebut, maka ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan sebagai tujuan khusus yaitu: 1. mengidentifikasi faktor penentu di masa depan, 2. menentukan tujuan strategis dan kepentingan pelaku utama, dan 3. mendefinisikan dan mendeskripsikan evolusi kemungkinan masa depan. Penelitian ini menemukan bahwa untuk meningkatkan status keberlanjutan ke depan (jangka panjang), skenario yang perlu dilakukan untuk meningkatkan status keberlanjutan pengembangan wilayah pesisir di wilayah Kota Makassar adalah skenario Progresif-Optimistik dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap semua atribut yang sensitif sehingga semua dimensi menjadi berkelanjutan untuk pengembangan wilayah pesisir.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Haryadi (2012) dengan judul Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini mencoba menganalisis kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat di bidang infrastruktur jalan. Dalam kajian ekstrapolasi, pembangunan infrastruktur jalan di Suoh baru akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 tahun. Secara teknis ada dua jenis klas jalan di Suoh yaitu jalan kabupaten dan jalan provinsi. Upaya yang telah dilakukan oleh

pemerintah provinsi berkaitan dengan kewenangan jalan Sukabumi-Suoh dan Suoh-Sanggi yaitu dengan dianggarkannya melalui APBD provinsi, namun karena keterbatasan anggaran untuk pembangunan khususnya pada ruas jalan tersebut, sehingga belum dapat berfungsi secara optimal.

Penelitian tentang kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan wilayah telah dilakukan oleh Syamsuar (2003) tentang Dampak dan Manfaat Alokasi Anggaran Pembangunan Sektoral dalam APBD terhadap Masyarakat dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dan manfaat dari realisasi kebijakan alokasi anggaran pembangunan pada beberapa sektor yang menunjang peningkatan perekonomian di Kabupaten Aceh Tenggara, dan tingkat pertumbuhan ekonomi (PDRB) serta pendapatan perkapita masyarakat selama tahun 1997-2001. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat respon dan tanggapan masyarakat terhadap hal tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara diketahui bahwa secara menyeluruh sektor-sektor pembangunan yang teralokasikan melalui anggaran pembangunan ternyata hanya ada tiga sektor yang masih terkendala dalam mewujudkan peningkatan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu sektor transportasi, sektor tenaga kerja dan sektor kesehatan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya laju pertumbuhan sektor-sektor tersebut, bahkan untuk sektor tenaga kerja samasekali belum menjadi prioritas pembangunan bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara, karena dalam perencanaan anggaran, jumlah anggaran, dan realisasi alokasi anggaran untuk sektor tersebut samasekali tidak dianggarkan.



Penelitian lainnya tentang kebijakan alokasi anggaran dalam pengembangan wilayah juga telah dilakukan oleh Nurana dan Muta'ali (2010) dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah tahun 1995-2009, mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Kawasan Ciayumajakuning yakni Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel rasio belanja pembangunan memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah dan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan perkembangan yang terjadi.

Dominasi peran pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah juga dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Damamain (2012) dengan judul Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Program Budidaya Rumput Laut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran yang dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir terait dengan pemberdayaan budidaya rumput laut, faktor-faktor yang menjadi kendala utama bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program budidaya rumput laut bagi masyarakat Maluku

Tenggara, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala petani di dalam program budidaya rumput laut.

Tujuan penelitian Damamain (2012) di atas, masih sebatas melihat peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan belum menyentuh pada peran swasta maupun peran masyarakat dalam pemberdayaan. Padahal keterlibatan peran swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan merupakan faktor pendorong tercapainya tujuan pemberdayaan. Asumsinya, pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan dan untuk melengkapinya dibutuhkan dukungan pihak lain yakni swasta dan masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pada program pemberdayaan budidaya rumput laut yang digulirkan oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara belum efisien karena masih terdapat kendala-kendala di lapangan.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut umumnya masih mengkaji pengembangan wilayah berdasarkan sub kasus pengembangan wilayah, juga mengkaji peran pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah dengan menitikberatkan pada kebijakan pengelolaan anggaran dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di daerah. Diantara mereka belum meneliti pengembangan wilayah secara keseluruhan, juga peran bersama pemerintah daerah, pelaku usaha (swasta), dan masyarakat dalam pengembangan wilayah dan pentingnya perhatian pada beberapa kebijakan lainnya dalam mengatasi berbagai kendala pengembangan wilayah selain kebijakan pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis lebih lanjut berbagai hal di atas.



## B. Kebijakan

Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan guna mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dalam kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antarkawasan, serta keterpaduan antarsektor pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan ini juga menjadi penting agar terjaminnya pencapaian pemerataan pembangunan.

Terdapat beberapa pedoman untuk memahami istilah kebijakan menurut Wahab (2001) yakni: 1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan, 2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi, 3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan, 4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, 5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, 6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit, 7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, 8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi, 9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah, dan 10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Berbagai macam penggunaan istilah kebijakan juga dijelaskan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Islamy, 2009) sebagai berikut.

**1. Kebijakan sebagai label untuk suatu bidang kegiatan tertentu.**

Dalam konteks ini, istilah kebijakan digunakan untuk menjelaskan bidang kegiatan dimana pemerintah terlibat di dalamnya.

**2. Kebijakan sebagai ekspresi mengenai tujuan umum atau keadaan yang dikehendaki.**

Di sini kebijakan digunakan untuk menyatakan kehendak dan kondisi yang dituju.

3. **Kebijakan sebagai proposal di bidang tertentu.**  
Dalam konteks ini, kebijakan lebih bersifat proposal. Dalam kebijakan tersebut dijelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.
4. **Kebijakan sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah.**  
Keputusan tersebut masih perlu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.
5. **Kebijakan sebagai pengesahan formal.**  
Disini kebijakan tidak lagi dianggap sebagai usulan, namun telah menjadi keputusan yang sah.
6. **Kebijakan sebagai program.**  
Kebijakan dalam hal ini merupakan program yang akan dilaksanakan, termasuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dari suatu program.
7. **Kebijakan sebagai *output* atau apa yang dihasilkan.**  
Disini kebijakan dipandang sebagai *output* yang akan dihasilkan dari suatu kegiatan.
8. **Kebijakan sebagai *outcome*.**  
Disini kebijakan digunakan untuk menyatakan dampak yang timbul dari suatu kegiatan.
9. **Kebijakan sebagai teori dan model.**  
Kebijakan dalam hal ini menggambarkan model dari suatu keadaan, dengan asumsi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah dan apa konsekuensi dari tindakan pemerintah tersebut.
10. **Kebijakan sebagai proses atau tahapan yang perlu dilaksanakan.**

Kebijakan menurut Anderson (dalam Islamy, 2009) adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun kebijakan disarankan oleh Rose (dalam Winarno, 2007) hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan, beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.



Pilihan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan sosial mengingatkan apa yang menjadi pokok pemikiran Denhardt (dalam Safi'i, 2009) sebagai seorang teoritis kebijakan yang ingin mengembalikan fungsi pokok administrasi publik kepada fungsi awalnya yaitu: (1) Prinsip Demokrasi, (2) Prinsip Kewarganegaraan, (3) Prinsip Pelayanan.

Denhardt (dalam Safi'i, 2009) menyatakan dalam administrasi publik seharusnya memuat pokok-pokok sebagai berikut.

- a. Melayani warga negara/rakyat, bukannya pelanggan (*customer*).
- b. Mendalami tentang 'kepentingan publik' (*public interest*) bukan mekanisme pasar.
- c. Meletakkan nilai kewarganegaraan dan pelayanan publik di atas kewirausahaan.
- d. Berpikir secara strategis dan bertindak secara demokratis (bagaimana pikiran yang ideal normatif diterima masyarakat secara luas).
- e. Memahami bahwa akuntabilitas publik itu bukanlah hal yang sederhana. Bukan sekedar kalau beres secara hukum dan administrasi maka selesailah soal akuntabilitas. Makna akuntabilitas lebih dalam daripada sekedar hukum dan administratif.
- f. Tugas pemerintah adalah melayani, bukannya mengendalikan.
- g. Lebih menghargai rakyat daripada produktivitas (hal. 54).

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian pilihan seseorang, kelompok atau pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

### **C. Pengembangan Wilayah**

Melalui otonomi daerah, maka setiap daerah otonom diberikan sejumlah urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Salah satu isu penting dari otonomi daerah adalah ketimpangan antar wilayah. Bila suatu wilayah mengalami kemajuan ekonomi jauh melampaui wilayah lain, berarti terjadi ketimpangan ekonomi. Begitupun

bidang lainnya. Pemerintah berkewajiban mengatasi ketimpangan tersebut yang tidak lain merupakan pengejawantahan fungsi distribusi, di samping fungsi alokasi dan stabilisasi. Kesemuanya dapat diwujudkannyatakan melalui pendekatan pengembangan wilayah yang direncanakan serta dilaksanakan secara baik, cermat dan tepat sasaran.

Secara konseptual pengertian pengembangan wilayah menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) adalah:

Rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI (hal. 2).

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga pedesaan (Putra, 2009). Pengembangan wilayah ditegaskan Putra (2009) merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di pedesaan yang sangat rentan dan berat menghadapi perubahan yang berskala global. Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan ekonomi akan berakibat semakin bertambahnya desa-desa tertinggal.

Selanjutnya disebutkan Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) bahwa dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang didalamnya memuat tujuan dan sasaran yang



bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh melalui upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni:

(a) *proses perencanaan tata ruang wilayah*, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Disamping sebagai “*guidance of future actions*” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*). (b) *proses pemanfaatan ruang*, yang merupakan wujud *operasionalisasi* rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri, (c) *proses pengendalian pemanfaatan ruang* yang terdiri atas mekanisme *perizinan* dan *penertiban* terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya. Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah (hal. 3).

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya (Misra dalam Dhenov, 2007). Pada dasarnya pendekatan pengembangan wilayah ini digunakan untuk lebih mengefisiensikan pembangunan dan konsepsi ini terus berkembang disesuaikan dengan tuntutan waktu, teknologi dan kondisi wilayahnya (Dhenov, 2007).

Pengembangan wilayah menurut Mulyanto (2008) adalah seluruh tindakan pemanfaatan berbagai potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat setempat maupun skala nasional.

Pada umumnya pengembangan wilayah menurut Mulyanto (2008) dapat dikelompokkan menjadi usaha-usaha mencapai tujuan bagi kepentingan-kepentingan di dalam kerangka azas:



**a. Sosial;** usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga, patembayan, dan seluruh masyarakat di dalam wilayah itu diantaranya dengan mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja serta menyediakan prasarana-prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, papan, fasilitas transportasi, kesehatan, sanitasi, air minum dan lain-lainnya. **b. Ekonomi;** usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan dan perbaikan kondisi-kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan kearah yang lebih baik. **c. Wawasan Lingkungan;** pencegahan kerusakan dan pelestarian terhadap kesetimbangan lingkungan. Aktivitas sekecil apapun dari manusia yang mengambil sesuatu dari, atau memanfaatkan potensi alam, sedikit banyak akan mempengaruhi kesetimbangannya, yang apabila tidak diwaspadai dan dilakukan penyesuaian terhadap dampak-dampak yang terjadi akan menimbulkan kerugian bagi kehidupan manusia, khususnya akibat dampak yang dapat bersifat tak terubah lagi (*irreversible changes*). Untuk mencegah hal-hal ini maka didalam melakukan pengembangan wilayah, program-programnya harus *berwawasan lingkungan* dengan tujuan: mencegah kerusakan, menjaga kesetimbangan dan mempertahankan kelestarian alam (hal. 2-3).

Lebih lanjut ditegaskan Mulyanto (2008) bahwa program-program yang akan dilakukan dalam pengembangan wilayah harus dirancang dan dilaksanakan oleh, serta ditujukan bagi kepentingan-kepentingan bersama para pelaku-pelakunya yakni:

**a. Pemerintah:** yang akan bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi maupun administrasi seluruh program-program di dalam proses pengembangan wilayah sebagai administrator wilayah. Termasuk juga sebagai tugas pemerintah adalah menciptakan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang serta menyediakan kemudahan-kemudahan seperti pemberian pinjaman, hibah, atau rangsangan pajak, bagi pemilik modal/dunia usaha yang berperan serta, bantuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia, transportasi serta fasilitas-fasilitas sanitasi, dan berbagai tingkat pengaturan pemerintah pusat dalam penyediaan lahan (pemerintah). **b. Masyarakat:** dalam melaksanakan pengembangan wilayah, sebaiknya program-program yang akan dilaksanakan harus bersifat menampung dan memenuhi kehendak/aspirasi rakyat/masyarakat (*bottom-up*) yang disalurkan melewati Dewan Perwakilan Rakyat (Daerah). Dengan demikian masyarakat akan bersedia berperan sebagai subyek dan pelaku aktif pengembangan wilayah, sehingga akan memerikan peran sertanya secara maksimal. Masyarakat akan berfungsi sebagai penyedia SDM, pengawas bahkan sebagai penyedia sebagian modal yang diperlukan bagi



pengembangan wilayah. Modal ini akan diperoleh dari tabungan dan pajak-pajak yang dibayar oleh masyarakat. Disamping itu pemanfaatan produk dari pengembangan wilayah nantinya akan dapat sesuai dengan tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga akan terlaksana: kesinambungan finansial, kesinambungan sosial, dan kesinambungan institusional. **c. Dunia usaha/pemilik modal:** yang akan berperan sebagai pemasok jasa, keahlian atau expertise, dana maupun material yang diperlukan. Mereka akan mendapatkan lahan usaha, dan keuntungan dari usaha serta peran sertanya di dalam pelaksanaan pengembangan wilayah, dengan terciptanya pasar bagi produk-produk mereka (hal. 3-5).

Menurut Cadwallader (dalam Sadyohutomo, 2008), peranan pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah antara lain sebagai berikut.

1. Penyedia *service* dan barang publik (*supplier of public goods and services*).
2. Mengatur dan memfasilitasi (*regulating and facilitating*) berjalannya ekonomi pasar agar tercipta alokasi sumber daya sebaik-baiknya. Misalnya, menghindari distorsi pasar dengan membuat undang-undang *antitrust* atau undang-undang antimonopoli.
3. Sebagai *social engineering* dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan bangsa dan negara. Alokasi sumber daya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi pemerintah berkewajiban mengoreksi ketidakseimbangan sosial ekonomi dan melindungi golongan yang lemah dan minoritas.
4. Sebagai *arbiter* dalam konflik antarkelompok masyarakat (hal. 17).

Seberapa jauh pemerintah dalam melakukan intervensi dalam manajemen kota dan wilayah menurut Sadyohutomo (2008) perlu didasari pada tujuan atau sasaran dari intervensi, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyedia barang publik dan pelayanan publik.
- b. Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
- c. Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah (khususnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik).
- d. Kelestarian lingkungan.
- e. Menjaga keutuhan bangsa dan negara (hal. 18).

Pembangunan di Indonesia harus dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan pengembangan wilayah. Secara teoritis pembangunan wilayah dapat

menyeimbangkan kepentingan lokal dengan tujuan nasional secara keseluruhan (Harmadi, 2011). Kewenangan pengembangan suatu wilayah secara administratif menurut Harmadi (2011), terbatas pada wilayah politis atau administrasinya saja. Peraturan setempat hanya berlaku untuk wilayahnya. Peraturan Kota hanya berlaku dalam batas wilayah kota saja. Kerjasama antarlembaga pemerintahan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengkoordinasikan peraturan sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dalam pengembangan antarwilayah.

Myrdal (1968) mengatakan ada tiga prasyarat terhadap kecepatan pengembangan wilayah yaitu: (i) mobilisasi dan penggerakan potensi dan sumberdaya domestik, (ii) partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan dan upaya memenuhi standar hidup minimum masyarakat banyak, dan (iii) mempraktekan "perencanaan partisipatif" untuk membangun kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah sangat berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat pada wilayah dimaksud. Berbagai ragam permasalahan yang muncul dari aspek pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat bukan sekedar pada berapa jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat sebagai modal. Ada yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak mengetahui bagaimana mengelolanya. Ada pula masyarakat yang memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam yang mereka miliki, tetapi tidak dapat mengakses pasar. Dalam hubungannya dengan penelitian ini, maka konsep kebijakan pengembangan wilayah dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah daerah Kota Tual yang ditujukan untuk mempercepat



pemerataan pembangunan untuk lebih meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Kota Tual.

#### **D. Pengembangan Wilayah dalam Perspektif Administrasi Publik**

Pengembangan wilayah merupakan upaya terpadu yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah publik seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengangguran, dan masih banyak lainnya yang ada di masyarakat pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu, yang tidak merata aspek pembangunannya. Kajian pengembangan wilayah berdimensi pada tujuan negara atau daerah dan kepentingan masyarakat yang pada hakikatnya mendorong terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan serta peningkatan partisipasi dan kerjasama yang baik antarpemangku kepentingan mutlak dibutuhkan adanya intervensi pemerintah dalam mengelola semua jenis urusan publik pada wilayah tersebut. Pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki dipandang memiliki pemahaman yang memadai tentang permasalahan yang ada dan diyakini mampu menjadi pengurai masalah kesenjangan dan pemerataan pembangunan serta masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Mengingat pengembangan wilayah khususnya bagi suatu daerah otonom baru terkait erat dengan pemenuhan kepentingan publik, maka menjadi tugas utama pemerintah sebagai administrator publik agar program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien sesuai tujuan yang telah dicanangkan. Peran administrasi publik sangat vital sebagaimana diungkapkan Cleveland (dalam Keban, 2008) yaitu memberikan pelayanan publik dan meningkatkan

profesionalisme pemerintah agar pelayanan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Fokus nilai yang terkandung dalam paradigma administrasi publik menurut Frederickson (dalam Supriatna, 1996) yaitu mendesain, merencanakan dan mengorganisasikan birokrasi yang demokratis, responsif, desentralisasi, pemberdayaan dan dialogis dalam fungsi pelayanan publiknya. Kandungan nilai dimaksud menegaskan bahwa administrasi publik selalu menghendaki perubahan orientasi fungsi aparatur pemerintahan dari sekedar fungsi pengaturan, pengelolaan dan pengendalian menjadi fungsi pemberdayaan, penciptaan peluang atau kesempatan, keterbukaan dan kemitraan dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dalam upaya pelayanan publik.

Administrasi publik menurut Thoha (2011) adalah pengelolaan administrasi pemerintahan oleh aparat pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan Nigro dan Nigro (dalam Syafiie, Tanjung, dan Modeong, 1999) mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut.

1. Administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan bagian dari proses politik.
4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Fesler (dalam Keban, 2008) mengartikan administrasi publik sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan ditujukan untuk kepentingan publik. Ada beberapa makna penting



berkenaan dengan hakekat administrasi publik menurut Keban (2008) sebagai berikut.

1. Berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia yudikatif dan legislatif;
2. Berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik;
3. Berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah;
4. Tumpang tindih dengan administrasi swasta.

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik merupakan upaya yang sifatnya kompleks karena memadukan penggunaan sumberdaya, meningkatkan keserasian antarkawasan, dan keterpaduan antarsektor yang berkelanjutan sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan unggulan yang memihak pada kepentingan publik. Kebijakan publik yang merupakan ruang lingkup administrasi publik dibutuhkan dalam mewujudkan kehendak publik atau masyarakat pada wilayah pengembangan tersebut.

Kismartini, Suwitri, Santoso, Purnaweni, dan Yuwono (2011) merangkum pendapat para ilmuwan administrasi publik tentang kebijakan publik sebagai berikut.

**Thomas R. Dye;**

Kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

**George C. Edwards III dan Ira Sharkansky;**

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam policy statement yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.

Kebijakan publik juga adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

**James E. Anderson ;**

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

**Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan;**

Kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

**David Easton;**

Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat (hal. 1.6-1.7)

Kebijakan publik sering dimaknai berdasarkan sektor kebijakan tertentu.

Kebijakan pengembangan wilayah dipandang sebagai kebijakan publik karena menyangkut orang banyak yang disebut publik serta merupakan area kebijakan publik. Hal ini diungkapkan oleh Parsons (2008) tentang kebijakan publik sebagai berikut.

Kebijakan publik adalah bidang yang cenderung didefinisikan berdasarkan area dan sektor kebijakan, dan dalam sebagian besar *setting* ini terjadi interaksi antardisiplin dan antar-institusi. Mereka juga menyediakan konteks studi perbandingan. Beberapa area penting dalam kebijakan publik antara lain: kesehatan, transportasi, pendidikan, lingkungan, kebijakan sosial, perumahan, kebijakan ekonomi, ras, dan perencanaan tata kota (hal. 32).

Kesenjangan antarwilayah yang disebabkan tidak meratanya pengembangan wilayah merupakan dinamika administrasi publik yang sering dijadikan isu pemekaran daerah. Daerah dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah namun masyarakat tidak dapat mengakses untuk peningkatan kesejahteraannya baik yang dilatarbelakangi karena keterbatasan sumberdaya manusianya maupun ketidakmampuan mengakses kebutuhannya secara berkesinambungan menjadi kajian utama administrasi publik. Peran administrator publik menjadi kunci berhasil tidaknya upaya pengembangan suatu wilayah.



### **E. Kebijakan Pengelolaan Anggaran dalam Pengembangan Wilayah**

Anggaran pemerintah daerah atau keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang harus ditaati yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, disiplin, dan prinsip keadilan.

Anggaran menurut Jones & Pendlebury (dalam Nurcholis, 2007) merupakan:

Alokasi sumber-sumber daya yang dibuat secara terencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, yang didasarkan pada sejumlah tujuan tertentu dengan mengaitkan antara penerimaan-penerimaan yang diperkirakan dengan pengeluaran-pengeluaran yang direncanakan, serta membentuk atau menetapkan suatu dasar untuk mengukur atau mengontrol pengeluaran dan pendapatan (hal. 179).

Pengembangan wilayah dalam praktiknya membutuhkan anggaran yang besar karena ruang lingkup pengembangan wilayah yang luas. Berbagai bidang infrastruktur dibangun untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah, seperti bidang infrastruktur transportasi melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jalan/jembatan/dermaga di desa dengan cakupan sebanyak-banyaknya masyarakat yang dapat mengambil dan menerima manfaat. Bidang infrastruktur informasi dan telekomunikasi menuju peningkatan perekonomian setempat, bidang infrastruktur sosial seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan air bersih, bidang infrastruktur ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan produktivitas masyarakat, dan bidang infrastruktur energi melalui pembangunan pembangkit listrik yang menjangkau warga masyarakat yang tinggal di desa atau daerah terpencil.

Pengurangan kesenjangan antarwilayah walaupun telah dimasukkan menjadi salah satu agenda kebijakan oleh hampir semua instansi pemerintah daerah, pada kenyataannya pengalokasian dana pengembangan wilayah yang dilakukan oleh kementerian-kementerian (pemerintah pusat) melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan atau oleh daerah melalui dana APBD provinsi dan kabupaten/kota, sampai saat ini hasilnya belum mampu mengurangi secara signifikan kesenjangan yang ada. Disamping itu, juga harus dilaksanakan dengan strategi bahwa program pembangunan perlu dilakukan dengan komitmen yang kuat melalui pengalokasian dana yang memadai oleh semua tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharannya.

Pada tataran perencanaan, berbagai dokumen perencanaan pada tingkat pusat telah memberikan arahan yang cukup jelas kepada kementerian dan instansi pusat, terkait dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di daerah-daerah yang masih tertinggal. Namun, karena mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan masih berjalan secara parsial berdasarkan prioritas sektor masing-masing, dan ditambah dengan masih lemahnya koordinasi antara departemen dan pemerintah daerah yang bersangkutan mengakibatkan lemahnya sinergitas dan keterpaduan kegiatan dan program yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan dengan dana yang dibiayai melalui APBD. Selain itu, keterbatasan APBD pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, terutama di daerah-daerah yang relatif kurang maju, justru menyebabkan



pemerintah daerah yang bersangkutan menempatkan skala prioritas yang rendah terhadap pembangunan wilayah yang relatif tertinggal.

Pada hakikatnya alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selain bertujuan untuk membantu daerah yang tidak memiliki ketersediaan dana yang cukup untuk menjalankan fungsinya, juga digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemerintah pusat. Devas (dalam Ikhsan, Santosa, dan Harmani, 2011) menyebutkan tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut.

1. Untuk membiayai kekurangan dana yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan yang diembannya.
2. Untuk mempengaruhi pola pembiayaan yang dianut oleh Daerah agar standar pelayanan yang dikehendaki oleh Pemerintah Pusat dapat dicapai.
3. Untuk mengontrol pengeluaran daerah baik secara menyeluruh maupun pada pelayanan-pelayanan tertentu.
4. Untuk menutupi kesenjangan antar Daerah.
5. Untuk memberikan kompensasi terhadap daerah tertentu karena pelayanan yang diberikannya menjangkau daerah lain.
6. Untuk memobilisasi dana di daerah.
7. Untuk merangsang tanggung jawab daerah dalam mengambil keputusan dalam rangka menjalankan otonominya.
8. Untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah.
9. Untuk mengatasi keadaan darurat.

Dana tidak tersedia, dana tersedia tidak tepat waktu, atau dan tersedia tetapi tidak dialokasikan sesuai rencana tata ruang merupakan masalah-masalah klasik dalam pendanaan manajemen kota dan wilayah di Indonesia. Sadyohutomo (2008) mengemukakan penyebab timbulnya masalah-masalah tersebut karena hal-hal berikut.

1. Dalam proses penyusunan rencana belum dimasukkan komponen perkiraan biaya pelaksanaan rencana.
2. Perkiraan peningkatan pendapatan daerah yang akan diperoleh tidak dilakukan sehingga penerapan rencana tata ruang menjadi kurang menarik bagi pihak eksekutif dan legislatif.
3. Rencana tata ruang belum digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran tahunan (APBD/APBN).

4. Masyarakat yang memiliki dana, kurang informasi terhadap rencana tata ruang sehingga mereka ragu-ragu dalam melakukan investasi pada areal yang tidak sesuai rencana tata ruang.
5. Perencanaan alokasi dana yang tidak tepat sasaran atau setengah-setengah.

Dalam hal ini, dibutuhkan kebijakan pengelolaan anggaran bagi pengembangan wilayah secara baik dan cermat. Mulyanto (2008) mengemukakan beberapa saran dalam kaitannya dengan pengelolaan dana pengembangan wilayah sebagai berikut.

- a. perlu disusun suatu rencana sistematis terhadap program-program investasi masyarakat secara terpadu.
- b. perlu diadakan perhitungan untung rugi dari proyek-proyek investasi alternatif pada sektor/satuan kerja publik secara menyeluruh untuk mendapatkan kombinasi proyek-proyek yang paling menguntungkan.
- c. memberikan prioritas kepada proyek-proyek yang cepat memberikan hasil.
- d. Perlu disiplin pengendalian anggaran tahunan untuk menghindari penyimpangan dari rencana semula.

Kebijakan anggaran menurut Valiani (2012) dilakukan pemerintah dengan tujuan sebagai berikut. a. untuk menciptakan stabilitas ekonomi, b. untuk menciptakan lapangan kerja, c. untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi, dan d. untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan. Kebijakan pengelolaan anggaran menurut Valiani (2012) adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.

#### **F. Kebijakan Pengembangan SDM dalam Pengembangan Wilayah**

Kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi, dan mengembangkan diri terhadap segala perubahan merupakan kunci bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan masyarakat diperlukan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai



dengan kondisi dan karakteristik daerahnya. Dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu peningkatan inovasi di berbagai bidang. Sumber daya manusia merupakan modal dasar yang harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan tersebut.

Sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang berlebihan, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal suatu kegiatan organisasi tidak akan terselesaikan dengan baik. Dalam hal pelaksanaan pengembangan wilayah, diperlukan sumber daya manusia yang senantiasa berkualitas, berdedikasi tinggi dan profesional sehingga mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi daerah. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pengembangan wilayah yang telah ditetapkan. Tercapainya kinerja yang baik ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula.

Suatu perencanaan sumber daya manusia dalam jangka panjang perlu melibatkan usaha integrasi antara strategi organisasi, strategi sumber daya manusia, dan perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Kaitannya dengan pengembangan wilayah, ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari adanya pertalian dan integrasi antara perencanaan strategik pengembangan wilayah dengan perencanaan sumber daya manusia, diantaranya menurut Greer (dalam Iswanto, 2005) adalah:

- 1) menghasilkan solusi lebih beragam terhadap masalah organisasional yang rumit,
- 2) memastikan adanya pertimbangan sumber daya manusia di dalam proses-proses perancangan sasaran organisasional,

- 3) memastikan adanya pertimbangan sumber daya manusia di dalam menilai kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran dan mengimplementasikan strategi (hal. 2.5).

Sumber daya manusia merupakan faktor mendasar dan strategis bagi pengembangan wilayah. Kondisi ideal ketersediaan SDM yang kuat dan berdaya saing merupakan pendukung peningkatan upaya pengembangan wilayah yang akan dan sedang dilaksanakan. Mengingat pentingnya ketersediaan SDM bagi pengembangan wilayah, maka pengembangan SDM merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Diperlukan intervensi kebijakan pengembangan SDM yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala pengembangan wilayah yang ada.

Kebijakan pengembangan SDM dalam pengembangan wilayah dimaksudkan sebagai penyediaan SDM pelaksana pengembangan wilayah dari berbagai sisi baik kuantitas, keahlian, wawasan, etos kerja, maupun integritas agar mampu merencanakan dan melaksanakan koordinasi, konsistensi, sinkronisasi serta mengatur sinergi program suatu sektor/satuan kerja maupun program-program antar sektor/satuan kerja dalam pelaksanaan pengembangan wilayah (Mulyanto, 2008). Untuk memenuhi semua ini, suatu organisasi pemerintah terlebih bagi suatu organisasi pemerintah yang baru, memerlukan adanya perencanaan sumber daya manusia, baik secara formal maupun informal. Menurut Ivancevich (dalam Iswanto, 2005), secara formal terdapat beberapa alasan utama yang ingin dicapai di dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu:

- 1) **Lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya manusia;**

Perencanaan sumber daya manusia harus mendahului seluruh aktivitas manajemen sumber daya manusia lainnya. Sebagai contoh, untuk dapat menyusun skedul penarikan karyawan dengan baik, harus mengetahui terlebih dahulu berapa banyak karyawan yang akan dibutuhkan. Untuk dapat melakukan seleksi secara efektif, harus mengetahui terlebih dahulu orang yang seperti apa yang diperlukan pada jabatan yang



sedang dibuka tersebut. Dengan kata lain, keefektifan dan keefisienan seluruh aktivitas manajemen sumber daya manusia sangat tergantung pada perencanaan sumber daya manusia.

**2) memastikan adanya pertimbangan sumber daya manusia di dalam proses-proses perancangan sasaran organisasional;**

Karyawan yang bekerja dalam organisasi yang menggunakan sistem perencanaan sumber daya manusia dengan baik, akan memiliki kesempatan berpartisipasi yang lebih baik dalam perencanaan karier mereka masing-masing, dan saling berbagi pengalaman di dalam pelatihan dan pengembangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk merasa bahwa bakat yang mereka miliki adalah penting bagi organisasi, dan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memanfaatkan bakat mereka tersebut. Kondisi semacam ini seringkali memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada karyawan, yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat absensi, tingkat perputaran dan tingkat kecelakaan serta meningkatkan kualitas kerja karyawan.

**3) Lebih efektif dalam perencanaan peluang kerja yang sama (*equal*);**

Organisasi dituntut untuk dapat memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan lamaran maupun pemanfaatan pekerja dari kaum minoritas. Organisasi juga harus sadar mengenai keterwakilan kaum minoritas di dalam departemen, dan jabatan-jabatan dalam organisasi. Hal ini semua akan dapat dengan mudah untuk dilaksanakan dan dilaporkan jika dalam organisasi yang bersangkutan terdapat perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh (hal. 2.21-2.22).

Pelatihan SDM menjadi penting dalam mewujudkan percepatan pengembangan wilayah. Iswanto (2005) merangkum dan memaknai lebih lanjut beberapa pendapat ahli tentang pelatihan sebagai berikut.

**Dessler (2000);**

Pelatihan merupakan pengajaran kepada karyawan baru tentang keahlian dasar yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Menurut definisi ini, pelatihan hanya khusus untuk karyawan yang baru dan ditujukan hanya untuk melaksanakan pekerjaan saja.

**Byars dan Rue (1997);**

Pelatihan merupakan suatu proses belajar yang mencakup penguasaan keahlian, konsep, hukum-hukum, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan.

Definisi ini lebih umum karena mencakup keseluruhan karyawan (baik lama maupun baru), tidak terbatas hanya pada keahlian dasar saja, tetapi lebih ke arah untuk meningkatkan kinerja. Artinya, tidak hanya sekadar dapat melaksanakan pekerjaan saja, tetapi menjalankan pekerjaan agar berkinerja lebih tinggi (produktif).

**Ivancevich (1992);**

Pelatihan merupakan suatu proses mengubah perilaku karyawan yang sistematis dalam suatu kerangka tujuan untuk meningkatkan sasaran organisasi.

Secara implisit definisi ini menginformasikan kepada kita adanya suatu konsep dinamika lingkungan yang harus diantisipasi oleh organisasi agar dapat melakukan usaha-usaha yang bersifat strategik dalam usahanya mempertahankan kemampuan kompetitif. Perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan pemerintahan, misalnya, telah diketahui secara signifikan mempengaruhi sasaran dan strategi semua organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus selalu memperbaiki dan meningkatkan sasaran organisasi. Perubahan dan ekspansi organisasional yang terencana menuntut perlunya karyawan untuk selalu memperbaiki pengetahuan dan keterampilan atau bahkan pengetahuan dan keterampilan yang baru samasekali (hal. 4.4-4.5)

**G. Kebijakan Pengembangan Data dan Informasi dalam Pengembangan****Wilayah**

Salah satu bagian terpenting dalam manajemen pembangunan adalah data atau informasi yang dapat menggambarkan keseluruhan kinerja dari suatu daerah, sehingga keputusan yang diambil atau kebijaksanaan yang akan diterapkan pada daerah tersebut sudah memperhitungkan semua informasi yang ada dan benar. Sistem Informasi Perencanaan kemudian menjadi suatu solusi yang dapat diandalkan untuk menggabungkan antara kecepatan perkembangan kemampuan komputer di dalam perencanaan tata ruang baik dari segi analisis numerik maupun analisis keruangan dengan tuntutan untuk dapat melihat aspek daerah secara utuh dan lengkap dalam manajemen pembangunan.

Salah satu penghambat kelancaran pelaksanaan pengembangan wilayah baik dalam fase permulaan maupun dalam fase-fase lanjutan menurut Mulyanto (2008) yaitu tidak lengkapnya/tersedianya data dan informasi penunjang yang diperlukan dalam merencanakan program-program pengembangan wilayah yang tepat sasaran.



Kelemahan sistem perencanaan baik proses, prosedur, peraturan akan lebih mudah diketahui dan diperbaiki dengan adanya sebuah sistem data dan informasi perencanaan yang baik yang memenuhi persyaratan transparansi, konsistensi dan kepastian. Kumorotomo dan Margono (1994) mengemukakan bahwa data adalah fakta yang sedang tidak digunakan dalam proses pembuatan keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pembuatan keputusan. Adapun informasi menurut Kumorotomo dan Margono (1994) terdiri dari data yang telah diambil kembali, diolah dan digunakan untuk memberi dukungan keterangan untuk pembuatan keputusan. Informasi adalah data yang telah disusun sedemikian rupa, sehingga bermakna dan bermanfaat untuk membuat keputusan.

Syarat-syarat informasi yang baik menurut Parker (dalam Kumorotomo dan Margono, 1994) sebagai berikut.

- a. Ketersediaan;  
Syarat pokok bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi yang hendak memanfaatkannya.
- b. Mudah dipahami;  
Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat kebijakan.
- c. Relevan;  
Informasi yang diperlukan harus benar-benar relevan dengan permasalahannya.
- d. Bermanfaat;  
Terkait dengan syarat relevansi, informasi harus bermanfaat bagi pembuat kebijakan.
- e. Tepat waktu;  
Informasi harus tersedia tepat waktunya, terutama apabila pembuat kebijakan ingin segera memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah.
- f. Keandalan;  
Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya.
- g. Akurat;  
Informasi seyogyanya bersih dari kesalahan, harus jelas dan secara tepat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

- h. Konsisten;  
Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi dalam penyajiannya.

Dalam pengembangan wilayah diperlukan rencana induk, yang di daerah lebih dikenal dengan RTRW. Untuk menyusun rencana induk pengembangan wilayah diperlukan penilaian terhadap keadaan ekonomi terkini dan menyediakan informasi tentang hal itu. Rencana induk yang dibuat harus dapat meningkatkan koordinasi antar sektor/satuan kerja, yang perlu didahului dengan transparansi penyebaran informasi terpercaya.

Keberhasilan dan kegagalan pengembangan wilayah tergantung dari efektifnya penyebaran data dan informasi. Hal ini menjadikan faktor ketersediaan data dan informasi yang memadai serta senantiasa menyesuaikan dengan kondisi terkini memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah. Guna mewujudkan ketersediaan data secara memadai baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pengembangan wilayah, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah, maka pengembangan data dan informasi menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan.

Serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan pengembangan data dan informasi oleh pemerintah diperlukan guna memenuhi maksud di atas. Kebijakan pengembangan data dan informasi merupakan serangkaian upaya untuk menunjang perencanaan pengembangan wilayah serinci mungkin dan mengusahakan memberikan data dan informasi untuk mengetahui konsistensi dari perencanaan pengembangan wilayah tersebut (Mulyanto, 2008). Adapun Harmadi (2011) menggambarkan tentang kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah sebagai serangkaian tindakan dari pusat-pusat informasi kewilayahan dengan memuat segala macam pengetahuan dalam



berbagai bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan kewilayahan dan pengembangannya.

## H. Otonomi Daerah

Barangkali tak ada aspek pemerintahan di Indonesia yang lebih sering mengalami perubahan, baik pada tingkat semangat maupun pada tingkat regulasi, selain otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Otonomi daerah merupakan isu yang mengemuka di tahun 1990-an dan pada akhirnya terealisasi pada tahun 1999 dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Peralihan sistem yang semula sentralistik menjadi desentralistik idealnya dibarengi pula dengan perubahan pola pikir. Hal ini penting dilakukan karena sistem tersebut masing-masing memiliki filosofi dan logikanya sendiri. Indonesia telah berproses cukup panjang dalam hal upaya menata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada era reformasi disaat diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi dilaksanakan dengan memisahkan secara tegas antara institusi pemerintahan daerah dengan institusi DPRD (Sarundajang, 1999).

Pemahaman tentang konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah dan masyarakat menjadi penting. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan

kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang ini telah menimbulkan konsekuensi logis tentang perluasan kewenangan secara signifikan yang mempengaruhi praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Otonomi daerah terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahannya secara hirarki (Rasyid dalam Yudoyono, 2003). Melalui pelimpahan wewenang itulah pemerintah daerah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreatifitas mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu desentralisasi dapat juga dipahami sebagai penyerahan wewenang politik dan perundang-undangan untuk perencanaan, pengembangan keputusan dan manajemen pemerintahan dari pemerintah pusat kepada unit-unit sub nasional daerah/wilayah (Yudoyono, 2003).

Konsep otonomi daerah secara umum juga dikemukakan oleh Hasibuan (2002) yakni ada kewenangan yang melekat pada sesuatu organisasi atau unit dalam organisasi untuk mengembangkan fungsi-fungsi tertentu. Otonomi dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu: (1) Otonomi negara dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat terutama ekonomi dan politik. (2) Ekonomi pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. (3) Ekonomi unit-unit bawahan dalam organisasi pemerintahan dalam hubungannya dengan unit-unit yang lebih tinggi.

Menurut Hasibuan (2002) bahwa secara prinsip kewenangan otonomi yang diberikan kepada suatu pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan



penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pelayanan terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Artinya bahwa siapapun dalam masyarakat itu harus mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah.

Daerah yang menerima penyerahan wewenang dari pusat dengan cara desentralisasi menjadi daerah otonom. Daerah ini disebut daerah otonom karena penduduknya berhak mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsanya sendiri. Daerah tersebut memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat (Nurcholis, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah selain harus sesuai dengan konstitusi negara agar tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah juga harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom (Bratakusumah dan Solihin, 2002).

Otonomi daerah juga dimaknai dalam berbagai konteks. Haris, Pabottinggi, Hidayat, Salamm, Ratnawati, dan Romli (2004) memaknai otonomi daerah dalam konteks ekonomi sebagai perluasan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengejar kesejahteraan dan memajukan dirinya. Sedangkan otonomi daerah dalam konteks sosial bermakna sebagai peluang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kualitas masyarakatnya dan berbagi tanggung jawab dengan pemerintah pusat dalam meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Dalam konteks kebudayaan, otonomi daerah bermakna sebagai peluang yang terbuka bagi daerah-daerah untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai dan karakter budaya setempat.

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam hal ini Pemerintahan Daerah diasumsikan memiliki pengetahuan dan kepehaman mengenai potensi dan kebutuhan daerah. Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap dalam pelayanan publik di daerah masing-masing, sehingga pelayanan publik yang dihasilkan juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah. Meskipun demikian, kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tidaklah berada dalam ruang kosong (vakum).

Menurut Hasibuan (2002) bahwa melalui kewenangan ekonomi itu, secara logis dapat diharapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik kualitasnya, karena faktor jarak yang lebih dekat. Upaya pemberdayaan masyarakatpun bisa efektif berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan potensi-potensi yang dikembangkan dari masyarakat. Aparatur pemerintahan di daerah benar-benar mampu untuk menyerap aspirasi masyarakat, merekapun dapat diharapkan mampu merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dibuat masyarakat dari waktu ke waktu.

Menurut Hasibuan (2002), otonomi daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, keberhasilan peningkatan ekonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan aparatur pemerintah pusat termasuk sumber daya manusianya dalam tugasnya sebagai perumus kebijaksanaan nasional. Arus kebijaksanaan dari pusat harus secara transparan mengalir melalui pemerintah daerah provinsi dan dapat diterjemahkan secara optimal oleh pemerintah daerah



Kabupaten/Kota dan sebaliknya, dapat digunakan sebagai masukan guna perumusan kebijaksanaan nasional dan pelaksanaan operasional yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyerahan urusan dapat tercapai sesuai yang dikehendaki.

Otonomi daerah menurut Simon (dalam Dwidjowijoto, 2000) berarti kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kunci dari pemberian otonomi adalah efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian daerah.

### **I. Pemekaran Daerah/Wilayah**

Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam

rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi. Melalui interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal. Pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat



beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara lebih khusus, UU No. 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah”.

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”, dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi provinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD

kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor di bawah ini, antara lain:

- a. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah propinsi, kabupaten/kota, yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan daerah sendiri.
- b. Potensi daerah, merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dari lembaga keuangan, sarana ekonomi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana transportasi dan komunikasi, sarana pariwisata dan ketenagakerjaan.
- c. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, kondisi sosial masyarakat yang dapat diukur dari tempat peribadatan, tempat kegiatan institusi sosial dan budaya, serta sarana olahraga.
- d. Sosial politik, merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari partisipasi masyarakat dalam politik dan organisasi kemasyarakatan.

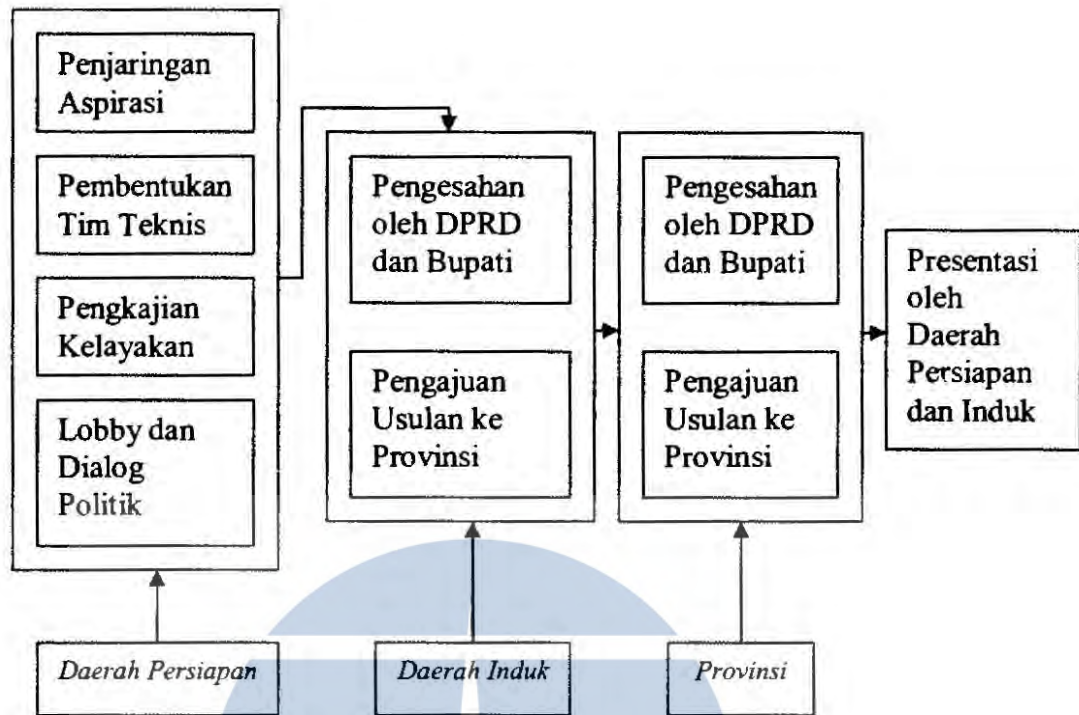


- e. Kependudukan, merupakan jumlah total penduduk suatu daerah.
- f. Luas daerah, merupakan luas tertentu suatu daerah.
- g. Pertahanan dan keamanan
- h. Faktor-faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Faktor-faktor lain yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi, dan paling sedikit 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Inisiatif pemekaran wilayah pada dasarnya berangkat dari adanya peluang hukum bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran/ penggabungan wilayah sebagaimana tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari sisi pemerintah pusat, proses pembahasan pemekaran wilayah yang datang dari berbagai daerah melalui dua tahapan besar yaitu proses teknokratis (kajian kelayakan teknis dan administratif), serta proses politik karena selain harus memenuhi persyaratan teknokratis yang telah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah, proposal pemekaran harus didukung secara politis oleh DPR. Berikut digambarkan tentang skema proses pengusulan pemekaran di tingkat daerah.

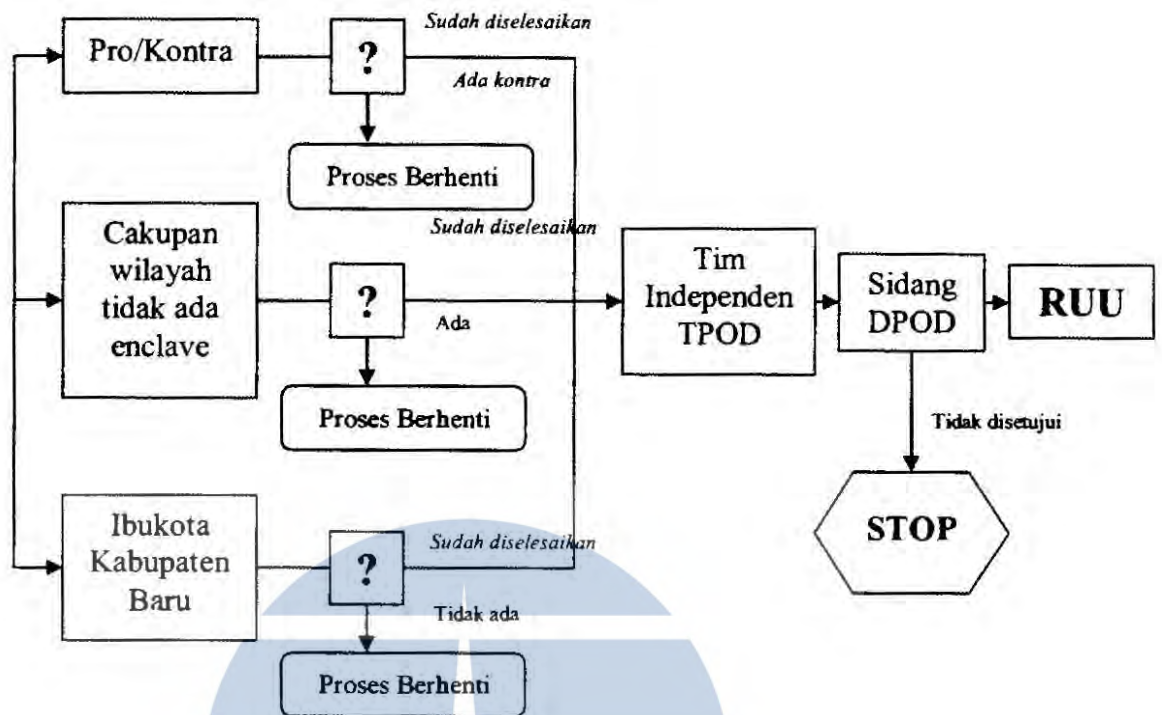


**Gambar 2.1 Proses Pengusulan Wilayah Pemekaran di Tingkat Daerah**

Gambar 2.1 diatas menjelaskan bahwa persiapan dalam pemekaran wilayah dimulai dari wilayah yang mengusulkan. Usulan-usulan tersebut berbentuk proposal yang sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan didalamnya dan kajian-kajian ilmiah, sehingga ketika proposal rencana pemekaran wilayah tersebut diajukan ke DPRD kabupaten/kota dan kemudian ke provinsi, dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memahami proses kebijakan pemekaran, perlu digambarkan bagaimana pemerintah nasional meloloskan usulan pemekaran daerah otonom. Prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk “meluluskan atau tidak meluluskan” proposal pembentukan daerah otonom baru secara teknokratis dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.





**Gambar 2.2 Tahapan dan Prosedur Pembentukan Kabupaten/Kota**

Gambar 2.2 di atas menjelaskan tentang tahapan dan prosedur pembentukan daerah kabupaten/kota menurut pasal 16 PP No.129 Tahun 2000, yang terdiri dari:

- a. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan.
- b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan propinsi, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.

- d. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Berdasarkan rekomendasi pada huruf d, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut di lapangan.
- e. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi Daerah. Usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- f. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
- g. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 menyebutkan tujuan pembentukan dan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat, b. percepatan pertumbuhan kehidupan dan demokrasi, c.



percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, d. percepatan pengelolaan potensi daerah, e. meningkatkan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah.

Adapun peran pihak-pihak di Daerah dalam pemekaran wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **a. Daerah Persiapan**

Dalam melakukan pemekaran wilayah, maka pembentukan daerah persiapan menjadi penting dalam upaya penataan daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka peran daerah persiapan tidak saja mencakup persoalan administratif semata, tetapi juga perlu mencakup beberapa aspek lain, antara lain:

- 1) Mempersiapkan persyaratan fisik yang berkaitan dengan penataan ruang maupun batas wilayah. Disamping itu juga terumuskannya dokumen rencana tata ruang lokasi calon Ibukota daerah otonom baru maupun calon Ibukota Daerah Induk.
- 2) Mempersiapkan persyaratan kelembagaan dan organisasi yang berkaitan dengan kebutuhan kantor, identifikasi aset, fungsi staf, struktur organisasi, maupun proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini penting dilakukan dalam masa persiapan agar proses pemekaran wilayah menjadi kebutuhan bersama antara Daerah Induk dengan Calon Daerah Otonomi Baru. Dengan demikian konflik tentang pengalihan aset-pun sudah dapat dihindari sejak awal.
- 3) Mempersiapkan persyaratan teknis administratif yang berkaitan dengan kerjasama dengan Daerah Induk dan pihak ketiga yang akan melakukan pengkajian terhadap kelayakan pembentukan daerah otonomi baru atau

pemekaran wilayah. Berkaitan dengan daerah persiapan ini, maka perlu ada persyaratan-persyaratan khusus, seperti daerah yang sudah memenuhi standar kelayakan teknis dan administratif bagi terbentuknya daerah otonomi baru yang ditetapkan melalui rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) atau Permendagri yang selanjutnya mempersiapkan diri selama minimal 2 (dua) tahun sebagai masa persiapan sebelum disahkan sebagai daerah otonom baru yang ditetapkan dengan Undang-undang.

#### **b. Peran Masyarakat**

Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran wilayah. Hal ini sesuai dengan hakekat pemekaran wilayah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran wilayah.

Dalam kaitan dengan hal ini, lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat juga harus berperan dalam memberdayakan masyarakat supaya ada pengertian yang baik tentang keuntungan dan kelemahan pemekaran wilayah maupun pentingnya pelaksanaan referendum. Dengan demikian, dalam tahap awal atau masa persiapan, kegiatan yang harus dilaksanakan pertama kali adalah melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat. Meskipun terdapat berbagai metode penjangkaran aspirasi seperti melalui questioner, seminar atau lokakarya, namun dalam hal pemekaran wilayah nampaknya referendum merupakan pendekatan yang paling tepat.



### c. Peran Daerah Induk

Adapun peran Bupati sebagai kepala di daerah induk, yaitu:

- 1) Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana pemekaran wilayah berdasarkan aspirasi masyarakat melalui referendum.
- 2) Melakukan hearing dengan dengan Daerah Persiapan
- 3) Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri untuk dapat mengabulkan rencana pemekaran wilayah
- 4) Menetapkan *Liason Officer* sebagai wakil Daerah Induk untuk melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak yang terkait baik di tingkat daerah, propinsi, maupun pemerintah pusat. Memfasilitasi kunjungan tim observasi dari pemerintah pusat dan DPR RI.
- 5) Mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pemekaran wilayah.

### d. Peran DPRD

Adapun peran DPRD kabupaten/kota sebagai unsur legislatif dalam pemekaran wilayah, yaitu:

- 1) Memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap rencana pemekaran wilayah.
- 2) Membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang akan melakukan pembahasan tentang rencana pemekaran wilayah
- 3) Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan terhadap pemekaran wilayah, serta keputusan tentang calon Ibu Kota dan dukungan pembiayaan dalam masa persiapan sampai pada proses pembentukan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah.

- 4) Memberikan rekomendasi sekaligus permohonan kepada DPRD Propinsi untuk dapat memberikan persetujuan terhadap rencana pemekaran wilayah.

#### e. Peran Provinsi

Peran provinsi dalam pemekaran wilayah yaitu:

- 1) Memberikan rekomendasi dan persetujuan tentang pemekaran wilayah, serta menindaklanjutinya dengan mengajukan permohonan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- 2) Memfasilitasi serah terima aset antara daerah induk dengan daerah baru.

#### J. Kerangka Berpikir

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Undang-Undang ini telah menimbulkan konsekuensi logis tentang perluasan kewenangan secara signifikan yang mempengaruhi praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Hasibuan (2002) mengemukakan bahwa pemberian otonomi daerah merupakan suatu prasyarat untuk terciptanya suatu pembangunan daerah dan nasional yang *sustainable*. Pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah. Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah-daerah yang



mempunyai pemerintahan, yaitu daerah-daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah, dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai, dan kewenangan serta keleluasaan mengatur dan mengurus daerah.

Kota Tual merupakan Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 2007, terdiri atas 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Dullah Utara, Kecamatan Dullah Selatan, Kecamatan Tayando Tam, dan Kecamatan Pulau-pulau Kur. Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah serta mengatasi berbagai kendala yang ada, dibutuhkan adanya intervensi pemerintah berupa kebijakan pengembangan wilayah yang dimaknai sebagai serangkaian tindakan pemerintah daerah Kota Tual yang ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Kota Tual.

Pengembangan wilayah menurut Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2003) adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI. Secara nyata, penyelenggaraan pengembangan wilayah di Kota Tual berjalan dengan baik dan relatif berhasil.

Pengembangan wilayah dalam praktiknya membutuhkan anggaran yang besar karena ruang lingkup pengembangan wilayah yang luas. Keterbatasan anggaran dalam pengembangan wilayah khususnya pada daerah otonom baru selalu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut.

Untuk itu kebijakan pengelolaan anggaran dalam pengembangan wilayah merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kebijakan pengelolaan anggaran dimaksudkan sebagai kemampuan daerah otonom Kota Tual dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran pengembangan wilayah yang tersedia. Kebijakan pengelolaan anggaran menurut Valiani (2012) adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap.

Kendala yang ditemui juga dalam pengembangan wilayah khususnya pada daerah otonom baru yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Pelaksanaan pengembangan wilayah mutlak diperlukan sumber daya manusia yang senantiasa berkualitas, berdedikasi tinggi dan profesional sehingga mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan wilayah pada daerah otonom baru. Mengingat pentingnya ketersediaan SDM bagi pengembangan wilayah, maka pengembangan SDM merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Diperlukan intervensi kebijakan pengembangan SDM yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala pengembangan wilayah yang ada.

Kebijakan pengembangan SDM dalam pengembangan wilayah dimaksudkan sebagai penyediaan SDM pelaksana pengembangan wilayah dari berbagai sisi baik kuantitas, keahlian, wawasan, etos kerja, maupun integritas agar mampu merencanakan dan melaksanakan koordinasi, konsistensi, sinkronisasi serta mengatur sinergi program suatu sektor/satuan kerja maupun program-program antar sektor/satuan kerja dalam pelaksanaan pengembangan wilayah (Mulyanto, 2008).



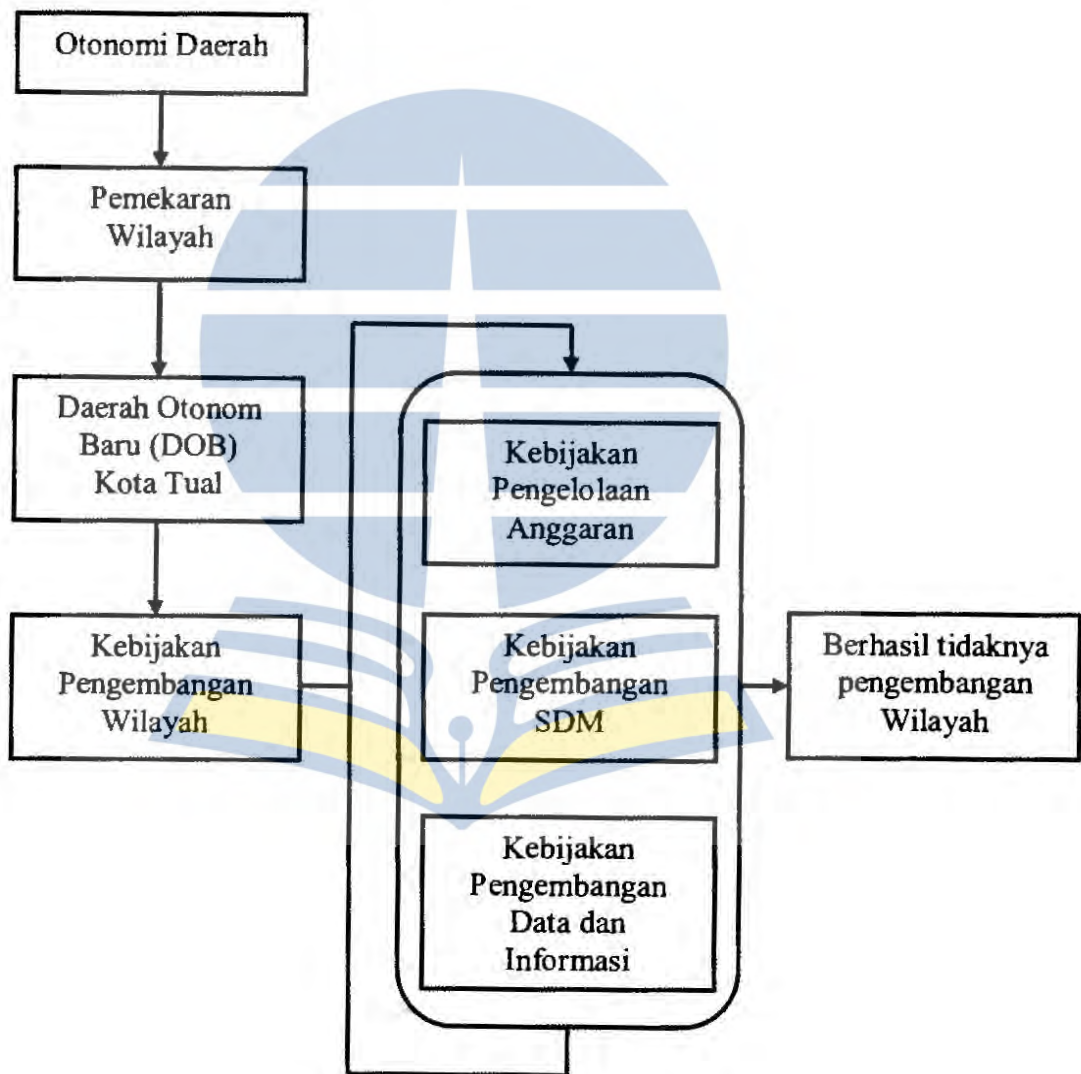
Kendala lainnya sebagai penghambat kelancaran pelaksanaan pengembangan wilayah baik dalam fase permulaan maupun dalam fase-fase lanjutan menurut Mulyanto (2008) yaitu tidak lengkapnya/tersedianya data dan informasi penunjang yang diperlukan dalam merencanakan program-program pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Kelemahan sistem perencanaan baik proses, prosedur, peraturan akan lebih mudah diketahui dan diperbaiki dengan adanya sebuah sistem data dan informasi perencanaan yang baik yang memenuhi persyaratan transparansi, konsistensi dan kepastian.

Keberhasilan dan kegagalan pengembangan wilayah tergantung dari efektifnya penyebaran data dan informasi. Hal ini menjadikan faktor ketersediaan data dan informasi yang memadai serta senantiasa sesuai dengan kondisi terkini memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah. Guna mewujudkan ketersediaan data secara memadai baik untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pengembangan wilayah, serta sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah, maka pengembangan data dan informasi menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan.

Serangkaian tindakan dalam bentuk kebijakan pengembangan data dan informasi oleh pemerintah diperlukan guna memenuhi maksud di atas. Kebijakan pengembangan data dan informasi merupakan serangkaian upaya untuk menunjang perencanaan pengembangan wilayah serinci mungkin dan mengusahakan memberikan data dan informasi untuk mengetahui konsistensi dari perencanaan pengembangan wilayah tersebut (Mulyanto, 2008). Adapun Harmadi (2011) menggambarkan tentang kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah sebagai serangkaian tindakan dari pusat-pusat

informasi kewilayahan dengan memuat segala macam pengetahuan dalam berbagai bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan kewilayahan dan pengembangannya.

Kerangka berpikir mengenai kebijakan pengembangan wilayah pada Daerah Otonom Baru Kota Tual dalam mendukung pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat pada Bagan 2.1 berikut.



**Bagan 2.1 Kerangka Berpikir**



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian tentang kebijakan pengembangan wilayah Kota Tual sebagai daerah otonom baru dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas sehingga makna yang berada di balik realita empirik tersebut dapat dipahami dan diungkap. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan terjadinya proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif menurut Saryono (2010) merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dan diukur melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif diartikan oleh Taylor dan Bogdan (dalam Suyanto dan Sutinah, 2010) sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis serta tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.

Menurut penjelasan Creswell (1994) bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial melalui penciptaan gambaran holistik lengkap berupa kata-kata, memuat pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. Penelitian kualitatif menurut Oetomo (dalam Suyanto dkk., 2010) senantiasa berakar pada

kenyataan empiris, walaupun dapat saja diilhami oleh berbagai tradisi dan orientasi pemikiran yang berbeda-beda.

Penelitian kualitatif menurut Nawawi (1994) merupakan rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya terhadap suatu masalah pada kondisi tertentu dalam kehidupan objeknya. Sementara itu, Irawan (2010) mengidentifikasi ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut. 1. Permasalahan bersifat sempit, spesifik, 2. Variabel dan indikator bersifat spesifik dan operasional (terukur), 3. Kerangka teori dibuat untuk membatasi ruang lingkup penelitian, 4. Kesimpulan merupakan inferensi dari sampel ke populasi, 5. Prosedur penelitian baku dan terstandar, 6. Metode pengumpulan data bersifat objektif dan non personal, 7. Laporan tentang fakta dan tanpa bias.

Fokus dari penelitian ini yaitu berbagai kendala yang dihadapi maupun bagaimana kondisi pengembangan wilayah di Kota Tual setelah pemekaran serta apa saja bentuk intervensi kebijakan pengembangan wilayah yang diambil Pemerintah Daerah Kota Tual dalam mengatasi berbagai kendala tersebut. Adapun rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus menurut Ardianto (2010) yaitu suatu pendekatan penulisan yang menelaah suatu kasus secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Studi kasus merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam yang didasarkan atas ketertarikan pada ciri-ciri khusus fenomena tersebut yang tidak dimiliki fenomena lain (Irawan, 2010). Pembatasan kurun waktu terjadinya suatu kasus menjadi penting



dalam studi kasus. Hal ini diungkapkan oleh Silalahi (2010) bahwa setiap peneliti dalam studi kasus harus menjelaskan secara mendalam banyak ciri dari sedikit kasus melalui satu durasi waktu. Peneliti biasanya memunculkan studi kasus didasarkan atas keinginan untuk memecahkan masalah tertentu selain itu lebih memberikan kemungkinan kepada peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam mengenai aspek-aspek dasar tentang perilaku manusia disebabkan sifat penyelidikannya yang mendalam, totalitas, intensif dan utuh (Idrus, 2009).

Selanjutnya Idrus (2009) membagi studi kasus menjadi tiga tipe sebagai berikut.

**1. Studi Kasus Intrinsik**

Adapun yang dimaksud dengan studi kasus intrinsik adalah studi kasus yang menekankan pada pemahaman (*verstehen*) yang mendalam terhadap kasus tunggal yang disebabkan kasus tersebut menarik. Tujuan desain ini tidak dimaksudkan untuk memahami konstruk abstrak atau fenomena umum yang diharapkan dapat dilakukan generalisasi, melainkan lebih ditekankan pada kepentingan intrinsik, dan menghilangkan generalisasi, serta tidak dimaksudkan untuk membentuk teori baru.

**2. Studi Kasus Instrumental**

Desain studi kasus ini secara spesifik berseberangan dengan studi kasus intrinsik. Studi kasus instrumental justru menekankan pada kasus tunggal yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menguraikan secara detail sehingga dapat membentuk suatu konstruk ataupun memperbaiki teori.

**3. Studi Kasus Kolektif**

Desain studi kasus ini sama dengan studi kasus instrumental. Perbedaannya ialah bahwa studi kasus kolektif lebih tertarik mempelajari kasus secara bersamaan, agar dapat meneliti fenomena, populasi, atau kondisi umum. Dengan begitu, studi kasus desain kolektif itu tidak hanya mempelajari satu kasus tertentu saja, tetapi beberapa kasus (hal. 58)

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian studi kasus instrumental yang menekankan pada kasus tunggal yakni kasus pengembangan wilayah di Kota

Tual. Peneliti secara seksama meneliti, mendeskripsikan atau menguraikan secara detail kondisi pengembangan wilayah Kota Tual setelah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara serta kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah selama kurun waktu tahun 2009-2012.

Penelitian ini juga tidak dibatasi untuk subkasus pengembangan wilayah tertentu sebagaimana lazimnya penggunaan desain studi kasus yang menghendaki adanya pembatasan pada tema-tema spesifik jika yang diteliti berupa populasi atau fenomena umum. Pengembangan wilayah merupakan fenomena umum karena menyangkut berbagai aspek didalamnya, namun dalam konteks Kota Tual sebagai daerah otonom baru, yang dituntut untuk dapat mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tual sebagai upaya mengatasi kesenjangan yang terjadi sebelum adanya pemekaran maka kebijakan terhadap pengembangan keseluruhan wilayah yang ada di Kota Tual menjadi penting untuk diteliti secara mendalam.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Tual. Alasan pemilihan lokasi ini karena Kota Tual merupakan daerah otonom baru yang dimekarkan pada tahun 2007 namun pembangunan berlangsung pesat dan merata di seluruh wilayah Kota Tual sebagai faktor pendorong upaya peningkatan pelayanan kepada publik di Kota Tual.

## **B. Subyek Penelitian/Narasumber/Informan**

Kasus pengembangan wilayah pada daerah otonom baru merupakan permasalahan yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya peningkatan pelayanan,



menempatkan penduduk di suatu wilayah sebagai mitra, hubungan yang lebih komunikatif, serta partisipasi dan kolaborasi yang baik antarpemangku kepentingan. Studi kasus berupaya melakukan penyelidikan secara lebih mendalam, totalitas, intensif, dan utuh terhadap pengembangan wilayah Kota Tual. Studi kasus fokus pada hubungan antar aspek pengembangan wilayah Kota Tual dan proses pengembangan wilayah tersebut meliputi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengembangan wilayah Kota Tual dan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah setelah dimekarkan menjadi daerah otonom baru atau selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

Sederhana ataupun kompleksnya satu kasus lebih banyak bergantung pada kemampuan peneliti untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang penting tentang hal yang diteliti. Informasi-informasi penting ini hanya dapat diperoleh melalui informan yang memahami tentang persoalan penelitian dan terlibat dalam persoalan penelitian tersebut, sehingga dibutuhkan kemampuan peneliti dalam menetapkan subyek penelitian/narasumber/informan yang tepat.

Informan penelitian dijelaskan sebagai seseorang yang karena memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut (Amirin, 1986). Pemilihan informan dalam penelitian ini selain didasarkan pada keterlibatan informan sebagai pelaku pengembangan wilayah, juga dipandang sebagai pihak yang paling mengetahui tentang kendala pengembangan wilayah di Kota Tual. Adapun informan yang telah dipilih sebanyak 30 orang, namun yang berhasil diwawancarai sebanyak 28 orang yang terinci sebagai berikut.

1. Unsur Pemerintahan Daerah Kota Tual sebanyak 18 orang yang terdiri dari:
  - a. Unsur Pemerintah Daerah sebanyak 16 orang yakni:
    - 1) Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual.
    - 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual.
    - 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.
    - 4) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual.
    - 5) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual.
    - 6) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual
    - 7) Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual
    - 8) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual.
    - 9) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual.
    - 10) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual.
    - 11) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual.
    - 12) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual.
    - 13) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual.
    - 14) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual
    - 15) Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual.
    - 16) Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual.
  - b. Unsur DPRD Kota Tual sebanyak 2 orang.
2. Unsur masyarakat sebanyak 5 orang.
3. Unsur pelaku usaha/pemilik modal sebanyak 5 orang.



### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting karena perolehan suatu data atau informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian tergantung pada pemilihan instrumen penelitian yang tepat. Instrumen penelitian merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan mendalami masalah penelitian.

Menurut Arikunto (2000), instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mempermudah mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi sistematis. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009).

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. ***Pedoman Wawancara;***

Pedoman wawancara merupakan instrumen pengumpul data yang berbentuk daftar pertanyaan dengan mengacu pada teori-teori sebagaimana tertuang dalam tinjauan pustaka. Daftar pertanyaan ini dijadikan sebagai pedoman bagi peneliti untuk mendapatkan data dan informasi tentang kendala-kendala pengembangan wilayah di Kota Tual dan kebijakan pengembangan wilayah yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 (Lampiran 3). Wawancara dilakukan secara

langsung oleh peneliti terhadap setiap informan agar dapat digali informasi secara komprehensif sebagaimana diharapkan peneliti dengan mengacu pada pedoman wawancara yang tersedia.

## 2. *Pedoman Observasi;*

Pedoman observasi merupakan instrumen pengumpul data yang berbentuk daftar pengamatan terhadap berbagai aspek kaitannya dengan permasalahan penelitian meliputi aspek pembangunan fisik di Kota Tual setelah pemekaran daerah atau sejak terbentuknya Kota Tual sebagai daerah otonom baru dengan indikator pengamatan berupa ketersediaan infrastruktur dasar pada setiap kecamatan seperti transportasi baik berupa jalan dan jembatan maupun moda transportasi, jaringan komunikasi, sanitasi, jaringan air bersih, dan jaringan listrik, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga diamati aspek pembangunan spasial dengan indikator pengamatan berupa penetapan wilayah berdasarkan kekhasan suatu wilayah dalam aktivitas sosial maupun ekonomi (Lampiran 5). Melalui pedoman observasi yang tersedia, peneliti selanjutnya menuju lokasi penelitian untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat kondisi yang ada sesuai keadaan sebenarnya. Observasi dilakukan pada tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2013 di Kecamatan Tayando Tam, tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2013 di Kecamatan Dullah Utara, tanggal 10 sampai dengan 14 Juli 2013 di Kecamatan Pulau-Pulau Kur, dan tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2013 di Kecamatan Dullah Selatan.

## **D. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan bagian penting yang menentukan kualitas penelitian. Kesimpulan penelitian memerlukan



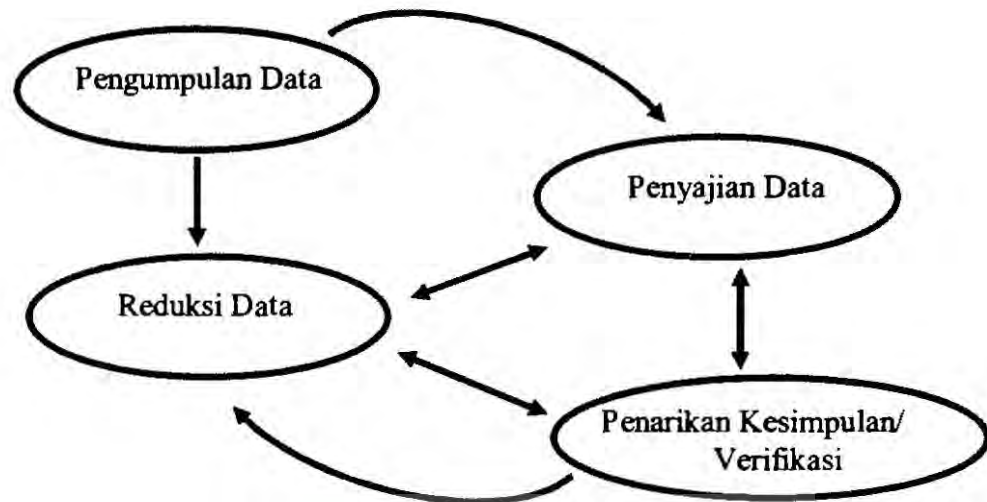
serangkaian data yang mendukung. Hal ini tentu saja membutuhkan sebuah proses pengumpulan data dari informan yang tepat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sejak tanggal 5 Juni sampai dengan 16 Juli 2013.

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, harus melalui beberapa tahapan atau prosedur yang setiap tahapan tersebut saling terkait. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi subjek penelitian dan lokasi penelitian sebagai sumber data.
2. Mengurus perizinan di Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual.
3. Menentukan jenis data yang akan dicari.
4. Mengembangkan instrumen penelitian baik pedoman wawancara maupun pedoman observasi guna mendapatkan data dalam menjawab permasalahan penelitian.

#### **E. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009) terdiri dari tiga hal utama, yaitu: 1. reduksi data; 2. penyajian data; 3. penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.



**Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif**

*Reduksi Data*, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

*Penyajian Data*, Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai



sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

*Menarik Kesimpulan/Verifikasi*, Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang

yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.

Kaitannya dengan penelitian ini maka langkah-langkah analisis yang dilakukan secara konkrit dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Reduksi data;

Alur pertama kegiatan analisis pada penelitian ini yaitu reduksi data. Peneliti memilih beberapa data dari sejumlah data yang terkumpul selama proses pengumpulan data berlangsung. Data yang terpilih atau menjadi pusat perhatian peneliti didasarkan atas penilaian bahwa data dimaksud memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan pengembangan wilayah di Kota Tual



selama kurun waktu 2009-2012 dan kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah selama kurun waktu 2009-2012 tersebut.

## 2. Penyajian data;

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah penyajian data. Penyajian data diupayakan untuk menghasilkan suatu analisis kualitatif yang valid dan mengarahkan pada pengambilan kesimpulan penelitian yang tepat. Penyajian data dimaksud dalam penelitian ini meliputi berbagai pendapat informan baik dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha maupun masyarakat yang diperoleh dari pelaksanaan wawancara, hasil observasi terhadap pembangunan fisik dan aspek pembangunan spasial pada empat kecamatan di wilayah Kota Tual serta juga didukung dengan berbagai jenis grafik, tabel dan bagan.

## 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi;

Kegiatan analisis ketiga dari penelitian ini yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan didasarkan pada data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut agar teruji kebenaran datanya serta dapat digunakan untuk kepentingan akademis maupun praktis.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Tual

##### 1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kota Tual terletak antara  $5^{\circ}$  sampai  $6,5^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $131^{\circ}$  sampai  $133,5^{\circ}$  Bujur Timur. Secara geografis, Kota Tual dibatasi antara lain oleh Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil di sebelah selatan, Laut Banda di sebelah utara, Selat Nerong Kabupaten Maluku Tenggara di sebelah timur, dan Laut Banda di sebelah barat (sumber data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012).

##### 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Tual  $\pm 19.088,29 \text{ Km}^2$  dengan luas daratan  $\pm 352,29 \text{ Km}^2$  atau 1,34% dan luas perairannya  $\pm 18.736 \text{ Km}^2$  atau 98,66%. Kota Tual terdiri dari 66 (enam puluh enam) pulau dan meliputi 3 (tiga) gugusan pulau yaitu: gugus pulau-pulau Kur, gugus pulau Tayando Tam, dan gugus pulau Dullah (sumber data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012).

##### 3. Kondisi Pemerintahan

###### a. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Kur Selatan di Kota Tual, wilayah administrasi Kota Tual mengalami perubahan Kecamatan dan Kelurahan yang terbagi menjadi 5 Kecamatan, 26 Desa, 3 Kelurahan, dan 11 Dusun dengan rincian sebagaimana Tabel 4.1 berikut.



**Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan dan Dusun di Kota Tual Tahun 2012**

Kec. Pulau Dullah Utara	Kec. Pulau Dullah Selatan	Kec. Tayando Tam	Kec. P.p Kur	Kec. Kur Selatan
<i>Ibu Kota : Namser</i>	<i>Ibu Kota : Wearhir</i>	<i>Ibukota : Tayando Yamtel</i>	<i>Ibu Kota : Tubyal</i>	<i>Ibu Kota : Warkar</i>
1. Desa Fiditan 2. Desa Ohoitel 3. Desa Dullah Laut 4. Desa Dullah 5. Desa Ngadi 6. Desa Lebetawi 7. Desa Tamedan 8. Desa Ohoitahit 9. Dusun Watran 10. Dusun Lairkamor 11. Ohoitel Relokasi	1. Desa Tual 2. Desa Taar 3. Kel. Lodar El 4. Kel. Ketsoblak 5. Kel. Masrum 6. Dusun P. Ut 7. Dusun Mangon 8. Dusun Fair 9. Dusun Dumar	1. Desa Tamgurhir 2. Desa Tayando Yamtel 3. Desa Tayando Yamru 4. Desa Tayando Langgiar 5. Desa Tayando Ohoitel 6. Dusun Tam Ohoitom	1. Desa Kamear 2. Desa Lokwirin 3. Desa Finualen 4. Desa Tubyal 5. Desa Sermaf	1. Desa Kanara 2. Desa Warkar 3. Desa Yapas 4. Desa Rumoin 5. Desa Hirit 6. Desa Mangur Niela 7. Desa Mangur Tiflen 8. Dusun Fitarlor 9. Dusun Pasir Panjang 10. Dusun Fadol

Sumber Data: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) Kota Tual Tahun 2013

#### b. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Tual per 30 Desember 2011 sejumlah 1.925 orang, berdasarkan golongan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 berikut.

**Tabel 4.2 Jumlah PNS berdasarkan Golongan di Kota Tual Tahun 2012**

Golongan	PNS (Orang)
I	8
II	657
III	926
IV	334
<b>Jumlah</b>	<b>1.925</b>

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tual Tahun 2012

**Tabel 4.3 Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Tual Tahun 2012**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>PNS (Orang)</b>
SD	0
SLTP	5
SLTA	256
D1	61
D2	190
D3	185
D-IV	5
S-1	1.182
S-2	35
S-3	6
<b>Jumlah</b>	<b>1.925</b>

Sumber Data: Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Jarak pusat pertumbuhan dan pemerintahan dengan wilayah lainnya dalam suatu pemerintahan menjadi fokus perhatian guna menjawab permasalahan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat setempat. Hal ini dimaklumi karena terkadang masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota pemerintahan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sulit mengakses pelayanan yang ada. Adapun jarak Kota Tual dengan ibukota provinsi serta ibukota kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.



**Tabel 4.4 Jarak Kota Tual dengan Ibukota Provinsi serta Ibukota Kecamatan**

Nama Kota	Jarak	
	Km	Mil Laut
Tual - Ambon	550,45	297,22
Tubyal	87,59	47,30
Yamtel	45,42	24,53
Dullah Darat	9,09	4,91

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

#### 4. Kondisi Demografis

Masyarakat atau penduduk memegang peran penting dalam pengembangan wilayah. Masyarakat merupakan pelaku pengembangan wilayah bersama-sama dengan pemerintah dan pelaku usaha (pihak swasta). Peran serta masyarakat dapat berupa gagasan, tenaga dan materi bahkan sebagai pengawas jalannya proses pengembangan wilayah.

Kota Tual sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara mengalami perkembangan pesat dalam penyebaran penduduk sejak tahun 2000. Jumlah penduduk Kota Tual berdasarkan hasil sensus penduduk 2000 sebanyak 38.194 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 108 orang per km<sup>2</sup>. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,3%. Tahun 2010 jumlah penduduk meningkat mencapai 58.082 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 164 orang per km<sup>2</sup> (Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012).

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kota Tual tahun 2011 meningkat menjadi 59.690 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 169 orang per km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 29.339 jiwa dan perempuan 30.351 jiwa yang tersebar pada empat kecamatan yakni Kecamatan Pulau-pulau Kur, Kecamatan Tayando Tam, Kecamatan Dullah Utara, dan

Kecamatan Dullah Selatan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Dullah Selatan yakni sebanyak 34.091 jiwa dan terkecil terdapat pada Kecamatan Pulau-pulau Kur yakni sebanyak 5.032 jiwa.

Jumlah penduduk pada tahun 2012 sesuai data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual sebanyak 61.503 jiwa. Adapun jumlah penduduk Kota Tual menurut jenis kelamin dan kecamatan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

**Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kota Tual menurut Jenis kelamin dan Kecamatan Tahun 2010-2011**

No.	Kecamatan	2010			2011		
		L	P	J	L	P	J
1.	P. P. Kur	2.366	2.529	4.895	2.410	2.622	5.032
2.	Tayando Tam	2.643	2.805	5.448	2.692	2.908	5.600
3.	Dullah Utara	7.199	7.365	14.564	7.333	7.635	14.968
4.	Dullah Selatan	16.595	16.580	33.175	16.904	17.187	34.091
<b>Jumlah</b>		<b>28.803</b>	<b>29.279</b>	<b>58.082</b>	<b>29.339</b>	<b>30.351</b>	<b>59.690</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Dullah Selatan. Hal ini disebabkan Kecamatan Dullah Selatan merupakan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Selain itu pada kecamatan ini juga terdapat pelabuhan laut yang melayani pelayaran dari Jawa, Sulawesi melalui Ambon serta pelabuhan peti kemas.

##### **5. Kondisi Lahan dan Produksi tiap Kecamatan di Kota Tual**

Berbagai cara yang dapat diterapkan dalam pengembangan wilayah sebagai upaya harmonisasi perkembangan suatu wilayah, diantaranya melalui pengembangan sektoral. Upaya pengembangan sektoral dimaksud mengacu pada sektor-sektor pembangunan daerah yang diyakini mampu menunjang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan kondisi potensi di semua wilayah kecamatan menunjukkan adanya peluang-peluang untuk pengembangan sektor potensial, diantaranya kondisi lahan dan produksi tiap kecamatan di Kota Tual. Adapun kondisi lahan dan produksi tiap kecamatan di Kota Tual tahun 2011 seperti pada Tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6 Kondisi Lahan dan Produksi tiap Kecamatan di Kota Tual Tahun 2011**

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan (Ha)		Jumlah Produksi (Ha/Ekor/Ton)		
				Pertanian	Lahan lain yang diusahakan	Tanaman Pangan	Ternak dan Unggas	Ikan Laut
1.	P.P. Kur	55,22	5.032	2.458	1.148	247,8 Ton	5.117 Ekor	2.207,8 Ton & Nilai Produksi Rp. 12.139.050.000
2.	Tayando Tam	69,07	5.600	4.919	633	218,1 Ton	25.898 Ekor	2.907,8 Ton & Nilai Produksi Rp. 14.539.112.000
3.	Dullah Utara	70,85	14.967	1.025	1.362,6	1.221,4 Ton	2.555 Ekor	3.082,6 Ton & Nilai Produksi Rp. 16.958.150.000
4.	Dullah Selatan	51,99	34.092	880	1.670	512,08 Ton	6.283 Ekor	17.278,2 Ton & Nilai Produksi Rp. 95.027.350.000
Jumlah		247,13	59.691	9.282	4.813,6	2.199,38 Ton	39.853 Ekor	

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Kehutanan & Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual (diolah)

Kecamatan Dullah Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak (57,11%) dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Dullah Utara memiliki luas wilayah yang paling banyak berproduktif dari luas lahan pertanian (11,04%) dan luas lahan lain yang diusahakan (28,31%).

Kecamatan Tayando Tam yang memiliki luas wilayah terluas kedua dan jumlah penduduk yang sedikit, akan tetapi luas wilayah tersebut sangat sedikit lahan yang produktif dalam pertanian dan lahan lain yang diusahakan. Kondisi

wilayah Tayando Tam berupa dataran yang terletak pada ketinggian 0-84 meter di atas permukaan laut.

## **B. Pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru**

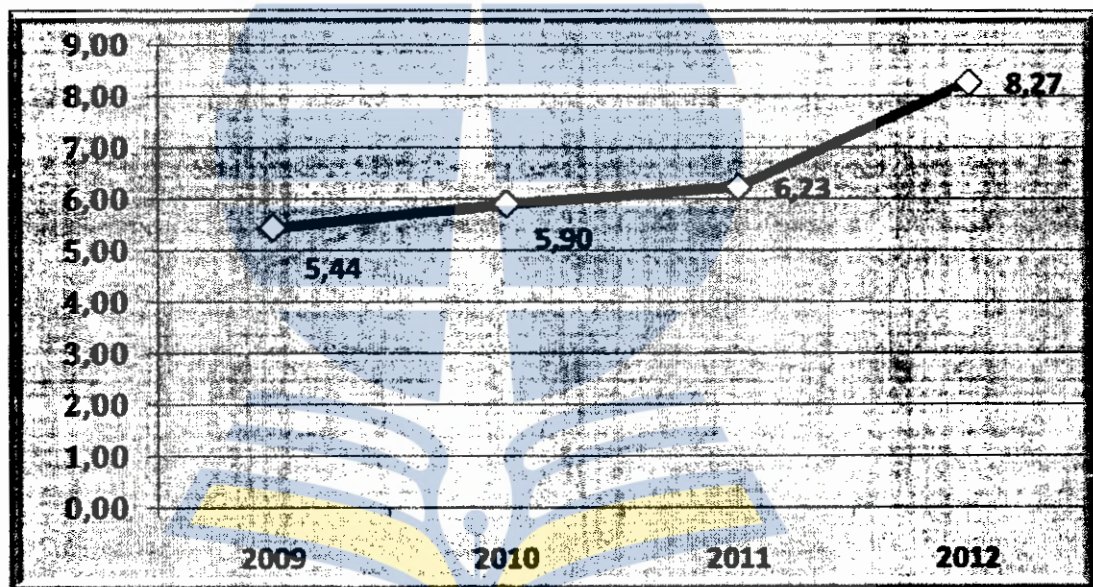
Gambaran kondisi pengembangan wilayah Kota Tual setelah pemekaran dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari tahun 2009-2012 dan kontribusi masing-masing sektor dalam menunjang pembangunan ekonomi di Kota Tual. Selain itu analisis juga dilakukan terhadap peran pemerintah daerah Kota Tual, pelaku usaha (swasta), dan masyarakat dalam pengembangan wilayah.

Perkembangan ekonomi makro di Kota Tual sampai dengan tahun 2012 secara umum menunjukkan kecenderungan positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktifitas perekonomian yang semakin maju dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktifitas perekonomian di Kota Tual yang demikian secara langsung berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat Kota Tual yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto Kota Tual.

PDRB Kota Tual menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 tercatat sebesar 392.890,19 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan Tahun 2011 yang tercatat sebesar 329.084,20 juta rupiah maka terdapat kenaikan sebesar 63.805,99 juta rupiah atau 19,39 %. PDRB Kota Tual Tahun 2012 atas dasar Harga Konstan 2000 tercatat sebesar 170.742,08 juta rupiah, sedangkan tahun 2011 tercatat sebesar 157.693,47 juta rupiah atau naik sebesar 8,27 % dari keadaan perekonomian tahun 2011.



Selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, perekonomian Kota Tual dapat dikatakan berkembang cukup pesat. Kondisi ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012. Selama periode tersebut, Kota Tual mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,46% per tahun. Laju pertumbuhan PDRB Kota Tual tahun 2012 atas dasar harga konstan 2000 adalah sebesar 8,27%, mengalami percepatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011 sebesar 6,23% dan tahun 2010 sebesar 5,90%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual selama tahun 2009-2012 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



**Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tual (%) Tahun 2009-2012**

Agregasi dari laju pertumbuhan ekonomi tiap-tiap sektor menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual Tahun 2012 yang sebesar 8,27% tersebut, memiliki pertumbuhan sektoral dengan kisaran antara 2,98-9,94% dan secara rata-rata laju pertumbuhannya cukup stabil.

Kisaran pertumbuhan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang pertumbuhannya lambat meskipun secara agregat pertumbuhan ekonominya relatif stabil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun 2009-2012**

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	3,53	6,30	6,72	8,24
2.	Pertambangan & Penggalian	6,48	11,97	8,41	9,11
3.	Industri Pengolahan	6,19	2,61	8,82	9,03
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	1,71	5,37	5,74	6,11
5.	Bangunan	7,97	39,94	7,57	7,52
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,96	5,47	6,13	9,94
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,11	3,94	4,04	5,22
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,30	2,02	2,70	2,98
9.	Jasa – jasa	7,14	4,47	6,32	6,67
<b>Total</b>		<b>5,44</b>	<b>5,90</b>	<b>6,23</b>	<b>8,27</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat secara signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,94%, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Tual didorong oleh pertumbuhan sektor Perdagangan. Hal ini dikarenakan kontribusi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor ini sebesar 36,51%, yang berarti bahwa kenaikan sebesar 9,94% secara riil menambah nilai PDRB Konstan secara signifikan (Rp. 5.635,19 juta). Peningkatan sektor perdagangan ini diantaranya didorong oleh upaya Pemerintah Daerah Kota Tual melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkoordinasi terus menerus dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan yang secara bersama-sama telah menetapkan pelabuhan Tual sebagai pelabuhan transmiter untuk wilayah selatan



Kisaran pertumbuhan yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang tumbuh cukup pesat sementara ada sektor lain yang pertumbuhannya lambat meskipun secara agregat pertumbuhan ekonominya relatif stabil. Secara rinci pertumbuhan ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun 2009-2012**

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
1.	Pertanian	3,53	6,30	6,72	8,24
2.	Pertambangan & Penggalian	6,48	11,97	8,41	9,11
3.	Industri Pengolahan	6,19	2,61	8,82	9,03
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	1,71	5,37	5,74	6,11
5.	Bangunan	7,97	39,94	7,57	7,52
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	6,96	5,47	6,13	9,94
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	3,11	3,94	4,04	5,22
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,30	2,02	2,70	2,98
9.	Jasa – jasa	7,14	4,47	6,32	6,67
<b>Total</b>		<b>5,44</b>	<b>5,90</b>	<b>6,23</b>	<b>8,27</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat secara signifikan pada tahun 2012 sebesar 9,94%, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Tual didorong oleh pertumbuhan sektor Perdagangan. Hal ini dikarenakan kontribusi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor ini sebesar 36,51%, yang berarti bahwa kenaikan sebesar 9,94% secara riil menambah nilai PDRB Konstan secara signifikan (Rp. 5.635,19 juta). Peningkatan sektor perdagangan ini diantaranya didorong oleh upaya Pemerintah Daerah Kota Tual melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkoordinasi terus menerus dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan yang secara bersama-sama telah menetapkan pelabuhan Tual sebagai pelabuhan transmiter untuk wilayah selatan

Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual ini melayani melayani rute pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti kemas. Selain itu, guna menjangkau wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam dalam upaya pendistribusian hasil alam masyarakat ke Kota Tual, maka melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan pada tahun 2012 telah tersedia tiga unit kapal ferry dengan frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-Kur pulang pergi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut.

“Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan RI dan outputnya telah ditetapkannya Pelabuhan Tual sebagai Pelabuhan Transmitter untuk wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual ini melayani rute pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti kemas. Tentunya hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan di Kota Tual. Kami yakin bahwa dengan tersedianya pelabuhan ini semakin menjadikan Kota Tual sebagai wilayah strategis perdagangan khususnya di wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. Pengadaan tiga unit kapal ferry dengan frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-Kur pulang pergi, hasil koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan RI juga merupakan upaya positif dinas kami yang pada kenyataannya telah mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam juga sangat membantu masyarakat setempat dalam upaya pendistribusian hasil alamnya ke Kota Tual”.

Hasil observasi penelitian pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2013 juga menggambarkan aktifitas pelabuhan Tual yang melayani pelayaran kapal Pelni dari Jawa-Sulawesi-Ambon-Tual-Papua dan Papua Barat serta aktifitas bongkar muat barang. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual dalam pengembangan sektor perdagangan di Kota Tual nampak melalui hasil



wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual pada tanggal 18 Juni 2013 sebagai berikut.

“Guna mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau kemampuan mengakses pasar untuk lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum di Kota Tual yang juga merupakan *leading sector* dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013, maka upaya yang telah kami lakukan diantaranya melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam rangka penyediaan sarana prasarana transportasi untuk memperlancar akses perdagangan hasil alam masyarakat khususnya yang berdomisili di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju pasar Masrum dan pasar Lodar El di pusat Kota Tual serta pembangunan beberapa pasar diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El sumber dana APBD Kota Tual serta pasar tradisional dengan sumber dana Kementerian Perdagangan RI, yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tual. Selain itu untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum dilakukan penyederhanaan proses pendirian usaha perdagangan, pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka pengembangan sektor perdagangan di Kota Tual juga sangat ditentukan oleh peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual melalui upaya pembangunan beberapa pasar diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tual, penyederhanaan proses pendirian usaha perdagangan, dan pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen serta koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam rangka memperlancar akses perdagangan hasil alam masyarakat khususnya yang berdomisili di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju pasar Masrum dan pasar Lodar El di pusat Kota Tual.

Pertumbuhan sektor-sektor primer dan sekunder pada tahun 2012 cukup stabil, jika dibandingkan dengan tahun 2011 dan cenderung mengalami percepatan. Pertumbuhan sektor-sektor tersier mengalami kenaikan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran meningkat 3,81%, sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat sebesar 1,18%, sektor keuangan, persewaaan dan jasa perusahaan 0,28% dan sektor jasa-jasa 0,35% dari tahun 2011. Namun demikian sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan kehutanan peningkatannya tidak signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa Kota Tual memiliki lahan perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang luas dan memungkinkan pengembangannya. Selain itu sub sektor tanaman perkebunan, peternakan, dan kehutanan secara nyata berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual jika dikelola dengan baik.

Kontribusi sektor industri pengolahan meningkat tajam 6,42% dari tahun 2010 sebesar 2,61% menjadi 9,03% di tahun 2012. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual diketahui bahwa peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan bagi perekonomian daerah Kota Tual karena telah ditetapkannya zona atau kawasan pengembangan industri di Kota Tual oleh Pemerintah Kota Tual serta secara bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian telah menetapkan Kompetensi Inti Industri Daerah dalam hal ini pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan juga penetapan Kota Tual sebagai pusat pengembangan inovasi rumput laut Maluku. Selain itu, pembangunan *cold storage* dan depo rumput laut di Desa Labetawi Kecamatan Dullah Utara dan pengembangan ruang lingkup usaha Perusahaan Pengalengan Ikan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Dullah

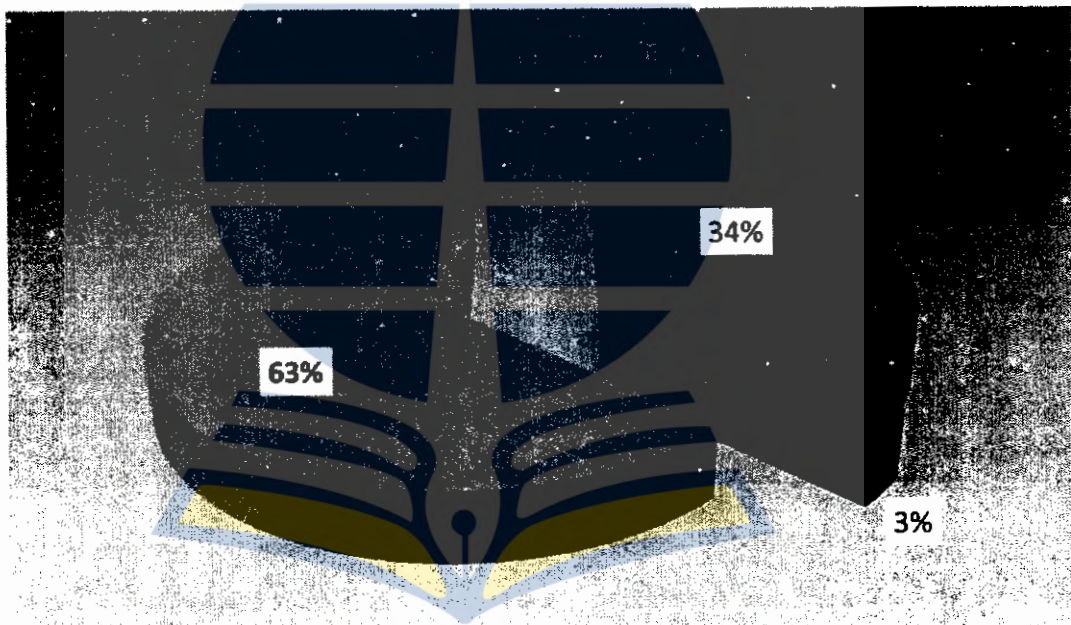


Utara dengan pasar ekspor sampai ke luar negeri dan telah mampu memperkerjakan banyak karyawan, dipandang merupakan upaya positif pengembangan wilayah Kota Tual dari sektor industri pengolahan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual.

“Perkembangan industri di Kota Tual khususnya sektor industri pengolahan yang terus meningkat dan tentunya memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah Kota Tual lebih dikarenakan adanya upaya Pemerintah Kota Tual melalui penetapan zona atau kawasan pengembangan industri dan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian telah menetapkan Kompetensi Inti Industri Daerah dengan lingkup pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan serta ditetapkannya Kota Tual sebagai pusat pengembangan inovasi rumput laut Maluku. Selain itu guna lebih mendukung perkembangan sektor industri pengolahan khususnya pengolahan rumput laut hasil panen masyarakat, maka kami juga telah membangun *cold storage* dan depo rumput laut di Desa Labetawi Kecamatan Dullah Utara. Pembangunan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang terwujud melalui kesediaan membebaskan lahannya bagi pembangunan dimaksud. Pengembangan industri pengolahan juga tidak terlepas dari dukungan pihak swasta melalui pengembangan ruang lingkup usaha Perusahaan Pengalengan Ikan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara dengan pasar ekspor sampai ke luar negeri. Perusahaan ini juga telah mampu memperkerjakan banyak karyawan. Kami memandang ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara kami selaku unsur pemerintah daerah, pelaku usaha atau pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan wilayah Kota Tual saat ini dan seterusnya”.

Hasil observasi pada tanggal 6 sampai dengan 9 Juli 2013 di Kecamatan Dullah Utara didapatkan gambaran adanya *cold storage* dan depo rumput laut di Desa Labetawi yang saat itu masih terus dilakukan penyempurnaan pembangunan fisiknya. Pelaksanaan observasi di seluruh kecamatan juga mendapatkan gambaran hampir seluruh perairan di Kota Tual diadakan kegiatan budidaya rumput laut. Khusus di perairan Kecamatan Dullah Utara, kegiatan budidaya rumput laut tersebar di seluruh desa yang ada.

Struktur ekonomi Kota Tual yang ditunjukkan oleh distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2012 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perekonomian Kota Tual secara garis besar merupakan perekonomian yang berbasiskan pada sektor-sektor jasa (sektor tersier), yang memberikan kontribusi sebesar 63,29% (Rp. 248.642,87 juta), dengan ditumpu oleh sektor primer sebesar 34,04% (Rp. 133.728,98 juta), sementara kontribusi sektor sekunder hanya sebesar 2,68% (Rp. 10.518,34 juta). Distribusi PDRB Kota Tual menurut sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.



**Gambar 4.2 Distribusi PDRB Kota Tual Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012.**

Peranan sektor dan sub sektor ekonomi sangat mempengaruhi karakteristik ekonomi suatu daerah. Hal tersebut terkait dengan potensi masing-masing sektor atau sub sektor dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan atau



pertumbuhan ekonomi daerah dimana beberapa sektor atau sub sektor memiliki potensi pertumbuhan tinggi, dan sebaliknya.

Selama tahun 2009 sampai 2012 telah terjadi pergeseran kontribusi dalam pembentukan nilai tambah barang dan jasa, dimana sektor jasa sangat mendominasi perekonomian di Kota Tual. Berdasarkan klasifikasi sembilan sektor ekonomi secara sektoral, sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah ini dengan sub sektor andalannya yakni perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2012 kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 39,71% dengan kontribusi terbesar dari sub sektor perdagangan besar dan eceran yakni 39,53%. Sektor pertanian mempunyai kontribusi sebesar 33,56% dan didominasi oleh sub sektor perikanan sebesar 22,22%.

Penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dan tersedianya masterplan pengembangan kawasan minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah Kota Tual, merupakan penyebab utama meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan bagi perekonomian Kota Tual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual dalam petikan hasil wawancara berikut.

“Guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota Tual dan mewujudkan peningkatan kontribusi sub sektor ini bagi perekonomian Kota Tual, maka kami telah membuat Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah

Kota Tual. Selain itu penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan juga merupakan penunjang percepatan perkembangan sektor perikanan di Kota Tual. Dalam perkembangannya, sub sektor perikanan di Kota Tual mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2012, produksi ikan laut di Kecamatan Pulau-pulau Kur sebesar 2.207,8 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 12.139.050.000, Kecamatan Tayando Tam sebesar 2.907,8 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 14.539.112.000, Kecamatan Dullah Utara sebesar 3.082,6 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 16.958.150.000, dan Kecamatan Dullah Selatan sebesar 17.278,2 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 95.027.350.000. Upaya lain yang telah kami lakukan dalam mendongkrak sub sektor perikanan di Kota Tual yaitu terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan masyarakat setempat dan peningkatan ekspor. Disamping itu, diarahkan juga untuk pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari andil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menempatkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual. Aktifitas pada PPN ini sangat mendukung laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari sub sektor perikanan” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, tanggal 17 Juni 2013).

Adapun penyebab lain meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan bagi perekonomian Kota Tual berdasarkan hasil wawancara di atas yaitu adanya upaya Pemerintah Kota Tual untuk terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan masyarakat setempat, peningkatan ekspor, pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual juga menjadi daya dorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari sub sektor perikanan.

Khusus sektor pertambangan dan penggalian memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di tahun



2012 mengalami peningkatan menjadi 9,11%, walaupun laju pertumbuhannya masih di bawah sektor perdagangan dan sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan yakni sebesar 0,7%. Peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bagi perekonomian Kota Tual menurut Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual disebabkan oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha yang memanfaatkan pasir (bahan galian C) bagi kegiatan pembangunan. Selain itu adanya upaya pemerintah daerah melalui Kantor Lingkungan Hidup dengan diterbitkan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan, sebagai bentuk kepedulian pemerintah bagi kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tual.

Hal ini dilakukan karena pada bulan Maret sampai dengan Juni 2012 telah terjadi perusakan lingkungan pantai oleh sekelompok masyarakat dengan kegiatan pengambilan pasir dan tanah putih (Bahan Galian C) untuk kepentingan pribadi. Pengembangan wilayah sangat tergantung dari ketersediaan lingkungan yang lestari. Upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan telah dikeluarkan Perda Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain dalam Wilayah Kota Tual. Hawear atau Nama Lain sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umum peraturan daerah tersebut dimaksudkan sebagai tanda larangan adat yang membatasi eksploitasi dan pengrusakan ekosistem lingkungan serta bertujuan memberikan kepastian hak atas tanah ulayat, tanah marga serta tanah perorangan bagi masyarakat adat setempat.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual tanggal 22 Juni 2013.

“Mengingat usaha pertambangan dan penggalian sangat berhubungan erat dengan lingkungan maka upaya yang telah dilakukan dimaksudkan selain

untuk mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari juga agar dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan daerah. Perlu diinformasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bagi perekonomian Kota Tual disebabkan oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha (kontraktor) yang memanfaatkan pasir dan tanah putih (bahan galian C) bagi kegiatan pembangunan. Upaya pemanfaatan pasir dan tanah putih ini, dalam prakteknya dibingkai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan dan Perda Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain dalam Wilayah Kota Tual. Mengingat pengembangan wilayah juga sangat bertumpu pada ketersediaan lingkungan yang lestari maka Pemerintah Daerah Kota Tual telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan lingkungan setiap tahun berjalan pada wilayah Kota Tual.
2. Pengadaan serta penanaman bibit pohon pada wilayah-wilayah sumber air di wilayah Kota Tual.
3. Konservasi sumberdaya alam dengan melibatkan para pelaku usaha maupun masyarakat setiap tahun.
4. Peningkatan peran dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup”.

Sektor listrik, gas, dan air bersih mengalami perlambatan. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, hal ini terjadi karena belum semua desa dan rumah tangga di Kota Tual terlayani listrik PLN, begitupun dengan pelayanan air bersih PDAM yang hanya menjangkau desa-desa tertentu saja. Desa-desa dimaksud letaknya berdekatan dengan pusat perekonomian. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual.

“Kita ketahui bersama bahwa pengembangan wilayah Kota Tual berlangsung pesat selama kurun waktu tahun 2009-2012. Berbagai sektor maupun sub sektor turut berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan wilayah Kota Tual ini. Namun diakui bahwa ada beberapa sub sektor yang mengalami perlambatan dalam laju pertumbuhan ekonominya diantaranya sub sektor tanaman pangan, peternakan, kehutanan serta sub sektor listrik dan air bersih. Perlambatan sub sektor listrik dan air bersih karena belum semua desa dan rumah tangga di Kota Tual terlayani listrik PLN, begitupun dengan pelayanan air bersih PDAM yang baru menjangkau desa-desa tertentu saja yang letaknya berdekatan dengan pusat perekonomian” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, tanggal 6 Juni 2013).

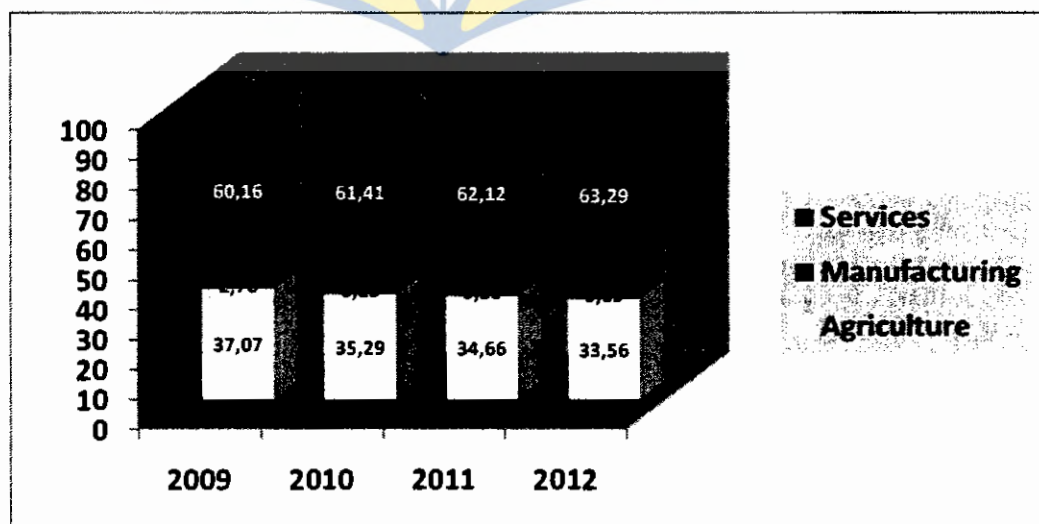


Kontribusi lainnya sebesar 18,27% diperoleh dari sektor jasa-jasa dan 16,64% diantaranya berasal dari sub sektor pemerintahan umum. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan memberikan kontribusi sebesar 2,89% serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 2,42%. Sedangkan sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi sebesar 3,16%. Struktur ekonomi sektoral Kota Tual dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan Gambar 4.3 berikut.

**Tabel 4.8 Struktur Ekonomi Sektoral Kota Tual Tahun 2009-2012**

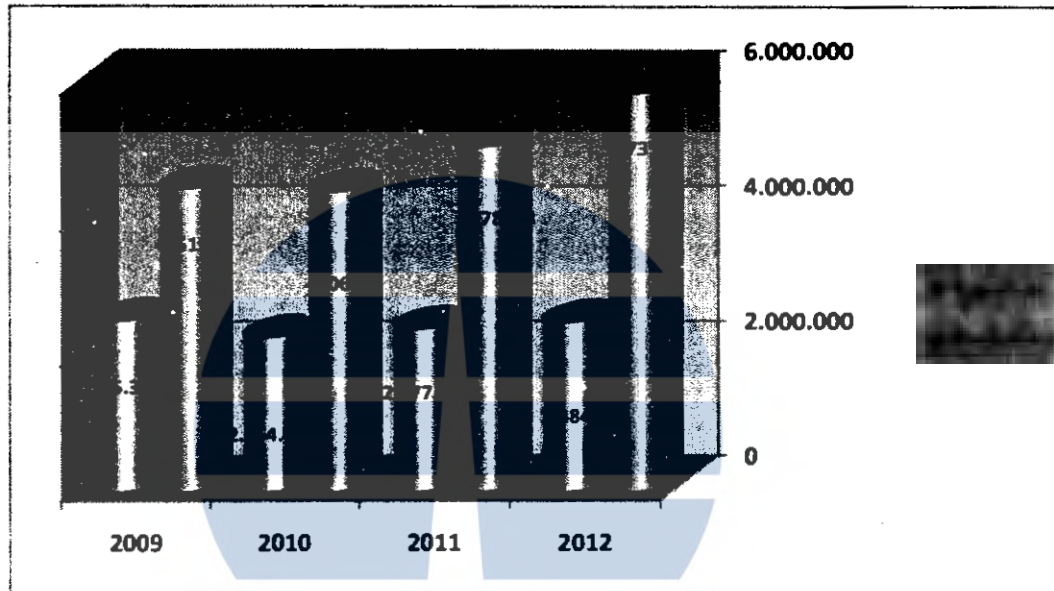
No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012
<b>Sektor Agriculture (Pertanian)</b>					
1.	Pertanian	37,07	35,29	34,66	33,56
<b>Sektor Manufacturing (Produksi)</b>					
2.	Pertambangan & Penggalian	0,46	0,48	0,48	0,48
3.	Industri Pengolahan	0,21	0,21	0,21	0,21
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	0,72	0,70	0,64	0,59
5.	Bangunan	1,37	1,90	1,88	1,87
<b>Sektor Services (Jasa)</b>					
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	38,60	39,46	38,64	39,71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,29	2,34	2,61	2,42
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,43	3,27	3,07	2,89
9.	Jasa – jasa	15,84	16,34	17,80	18,27
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data: BPS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012



**Gambar 4.3 Struktur Ekonomi Kota Tual Tahun 2009-2012.**

Keberhasilan pembangunan Kota Tual tidak cukup hanya memperhatikan perkembangan PDRB secara total, tetapi juga dilihat perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Tingkat pendapatan perkapita Kota Tual tahun 2009-2012 dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.



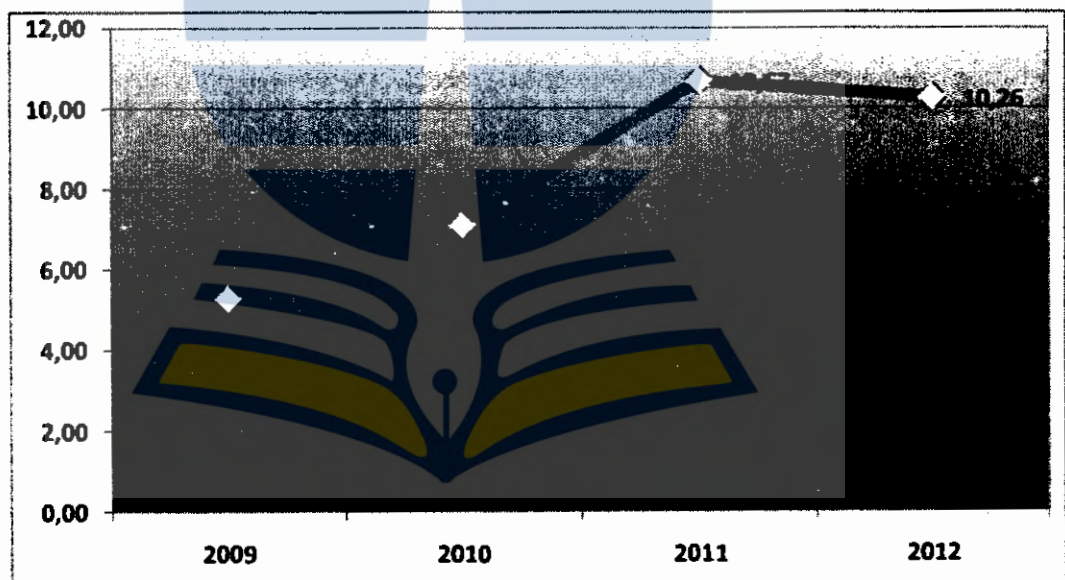
**Gambar 4.4 Tingkat Pendapatan Perkapita Kota Tual (Rp) Tahun 2009-2012.**

Tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tual terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Sesuai data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara, Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual Tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 4.081.545,10 dan tahun 2009 sebesar Rp. 4.419.130,88 atau naik 8,27%. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 4.836.308 atau naik 9,44% dari tahun 2009. Tahun 2011 dan 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2010 meningkat sebesar Rp. 5.299.998 dan Rp. 5.873.517 atau naik 9,59% dan 10,82%. Sedangkan Pendapatan Regional



Perkapita riil tanpa dipengaruhi kenaikan harga barang dan jasa dapat diketahui dari Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 yang pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.484.792 atau naik 4,49% dibandingkan tahun 2011.

Indeks Harga Implisit PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi suatu daerah/region pada suatu periode tertentu. Indeks Harga Implisit Kota Tual pada tahun 2012 sebesar 230,11% dan tahun 2011 sebesar 208,69%. Berdasarkan angka indeks implisit tersebut dapat dihitung laju inflasi harga produsen barang dan jasa di Kota Tual yaitu sebesar 10,67% pada tahun 2011 dan 10,26% pada tahun 2012 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.



**Gambar 4.5 Laju Inflasi Harga Produsen Barang dan Jasa Kota Tual Tahun 2009-2012.**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Juni 2013, menjelaskan bahwa peningkatan kontribusi setiap sektor di atas terhadap perekonomian Kota Tual sangat

ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual. Kondisi ketersediaan infrastruktur dasar yang lengkap di Kota Tual juga telah menjadi pertimbangan ditambahkannya Kota Tual sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Maluku pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pendapat ini didukung juga oleh penjelasan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual yang menjelaskan bahwa percepatan pengembangan wilayah Kota Tual yang terjadi sejak tahun 2009-2012, didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai. Kendala keterbatasan anggaran dalam pengembangan infrastruktur pengembangan wilayah disiasati dengan cara menghitung atau menentukan dengan baik dan cermat volume maupun rencana anggaran dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan tahunan berdasarkan rencana yang telah dibuat.

Selain itu diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang dipandang atau diperkirakan dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun keterbatasan infrastruktur disiasati keberadaannya melalui koordinasi dan sinkronisasi secara rutin dengan berbagai SKPD terkait agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD. Infrastruktur yang merupakan kewenangan SKPD tertentu, pembangunan fisiknya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum namun didukung dengan dana bersama SKPD terkait tersebut.

Hasil observasi pada semua kecamatan dalam wilayah Kota Tual juga menggambarkan kelengkapan infrastruktur dasar dimaksud. Bahkan pada



kecamatan yang sebelum pemekaran terisolir yakni Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam tingkat pengembangan infrastruktur dasar seperti infrastruktur transportasi baik berupa jalan, jembatan maupun alat transportasi laut serta komunikasi mengalami perkembangan yang pesat.

Pengembangan wilayah yang terjadi begitu pesat di Kota Tual juga ditentukan oleh dukungan peran masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan serta peran pelaku usaha selaku pemilik modal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah Kota Tual. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, diperoleh informasi bahwa partisipasi dan kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat dan pelaku usaha selama ini menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah Kota Tual. Berikut kutipan hasil wawancara Kepala Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual.

“Peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual sangat besar. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang serasi, selaras, dan seimbang, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan keberdayaan. Secara nyata, peran masyarakat ini ditunjukkan berupa penyediaan SDM baik berupa tenaga terdidik dan terlatih, penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, maupun sebagai pengawas jalannya program dan kegiatan setiap SKPD, sedangkan peran pelaku usaha/pemilik modal di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya berupa pemasok jasa, keahlian, dana maupun material yang diperlukan dalam pengembangan wilayah” (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013).

“Kontribusi masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat dipungkiri sebagai daya dorong pengembangan wilayah di Kota Tual selama ini. Kontribusi masyarakat yang paling menonjol bagi pengembangan wilayah di Kota Tual yaitu kerelaan dalam membebaskan lahan yang dimilikinya untuk pembangunan berbagai infrastruktur penunjang pembangunan, sedangkan

peran pelaku usaha di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya berupa pendistribusian tenaga-tenaga kerja yang trampil serta dana yang memadai bagi suatu kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual, tanggal 6 Juni 2013).

Pemerintah Daerah Kota Tual meyakini bahwa hanya dengan penciptaan pola kemitraan yang saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah itu sendiri, maka keberhasilan pengembangan wilayah dapat terwujud dan memberikan manfaat dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah daerah Kota Tual dinilai telah memainkan peran strategis bagi keberhasilan pengembangan wilayah Kota Tual. Selama kurun waktu tahun 2009-2012 berbagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam pengembangan wilayah Kota Tual dirancang dan dilaksanakan oleh, serta ditujukan bagi kepentingan-kepentingan bersama para pelaku-pelakunya baik pemerintah daerah Kota Tual, masyarakat, dan pelaku usaha/pemilik modal. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beberapa tokoh masyarakat dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Sebelumnya kami atas nama masyarakat Desa Tamngurhir ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tual yang selama ini telah memperhatikan kami dan mengangkat kehidupan ekonomi kami menjadi lebih baik. Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual bagi peningkatan kesejahteraan kami. Wujud nyatanya berupa pembangunan sarana prasarana baik jalan yang menghubungkan kami dengan beberapa desa lain yang ada di Kecamatan Tayando Tam, penyediaan kapal feri sehingga kami dapat menjangkau Kota Tual dan memasarkan hasil alam kami, pembangunan beberapa sekolah dasar serta sarana prasarana kesehatan puskesmas, dan masih banyak bantuan lainnya yang kami peroleh dari beberapa SKPD Kota



Tual. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD, secara umum kami nilai telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat kami. Guna mendukung pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual maka upaya yang kami lakukan yaitu melalui penyediaan lahan bagi pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur serta penyediaan tenaga kerja bagi kegiatan pembangunan atau proyek yang dilaksanakan di wilayah kami” (Hasil wawancara dengan Bapak Djamaludin Rahareng selaku tokoh masyarakat Desa Tamngurhir Kecamatan Tayando Tam, tanggal 30 Juni 2013).

“Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami rasakan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa kami. Wujud nyata pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur penunjang seperti infrastruktur pendidikan berupa pembangunan beberapa sekolah dasar, infrastruktur kesehatan, penyediaan tenaga pendidik dan kesehatan yang memadai, jalan, jaringan komunikasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Tual, telah sesuai dengan aspirasi masyarakat kami yang kami sampaikan pada saat Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual. Adapun yang kami lakukan guna mendukung pengembangan wilayah meliputi penyediaan lahan bagi proyek pembangunan fisik serta berpartisipasi sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber daya manusia setempat dalam berupa tenaga kerja siap pakai dalam pelaksanaan proyek pembangunan ” (Hasil wawancara dengan Bapak Ismail Renhoat selaku tokoh masyarakat Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam, tanggal 30 Juni 2013).

“Kesejahteraan masyarakat setempat meningkat sejak pemekaran Kota Tual terjadi. Kondisi berbeda kami rasakan sebelum pemekaran atau ketika kami masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Berbagai bentuk nyata pengembangan wilayah dalam yang dirasakan mampu mengangkat kesejahteraan kami terasa nyata melalui berbagai bantuan yang masuk ke desa kami seperti diantaranya bantuan dari dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Selain itu melalui program dan kegiatan dinas pendidikan, dinas kesehatan serta dinas PU (Pekerjaan Umum) juga telah terbangun beberapa sarana dan prasarana yang sangat menunjang kegiatan kami sehari-hari. Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Tual, kami rasakan sudah sangat sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan tentunya telah sesuai dengan apa yang kami pada saat Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual. Dukungan kami terhadap pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual berupa penyediaan tenaga kerja secara sukarela dari masyarakat bagi pelaksanaan proyek pembangunan atau kegiatan dari masing-masing SKPD Kota Tual” (Hasil

wawancara dengan Ibu Umi Fadirubun selaku tokoh masyarakat Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara, tanggal 8 Juli 2013).

“Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami rasakan telah banyak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Konkrit pembangunan yang terjadi seperti pembangunan jalan lingkar yang telah mampu membuka keterisolasian desa ini dengan desa-desa lainnya seperti Desa Lokwirin, Desa Tubyal, Desa Sermaf serta Desa Finualen. Pembangunan lainnya seperti pembangunan sekolah dan rehab sekolah, penyediaan layanan kesehatan dan yang tak kalah pentingnya desa ini sebagaimana desa-desa yang disebutkan tadi dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Pulau-pulau Kur ini telah terjangkau kapal fery. Komunikasi juga bukan lagi menjadi masalah bagi kami saat ini karena pelayanan paket komunikasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual telah menyediakannya bagi kami sehingga informasi menjadi cepat kami terima. Pelayanan listrik PLN diakui belum menjangkau desa kami tapi melalui pelayanan PLTS pemerintah daerah hal ini sudah bukan merupakan kendala bagi kami. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tual sudah sangat sesuai dengan kehendak atau aspirasi kami. Jalur Musrenbang pada setiap tingkatan baik desa, kecamatan, dan Kota Tual merupakan jalur utama didalam menyampaikan aspirasi dan peran serta masyarakat kami didalam penentuan perencanaan pembangunan. Wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual berupa perencanaan kegiatan desa melalui jalur musrenbang, penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sekolah, pembangunan poskesdes, serta penyediaan tenaga pendidik sukarela di sekolah-sekolah” (Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud Rahanyamtel selaku tokoh masyarakat Desa Kamear Kecamatan Pulau-pulau Kur, tanggal 11 Juli 2013).

“Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa masyarakat di desa kami telah beranjak menuju kondisi sejahtera tersebut yang nyata dari peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Kondisi tersebut disadari sebagai kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Program maupun kegiatan sebagai upaya percepatan pengembangan wilayah Kota Tual selama ini kami pandang telah memenuhi aspirasi kami atau sesuai dengan apa yang kami butuh dan perlukan di desa ini. Kami selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya melalui mekanisme musrenbang desa, musrenbang kecamatan juga musrenbang Kota Tual, walaupun banyak juga dari usulan kami tidak diakomodir namun kami pahami bahwa pemerintah daerah punya perhitungan tersendiri yang pada dasarnya berupa masalah keterbatasan anggaran pembangunan. Terhadap upaya positif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah Kota Tual



maka bentuk partisipasi kami dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual tersebut yaitu melalui pembebasan sejumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, peran serta dalam pengelolaan prasarana yang terbangun, penyediaan tenaga kerja bagi pelaksanaan proyek pembangunan, serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang berlangsung di desa kami” (Hasil wawancara dengan Bapak Kasim Rahawarin selaku tokoh masyarakat Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan, tanggal 11 Juli 2013).

Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan wilayah bertugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, koordinasi maupun administrasi seluruh program dan kegiatan di dalam proses pengembangan wilayah sebagai bagian dari tugas-tugasnya di dalam pengaturan wilayah sebagai administrator wilayah. Selain itu Pemerintah Daerah Kota Tual juga telah berupaya menciptakan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang serta menyediakan kemudahan-kemudahan seperti pemberian pinjaman, pembukaan lahan usaha yang dapat memberikan keuntungan dari usaha dimaksud serta fasilitas lainnya bagi pelaku usaha/pemilik modal termasuk melakukan berbagai pembinaan. Beberapa pelaku usaha mengutarakan kondisi tersebut dalam hasil wawancara sebagai berikut.

“Tidak dapat disangkal bahwa peran pemerintah daerah Kota Tual begitu besar bagi pengembangan wilayah di Kota Tual. Melalui kemitraan yang terbangun selama kurun waktu tahun 2009-2012, pemerintah daerah telah menempatkan kami pelaku usaha sebagai mitra sejajar yang dinilai dapat berkontribusi besar bagi upaya pengembangan wilayah yang diselenggarakan di Kota Tual. Berbagai keuntungan telah kami peroleh melalui kemitraan ini. Penciptaan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang serta penyediaan berbagai kemudahan seperti pemberian pinjaman, pembukaan lahan usaha yang dapat memberikan keuntungan dari usaha dimaksud serta fasilitas lainnya bagi kami termasuk melakukan berbagai pembinaan merupakan bentuk keuntungan yang kami peroleh dari pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan ini. Peran kami selaku pelaku usaha/pemilik modal di Kota Tual dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual berupa penyedia dana dan tenaga kerja trampil dan terdidik yang diperlukan dalam pengembangan wilayah”

(Hasil wawancara dengan Bapak Jhon Fadirubun selaku pelaku usaha, tanggal 26 Juni 2013).

“Kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah Kota Tual telah berlangsung dengan baik selama ini. Melalui pola kemitraan mutualistik yang didasarkan atas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemerintah daerah Kota Tual banyak hal yang telah kami terima seperti penciptaan kondisi yang aman dan kondusif dari pemerintah daerah Kota Tual kepada perusahaan kami untuk melakukan aktifitas juga penyederhanaan berbagai regulasi daerah yang menguntungkan bagi pengembangan usaha yang kami jalankan. Dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual, upaya yang telah kami lakukan meliputi pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaha kecil menengah, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat, serta perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami yang telah diberikan ruang selama ini untuk berusaha” (Hasil wawancara dengan Bapak Honganda Lestari selaku pelaku usaha, tanggal 26 Juni 2013).

“Pemerintah Daerah Kota Tual tetap berkomitmen untuk menerapkan strategi pembangunan yang selain *pro poor* juga pro bisnis. Untuk itu strategi kebijakan pembangunan yang disusun telah benar-benar memberikan peluang bagi kami selaku pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Peran kami sebagai pelaku usaha dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual diantaranya melalui pengalokasian dana bagi pembangunan infrastruktur dasar” (Hasil wawancara dengan Bapak Wan Hamud selaku pelaku usaha, tanggal 27 Juni 2013).

“Fasilitasi pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan yang dibangun bersama dengan kami berupa fasilitasi dana, jaminan regulasi untuk kepastian usaha yang kami jalankan serta penyediaan informasi peluang investasi di daerah. Sebagai pelaku usaha tentu ada tanggung jawab moral untuk mengembangkan Kota Tual melalui pembangunan. Bentuk peran kami meliputi penyediaan dana sharing bagi pelaksanaan pembangunan dan penyiapan alat serta tenaga ahli maupun tenaga terampil” (Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Pace selaku pelaku usaha, tanggal 27 Juni 2013).

“Pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini dalam bentuk konsultasi bersama rencana sebuah kebijakan yang akan diambil. Kami juga dibuka peluang yang luas dalam memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan tersebut. Mediasi pemerintah daerah Kota Tual terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara kami dengan masyarakat menjadi sebuah produk kemitraan yang positif selama ini karena menentukan masa depan usaha yang kami tanam saat ini dan seterusnya di Kota Tual. Peran kami sebagai pemilik modal sudah tentu sebagai penyedia dana bagi pengembangan wilayah di Kota



Tual. Dana yang ada merupakan modal bagi pengembangan wilayah yang dipergunakan dalam wujud pembangunan infrastruktur. Kami menyadari ini merupakan upaya kami dalam mensiasati keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah. Lewat dana bersama ini kami yakin mampu mempercepat rencana pengembangan wilayah yang telah ada. Selain itu kami juga mengalokasikan sejumlah tenaga ahli dan siap pakai dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai klasifikasi pekerjaan yang dilaksanakan. Tenaga kerja ahli dan siap pakai ini berupa konsultan maupun tenaga yang mampu mengaplikasikan alat-alat yang ada yang digunakan dalam kegiatan proyek yang sedang berlangsung” (Hasil wawancara dengan Bapak Opick selaku pelaku usaha, tanggal 28 Juni 2013).

### **C. Intervensi Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tual selama Kurun Waktu Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, maka diketahui keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 tidak terlepas dari adanya intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual. Hasil analisis terhadap wawancara dan observasi penelitian didapatkan tiga pendekatan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kota Tual yakni: 1. Kebijakan pengelolaan anggaran, 2. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia, dan 3. Kebijakan pengembangan data dan informasi. Kebijakan yang diambil pada dasarnya ditujukan untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan data dan informasi yang lazimnya dihadapi oleh setiap daerah otonom baru di Indonesia.

Menurut keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual bahwa sejak awal pemekaran Kota Tual menjadi daerah otonom baru hingga saat ini Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan

urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi demikian, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual diperlukan adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran yang ada dalam bentuk memprioritaskan pengalokasian anggaran yang tersedia dengan presentase yang besar bagi program dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dibangun juga kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak swasta selaku pemilik modal. Hal ini sebagaimana terungkap pada hasil wawancara berikut.

“Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tual termasuk upaya pengembangan wilayah mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tual. Kondisi ini dialami oleh Kota Tual sejak awal pemekaran hingga saat ini. Kondisi ini pula yang menunjukkan langsung bahwa Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi demikian, diperlukan adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran yang ada. Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengembangan wilayah yaitu memprioritaskan pengalokasian anggaran yang tersedia dengan presentase yang besar bagi program dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kami juga menciptakan kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak swasta selaku pemilik modal” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, tanggal 7 Juni 2013).

Upaya ini juga didukung oleh DPRD Kota Tual dengan fungsi anggarannya yang diwujudkan dengan membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Melalui fungsi ini, DPRD memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai lebih



diutamakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Tual, yakni tercapainya keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan belanja pemerintahan dan pembangunan secara bertahap dari pemerintah pusat dengan tetap memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi belanja publik. Secara jelasnya dapat dilihat pada wawancara berikut.

“Anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan wilayah Kota Tual diakui masih sangat terbatas. Struktur APBD Kota Tual sejak tahun 2009-2012 masih menggambarkan tingkat ketergantungan Kota Tual terhadap pembiayaan pemerintah pusat yang tinggi. Guna mengatasi hal ini dan dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual, maka melalui fungsi anggaran yang melekat pada lembaga kami, bentuk dukungan pengelolaan anggaran kami lakukan dengan memastikan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai lebih diutamakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Kota Tual, yakni tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta mengurangi tingkat ketergantungan pembiayaan belanja pemerintahan dan pembangunan secara bertahap dari pemerintah pusat dengan tetap memprioritaskan alokasi anggaran yang lebih besar bagi belanja publik” (Hasil wawancara dengan Fadillah Rahawarin selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual, tanggal 21 Juni 2013).

“Menurut pendapat saya, kurang lebih 4 tahun masa pengabdian kami sebagai Ketua DPRD Kota Tual, DPRD Kota Tual sudah cukup pro aktif dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran, pengawasan, maupun legislasi yang kami nilai sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya. Perlu diakui bersama bahwa daerah ini (Kota Tual) masih rendah pendapatan asli daerahnya sehingga masih tinggi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kami terus berupaya mendorong optimalisasi peran pemerintah daerah Kota Tual dalam mengatasi berbagai masalah terkait anggaran. Secara teknis, penyusunan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual, namun tetap digodok dan dibahas melalui Badan Anggaran DPRD Kota Tual, setelah itu dibawa pada tingkat paripurna untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Kota Tual setiap tahunnya dengan mendasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai catatan penting bagi pemerintah daerah Kota Tual seperti pentingnya fokus pada program dan kegiatan yang pro rakyat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Tual, adanya transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran bagi pelaksanaan program dan

kegiatan oleh masing-masing SKPD serta perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten bagi peningkatan pendapatan asli daerah” (Penggalian hasil wawancara dengan R. M. Waremra, S.AP selaku Ketua DPRD Kota Tual, tanggal 22 Juni 2013).

Adapun kondisi sumber daya manusia maupun data dan informasi pada awal terbentuknya daerah otonom baru Kota Tual, menurut Kepala Bappeda, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah masih sangat terbatas. Sumber daya manusia aparatur maupun masyarakat dalam menunjang pengembangan wilayah Kota Tual sangat tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Sedangkan data dan informasi sangat terbatas bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual.

Pada tahun 2008 dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah Kota Tual khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan. Hal ini menjadi kendala utama dan menjadi dasar perlu adanya kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual (Ringkasan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013).

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Tual Tahun 2012 dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui arah dan fokus ketiga kebijakan dimaksud serta dampak dari implementasi kebijakan yang ditimbulkan, yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. Kebijakan pengelolaan anggaran**

Kebijakan pengelolaan anggaran dilakukan melalui:

##### **a. Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009-2012**



Melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual diketahui bahwa upaya menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.

“Dalam rangka menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Usaha-usaha penggalan pendapatan daerah ditujukan untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program-program pengembangan wilayah yang telah direncanakan. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Secara umum, upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Tual selama ini (2009-2012) yaitu mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD. Adapun intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah dilakukan melalui: 1) penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah, 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, 3) peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, 4) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, 5) peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, 6) pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah secara on-line, dan 7) optimalisasi penagihan piutang pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui: 1) pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah, 2) pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus, 3) pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target group baru, 4) Peningkatan bagi hasil pajak, dan 5) penggalan potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan” (Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual, tanggal 8 Juni 2013).

Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah, sesuai hasil wawancara di atas ditujukan untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program-program pengembangan wilayah yang telah direncanakan. Guna mewujudkan ketersediaan modal tersebut maka ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan.

Adapun upaya intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa;
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah;
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- 6) Pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah secara on-line;
- 7) Optimalisasi penagihan piutang pajak.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui:

- 1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;



- 2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
- 3) Pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target group baru;
- 4) Peningkatan bagi hasil pajak;
- 5) Penggalian potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Serangkaian tindakan yang telah dilakukan tersebut telah mampu mewujudkan peningkatan pendapatan daerah Kota Tual. Secara totalitas target dan realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2009-2012 menunjukkan adanya pelampauan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari Tabel 4.9 berikut.

**Tabel 4.9 Realisasi Total Pendapatan Daerah Kota Tual Periode TA 2009 sampai dengan TA 2012 (dalam ribuan rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1.	2009	137.951.394.943,00	134.919.337.500,74	97,80	(3.032.057.442,26)
2.	2010	306.446.916.408.00	310.680.614.909.42	101,38	4.233.698.501,42
3.	2011	310.145.975.509.58	313.429.681.130.02	101,06	3.283.705.620,44
4.	2012	284.730.967.555,00	287.598.077.142,60	101,01	2.867.109.587,60
	<b>Jumlah</b>	<b>1.039.275.254.415,58</b>	<b>1.046.627.710.682,78</b>	<b>100,71</b>	<b>7.352.456.267,20</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Realisasi Pendapatan Daerah periode 2009-2012, menurut sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut.

**Tabel 4.10 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Tual 2009-2012 menurut Sumber Pendapatan (dalam ribuan rupiah)**

No.	Sumber Pendapatan	Rencana	Realisasi	%	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1.	Pendapatan Asli Daerah	19.710.720.855,58	24.286.830.052,18	123,22	4.576.109.196,60
2.	Dana Perimbangan	866.599.963.407,00	868.735.431.207,00	100,25	2.135.467.800,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	142.558.390.066,00	141.007.301.158,01	98,91	(1.551.088.907,99)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.028.869.074.328,58</b>	<b>1.034.029.562.417,19</b>	<b>100,50</b>	<b>5.160.488.088,61</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Dari Tabel 4.10 diatas terlihat bahwa pendapatan daerah terbesar tahun 2009-2012 yaitu Dana Perimbangan sebesar Rp.868.735.431.207,00. Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada Daerah untuk pendanaan penyelenggaraan desentralisasi. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan (celah fiskal) penyelenggaraan otonomi daerah Kota Tual terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Realisasi Dana Perimbangan Kota Tual tahun 2009-2012, dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut :

**Tabel 4.11 Realisasi Dana Perimbangan Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	2009	111.949.048.815,00	109.867.017.482,00	98,14	(2.082.031.333,00)
2	2010	231.446.415.308,00	232.414.630.539,00	100,42	968.215.231,00
3	2011	262.057.943.354,00	264.382.968.885,00	100,89	2.325.025.531,00
4	2012	261.146.555.930,00	262.070.814.301,00	100,35	924.258.371,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>866.599.963.407,00</b>	<b>868.735.431.207,00</b>	<b>100,25</b>	<b>2.135.467.800,00</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas nampak realisasi Dana Perimbangan tahun 2009 menurut sumber penerimaannya sebesar Rp. 109.867.017.482,00



(9,14%), dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi Rp.262.070.814.301,00 (100,35%). Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak 2009-2012, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.12 berikut.

**Tabel 4.12 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah/ Berkurang
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	2009	890.477.584,00	533.644.708,00	59,93	(356.832.876,00)
2	2010	890.477.584,00	534.077.559,00	59,98	(356.400.025,00)
3	2011	779.821.808,00	840.942.323,00	107,84	61.120.515,00
4	2012	779.821.808,00	1.525.403.435,00	195,61	745.581.627,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.340.598.784,00</b>	<b>2.593.125.702,00</b>	<b>77,62</b>	<b>388.748.751,00</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak tahun 2009 menurut sumber penerimaannya sebesar Rp. 533.644.708,00 (59,93%), dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi Rp.1.525.403.435,00 (195,61%).

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU 2009-2012 dan DAK 2009-2012 dapat dilihat pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14 berikut.

**Tabel 4.13 Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	2009	55.066.597.000,00	55.066.597.000,00	100	0,00
2	2010	181.704.979.000,00	181.704.979.000,00	100	-
3	2011	196.885.900.000,00	196.698.784.000,00	99,90	(187.116.000,00)
4	2012	217.665.886.000,00	217.665.886.000,00	100	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>651.323.362.000,00</b>	<b>651.136.246.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>(187.116.000,00)</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

**Tabel 4.14 Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Tual Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah)**

No.	Tahun Anggaran	Rencana	Realisasi	(%)	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6
1	2009	41.866.000.000,00	41.866.000.000,00	100	0,00
2	2010	33.948.700.000,00	33.948.700.000,00	100	-
3	2011	53.698.200.000,00	53.693.400.000,00	99,99	(4.800.000,00)
4	2012	26.954.970.000,00	26.954.970.000,00	100	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>156.467.870.000,00</b>	<b>156.463.070.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>(4.800.000,00)</b>

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

b. Pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2012

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, diperoleh informasi bahwa dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual, kebijakan pengelolaan Belanja Daerah diarahkan pada pengalokasian belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur. Prioritas pengalokasian anggaran ditujukan bagi pelaksanaan program dan kegiatan setiap SKPD yang berorientasi pada kepentingan publik yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual.



“Kaitannya dengan pengembangan wilayah Kota Tual, maka sebagai upaya mengakselerasi dan mensinergikan pengembangan wilayah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, kami mengambil kebijakan berupa pemberian porsi anggaran yang besar bagi program dan kegiatan belanja publik setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fokusnya ada pada pengelolaan belanja karena akar permasalahan ada pada kebijakan belanja daerah dimana persentase belanja publik lebih kecil dibanding belanja aparatur. Terhadap masalah tersebut segala dana yang ada baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, maupun APBN, oleh kami diperuntukkan bagi sebesar-besarnya pelayanan publik. Hal ini dapat kami tunjukkan bahwa setiap tahun (2009-2012) anggaran belanja pembangunan publik mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibanding belanja aparatur/pegawai. Belanja perjalanan dinas pegawai terus kami tekan dan dilaksanakan jika benar-benar dibutuhkan saja dan bentuk belanja aparatur lainnya kami perlakukan yang sama (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual, tanggal 7 Juni 2013)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Kepala SKPD, diketahui kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan serta untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Selain itu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang penciptaan daya saing. Kebijakan pengelolaan anggaran belanja daerah dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual juga diarahkan pada pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pelayanan

masyarakat, peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik serta pemulihan sistem transportasi yang handal dalam menunjang pengembangan wilayah terutama di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangka peningkatan aksesibilitas. Secara lengkap hasil analisis terhadap kebijakan pengelolaan belanja daerah bagi pengembangan wilayah Kota Tual selama tahun 2009-2012 dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

- a) Pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan serta untuk mengurangi beban hidup masyarakat;

Guna meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kota Tual telah meluncurkan program unggulan dan inovatif yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) Kota Tual (Maren artinya gotong royong, semangat kerjasama dalam bahasa lokal/bahasa Kei). PPMM menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2013, merupakan pemberdayaan lokal berbasis APBD yang dialokasikan ke lima kecamatan dengan total pagu 2,8 Milyar pada tahun 2012 dan 4 Milyar pada tahun 2013. Melalui PPMM dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap



identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PPMM dimulai dengan Penyusunan Program Pembangunan Kelurahan/Desa Berjangka (PPKB) sebagai dasar pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa guna meningkatkan pengembangan infrastruktur dan suprastruktur, sosial, ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh wilayah masing-masing. Cakupan pelaksanaan PPMM telah menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum atau kurang tersentuh oleh program-program lain menyangkut pemberdayaan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PPMM akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2016. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta percepatan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millennium (*MDGs*). Pelaksanaan PPMM yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Kota Tual

mewujudkan peningkatan IPM serta pencapaian target-target MDGs tersebut. Selain itu upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran juga didukung dengan berbagai program dan kegiatan dari beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak, serta Kantor Ketahanan Pangan. Adapun program dan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 7. Secara lengkap wawancara dengan dengan beberapa Kepala SKPD tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4. Alokasi dana APBD terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Tual sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Alokasi dana APBD terhadap penanggulangan kemiskinan selama tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut.



**Tabel 4.15 Alokasi Dana APBD terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tual selama Tahun 2010-2012**

Tahun	APBD Total (Rp)	APBD Kemiskinan (Rp)	Keterangan
2010	273.708.669.408	71.630.492.900	
2011	355.225.831.099	73.019.352.561	Sampai dengan bulan September
2012	364.301.307.491	75.296.193.236	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual

Angka kemiskinan di Kota Tual sejak tahun 2009-2012 sesuai data dari Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Tual terus mengalami penurunan. Pada tahun 2009 angka kemiskinan sebesar 6.164 KK (30,42%), tahun 2010 sebesar 6.117 KK (32,03%), tahun 2011 sebesar 4.865 KK (28,65%), dan tahun 2012 sebesar 4.735 KK (26,50%). Angka kesempatan kerja sebagai indikator jumlah angkatan kerja yang terserap oleh pasar kerja di Kota Tual terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009, kesempatan kerja di Kota Tual mencapai 84,59 persen, artinya terdapat 84,59 persen dari angkatan kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja di Kota Tual. Tahun 2010 kesempatan kerja di Kota Tual mencapai 85,63 persen, dan pada tahun 2011 meningkat mencapai 91,03 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tual terus mengalami penurunan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. tingkat pengangguran terbuka di Kota Tual tahun 2009 mencapai 15,41 persen, tahun 2010 mencapai 14,37 persen, dan tahun 2011 mencapai 8,97 persen.

- b) Perbaiki struktur perekonomian yang dapat menunjang penciptaan daya saing;

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat selain melalui pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, peningkatan pendapatan serta untuk mengurangi beban hidup masyarakat, juga melalui perbaikan struktur perekonomian yang dapat menunjang penciptaan daya saing. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor unggulan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan visi pembangunan daerah seperti sektor pertanian terutama sub sektor perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor jasa diantaranya sub sektor pariwisata. Terhadap pengembangan sektor pertanian telah dialokasikan anggaran sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 16.425.727.162. Capaian kinerja sektor pertanian selama tahun 2009-2012 dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Luas Panen Produksi Tanaman Padi dan Palawija (Ha):

(a) Padi Ladang tahun 2009 seluas 4 Ha dan tahun 2010 seluas 5 Ha.

(b) Jagung tahun 2009 seluas 31 Ha, tahun 2010 99, tahun 2011 seluas 100 Ha dan tahun 2012 seluas 158 Ha.



(c) Ketela Pohon tahun 2009 seluas 297 Ha, tahun 2010 seluas 596,4 Ha, tahun 2011 seluas 358 Ha.

(d) Ketela Rambat tahun 2009 seluas 12 Ha, tahun 2010 seluas 80,69 Ha, dan tahun 2011 seluas 332 Ha dan tahun 2012 seluas 514 Ha.

**(2) Luas Panen Produksi Tanaman Hortikultura (Ha):**

(a) Sayuran tahun 2011 seluas 61,90 Ha, dan tahun 2012 seluas 111 Ha.

(b) Buah-buahan tahun 2011 seluas 228 Ha, dan tahun 2012 seluas 47,48 Ha.

**(3) Produksi Tanaman Padi dan Palawija (Ton):**

(a) Padi Ladang tahun 2009 berjumlah 52 ton, dan tahun 2010 berjumlah 12 ton.

(b) Jagung tahun 2009 berjumlah 62 ton, tahun 2010 berjumlah 267,3 ton, tahun 2011 berjumlah 252,2 ton, dan tahun 2012 berjumlah 234,62 ton.

(c) Ketela pohon tahun 2009 berjumlah 4.460 ton, tahun 2010 5.429,82, tahun 2011, dan tahun 2012 berjumlah 1.107,05 ton.

(d) Ketela Rambat tahun 2009 berjumlah 36 ton, tahun 2010 berjumlah 332 ton, tahun 2011 berjumlah 100,70 ton, dan tahun 2012 berjumlah 92,64 ton.

(e) Kacang Tanah tahun 2009 berjumlah 16 ton, tahun 2010 berjumlah 94,90 ton, tahun 2011 berjumlah 25,65 ton, dan tahun 2012 berjumlah 23,59 ton.

(f) Kacang Hijau tahun 2010 berjumlah 55,40 ton, tahun 2011 berjumlah 10,55 ton, tahun 2012 berjumlah 18,86 ton.

**(4) Produksi Tanaman Hortikultura (Ton):**

(a) Sayur-sayuran tahun 2011 berjumlah 1.332,90 ton, tahun 2012 berjumlah 10,14 ton.

(b) Buah-buahan tahun 2011 berjumlah 153,25 ton, tahun 2012 berjumlah 313,20 ton.

**(5) Produksi Tanaman Perkebunan**

(a) Kelapa tahun 2011 berjumlah 54 ton, tahun 2012 berjumlah 90,21 ton, dan tahun 2013 berjumlah 99,23 ton

(b) Pala tahun 2011 berjumlah 3 ton, tahun 2012 berjumlah 52,60 ton, dan tahun 2013 berjumlah 57,86 ton.

(c) Cengkeh tahun 2011 berjumlah 5 ton, tahun 2012 berjumlah 11,33 ton, dan tahun 2013 berjumlah 10,20 ton.

(d) Jambu Mete tahun 2011 berjumlah 1 ton, tahun 2012 berjumlah 2 ton, dan tahun 2013 berjumlah 2,20 ton.



(e) Kenari tahun 2011 berjumlah 14 ton, tahun 2012 berjumlah 29,51 ton, dan tahun 2013 berjumlah 32,46 ton

(6) Produksi Ternak (Ekor)

(a) Sapi tahun 2010 berjumlah 208 ekor, tahun 2011 berjumlah 206 ekor, dan tahun 2012 berjumlah 236 ekor

(b) Kambing tahun 2010 berjumlah 2.683 ekor, tahun 2011 berjumlah 3.847 ekor dan tahun 2012 berjumlah 3.965 ekor

(c) Babi tahun 2010 berjumlah 387 ekor, tahun 2011 berjumlah 591 ekor dan tahun 2012 berjumlah 736 ekor.

(7) Produksi Kayu (M3)

(a) Kayu Meranti tahun 2009 berjumlah 105 M3, dan tahun 2010 berjumlah 60 M3.

(b) Kayu Rimba Campuran tahun 2009 berjumlah 130 M3, dan tahun 2010 75 M3.

(c) Kayu Indah tahun 2009 berjumlah 55 M3, tahun 2010 berjumlah 15 M3.

(8) Luas Lahan

(a) Luas Lahan Kritis (Ha) tahun 2011 berjumlah 11.845 Ha, tahun 2012 berjumlah 11,845 Ha, dan tahun 2013 berjumlah 11.845 Ha.

(b) Luas Hutan Lindung (Ha) tahun 2011 berjumlah 9.201 Ha, tahun 2012 berjumlah 9.201 Ha dan tahun 2013 berjumlah 9,201 Ha.

Sebagai kota yang terdiri dari banyak pulau kecil yang tersebar luas, maka laut menjadi wilayah yang dominan di daerah ini, dengan demikian sumberdaya laut merupakan unsur dominan dalam pengembangan ke depan. Berbagai upaya pemanfaatan sumber daya laut telah dilakukan oleh masyarakat pesisir seperti penangkapan ikan, pembudidayaan rumput laut maupun pengolahan hasil perikanan seperti pembuatan ikan asin dan lain sebagainya. Guna menunjang kegiatan nelayan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut telah dialokasikan dana DAK yang diterima setiap tahun untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap dengan uraian bantuan dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut.

**Tabel 4.16 Perkembangan Bantuan Kegiatan Perikanan Tangkap bagi Masyarakat di Kota Tual Tahun 2009-2012**

No.	Jenis Bantuan	Tahun (Paket)			
		2009	2010	2011	2012
1.	Sarana Penangkapan	14	11	25	37
2.	Sarana Budidaya	72	45	80	50
3.	Sarana Pengolahan	-	-	11	7
4.	Sarana Pesisir	2 Unit	-	-	-
5.	Sarana Penyuluhan	-	-	3	-

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, tanggal 25 Juli 2013

Guna menjaga ketersediaan ekosistem pesisir maka telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan



ekosistem pesisir pada tahun 2011 dengan lokasi kegiatan Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara untuk ekosistem terumbu karang serta Desa Fiditan untuk ekosistem mangrove atau bakau. Selanjutnya guna membantu masyarakat pesisir dalam pengembangan usaha baik usaha penangkapan ikan maupun usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah diadakan pengembangan sarana usaha mikro mitra bahari. Alokasi anggaran bagi pengembangan sub sektor perikanan sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 sebesar Rp. 19.242.704.050, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut.

**Tabel 4.17 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual Tahun 2009-2012**

NO	TAHUN	JUMLAH		CAPAIAN (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.	2009	108.850.000,00	108.850.000,00	100
2.	2010	3.913.760.000,00	3.748.835.362,00	95,79
3.	2011	5.849.001.300,00	5.536.535.000,00	94,66
4.	2012	9.371.092.750,00	9.221.643.000,00	98,41

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Kota Tual. Alokasi anggaran untuk sektor pariwisata dari tahun 2010-2012 sebesar Rp. 1.207.915.600 yang secara rinci sesuai Tabel 4.18 berikut.

**Tabel 4.18 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual Tahun 2010-2012**

NO	TAHUN	JUMLAH		CAPAIAN (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.	2010	209.168.000,00	209.168.000,00	100
2.	2011	525.408.000,00	525.408.000,00	100
3.	2012	473.339.600,00	449.291.566,68	94,92

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam konteks pengembangan wilayah dari sub sektor jasa pariwisata yaitu:

- Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Tual.
- Mengadakan survey potensi pariwisata pada empat kecamatan di Kota Tual, baik wisata bahari maupun budaya.
- Mengidentifikasi titik-titik destinasi untuk dapat dikembangkan. Hasilnya telah ditetapkan Tayando Tam sebagai destinasi wisata bawah laut, Kur sebagai wisata penangkaran penyu, Ngadi sebagai destinasi wisata tirta, serta beberapa titik destinasi wisata bahari dan budaya lainnya.
- Penataan beberapa objek wisata seperti objek wisata Pantai Dullah, objek wisata Tirta Danau Ngadi, dan Pantai wisata Difur.
- Mempromosikan Kota Tual didalam maupun luar negeri melalui website, leaflet, booklet, pameran-pameran dan tempat-tempat strategis seperti Bandara Pattimura di



Ambon, hotel-hotel serta kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk membuat perangko wisata dan kartu pos.

2) Pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat;

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah Kota Tual selain ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga untuk pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi:

a) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pelayanan masyarakat.

Alokasi anggaran ditujukan bagi pembangunan infrastruktur dasar baik pembangunan jaringan listrik, air bersih, pemukiman, sanitasi, maupun komunikasi. Capaian kinerja program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut.

(1) Pengadaan listrik tenaga surya di Pulau Ut Kecamatan Dullah Selatan dan sebagian besar Desa dan Dusun di Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Pulau-pulau Kur.

(2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Sanitasi BTN-UN;

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp.223.601.000, dengan realisasi sebesar Rp.215.774.965 atau 96,5%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jaringan-jaringan sanitasi di BTN-UN.

(3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Sanitasi (MCK) Ohoitel Kampung Baru;

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp.85.500.000, dengan realisasi sebesar Rp.81.225.000 atau 95%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya saluran sanitasi (MCK) di Ohoitel Kampung Baru.

**(4) Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat (PNPM-MP);**

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.154.184.000, dengan realisasi sebesar Rp.154.184.000 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.223.646.750, dengan realisasi sebesar Rp.190.100.000 atau 85%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya fasilitas pembangunan sarana dan prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat (PNPM-MP).

**(5) Peningkatan Jaringan Air Bersih Kecamatan Kur;**

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.323.449.000,- dengan realisasi sebesar Rp.307.324.050,- atau 95%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.16.124.950,- dengan realisasi sebesar Rp.16.124.950,- atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jaringan air bersih di Sermaf.

**(6) Pembangunan Bak Penampung Air Hujan Desa Kaimear;**

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.171.832.000,- dengan realisasi sebesar Rp.171.832.000,-

atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya bak penampung air hujan di Desa Kaimear.

**(7) Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa Kur I;**

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.462.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp.381.744.000,- atau 82,50%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.347.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp.347.980.000,- atau 100%. Sedangkan untuk kegiatan luncuran 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.80.976.000,- dengan realisasi sebesar Rp.80.976.000,- atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya bak penampung dan jaringan pipa.

**(8) Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa Kur II;**

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.410.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp.339.009.000,- atau 82,50%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.71.911.000,- dengan realisasi sebesar Rp.71.911.000,- atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya bak penampung dan jaringan pipa.

**b) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Alokasi anggaran untuk



peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 109.044.919.767, dengan rincian sebagaimana Tabel 4.19 berikut.

**Tabel 4.19 Anggaran Belanja Langsung dan Realisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual Tahun 2009-2012**

NO	TAHUN	JUMLAH		CAPAIAN (%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1.	2009	6.763.346.200,00	1.820.167.017,00	26,91
2.	2010	25.518.678.500,00	11.606.728.460,00	45,48
3.	2011	47.728.868.740,00	37.226.880.620,00	77,99
4.	2012	29.034.026.327,00	18.694.718.330,00	64,38

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual

Capaian kinerja program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut.

**(1) Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK).**

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.554.400.000, dengan realisasi nihil. Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.152.822.400, dengan realisasi sebesar Rp.738.697.800 atau 34,31%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.793.226.950, dengan realisasi sebesar Rp.4.937.094.850 atau 45,74%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.972.910.225, dengan realisasi sebesar Rp.3.813.971.200 atau 47,84%. Kinerja yang dicapai dari kegiatan ini yaitu terlaksananya rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah.

**(2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah.**

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.726.645.000, yang bersumber dari DPPIP dengan realisasi sebesar Rp.396.312.500, atau 54,54%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.227.383.500, dengan realisasi sebesar Rp.227.383.500 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.746.288.070, dengan realisasi Rp.745.543.970 atau 99,90%, kegiatan ini merupakan kegiatan luncuran di tahun 2012. Kinerja yang dicapai dari kegiatan ini pada tahun 2010 yaitu terlaksananya penambahan ruang kelas pada SDN BTN Un Tual, SDN Un Pantai Tual dan MIN Ngadi.

### (3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah.

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.437.953.800, yang pendanaannya bersumber dari DAK dengan realisasi sebesar Rp.1.582.038.060 atau 46,02%. Pada tahun 2011 kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, alokasi anggaran sebesar Rp.1.773.191.100, dengan realisasi sebesar Rp.1.730.336.445 atau 97,58%, dan dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.684.350.940, dengan realisasi sebesar Rp.1.684.350.940 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.58.431.755, dengan realisasi sebesar Rp.46.856.905 atau 80,19%. Kinerja yang dicapai dari

kegiatan ini yaitu terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah pada 21 SD dan 4 SMP di Kota Tual.

#### (4) Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa.

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.4.152.000, yang pendanaannya bersumber dari DAK dengan realisasi sebesar Rp.3.499.978.000 atau 84,30%.

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.621.698.000, dengan realisasi sebesar Rp.621.698.000 atau 100%.

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.44.920.000, dengan realisasi sebesar Rp.26.970.000 atau 60,04%. Kinerja yang dicapai dari kegiatan ini yaitu tersedianya buku dan alat tulis siswa pada 37 SD dan 14 SMP di Kota Tual.

#### (5) Pembangunan Ruang Kelas Sekolah.

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.283.500.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.113.400.000 atau 40%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya Ruang Kelas Baru (RKB) SD Al-Hilal II Tual

di Tual dan SD Negeri Yamru di Desa Yamru Tayando.

Selain capaian beberapa program dan kegiatan yang telah diuraikan di atas juga terdapat capaian-capaian kinerja sesuai target yang direncanakan di RPJMD Kota Tual tahun 2009-2013. Capaian kinerja sesuai target yang direncanakan dalam



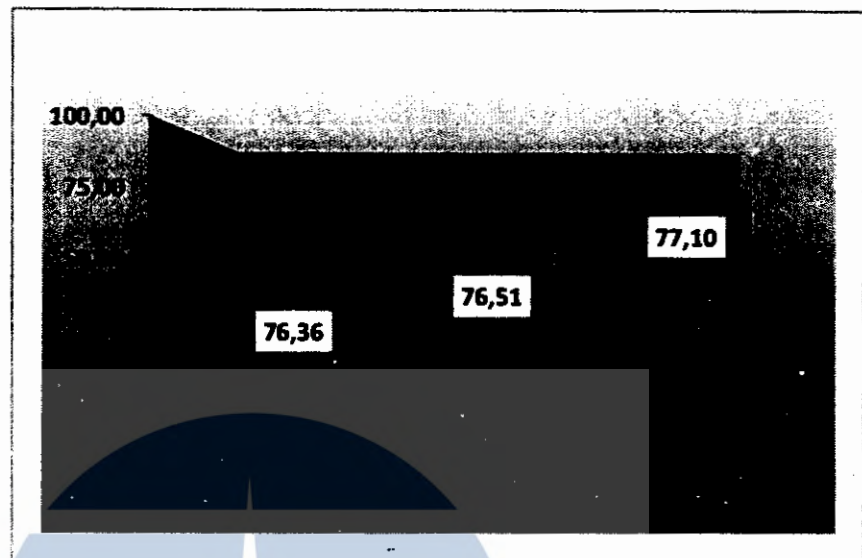
RPJMD Kota Tual tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut.

**Tabel 4.20 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan di Kota Tual periode 2009-2012**

No.	Indikator Kinerja	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	91,86	91,86	111,62	108,15
	a. SD/MI	90,71	90,71	97,42	98,93
	b. SMP/MTs	91,86	91,86	99,79	100,55
	c. SMA/SMK/MA				
2.	Angka Partisipasi Murni (APM)	96,15	94,15	95,46	96,33
	a. SD/MI	79,28	78,67	79,97	83,07
	b. SMP/MTs	79,04	85,51	90,09	93,50
	c. SMA/SMK/MA				
3.	Angka Putus Sekolah				
	a. Usia 7-12 tahun	1,18	2,05	0,93	0,21
	b. Usia 13-15 tahun	7,32	9,36	2,12	0,83
	c. Usia 16-18 tahun	27,41	20,54	19,72	6,89
4.	Tingkat Kelulusan				
	a. SD/MI	100	100	100	100
	b. SMP/MTs	100	99,93	100	100
	c. SMA/SMK/MA	100	99,09	100	98,21
5.	Rasio guru per murid (%)	14,00	14,00	13,00	12,00
6.	Rasio guru per sekolah (%)	14,00	14,00	14,00	15,00
7.	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf atau tidak buta aksara (%)	30,00	72,00	81,35	90,00
8.	Rasio lulusan S1 per satuan penduduk	-	-	-	-
9.	Penemuan dan pemanfaatan teknologi tepat guna	-	-	-	-
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,36	76,51	77,10	-
11.	Jumlah Sekolah				
	a. SD/MI	53	53	55	60
	b. SMP/MTs	19	19	19	21
	c. SMA/SMK/MA	12	14	14	14
12.	Jumlah Siswa				
	a. SD/MI	9.616	9.918	9.903	9.863
	b. SMP/MTs	4.130	4.147	3.968	4.142
	c. SMA/SMK/MA	3.006	3.332	3.716	3.849
13.	Pembangunan RKB				
	a. SD/MI	-	-	16	-
	b. SMP/MTs	-	-	4	8
	c. SMA/SMK/MA	3	6	8	17
14.	Rehab Sekolah				
	a. SD/MI	-	27	68	139
	b. SMP/MTs	-	27	9	12
	c. SMA/SMK/MA	-	3	5	2

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tual selama tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.



**Gambar 4.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tual Tahun 2009-2011.**

Capaian indikator pelayanan kesehatan sesuai target yang direncanakan dalam RPJMD Kota Tual cenderung meningkat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

- Angka Harapan Hidup tahun 2012 sebesar 67,60%, menurun dibandingkan dengan tahun 2009 yakni 68,37%.
- Angka kematian bayi/1.000 KH mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 12/1.000 KH bila dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 8,2/1.000 KH. Sedangkan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2009-2012 tidak stabil yakni pada tahun 2009 sebanyak 117,5 kasus, pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebanyak 501 kasus dikarenakan eklamsia keracunan

kehamilan dan pendarahan, pada tahun 2011 sebanyak 152,2 kasus, dan pada tahun 2012 tidak ada kasus.

- Prevalensi gizi kurang pada anak balita cukup baik yakni pada tahun 2009 sebesar 2,1%, pada tahun 2012 sebesar 0,75%. Ini artinya bahwa cakupan gizi anak balita mengalami peningkatan yang cukup baik.
- Persentase pertolongan persalinan pada tahun 2009 sebesar 60%, tahun 2010 sebesar 56%, pada tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 85%, yang artinya bahwa penanganan yang dilakukan oleh tenaga bidan sudah cukup baik.
- Persentase kunjungan cakupan KN lengkap pada tahun 2009 sebesar 60% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 75%. Sedangkan jumlah cakupan kunjungan bayi pada tahun 2009 sebesar 70% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 85%.
- Jumlah bayi Asi eksklusif pada tahun 2009 sebesar 22,5%, tahun 2010 sebesar 5,2%, tahun 2011 sebesar 9,1% dan pada tahun 2012 sebesar 90%.
- Persentase Balita yang mendapatkan vitamin A pada tahun 2009 sebesar 80%, tahun 2010 sebesar 77%, tahun 2011 sebesar 74% dan pada tahun 2012 sebesar 90%. Sedangkan persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fe pada tahun 2009 sebesar 70%, tahun 2010 sebesar 67%, tahun 2011 sebesar 89% dan pada tahun 2012 sebesar 90%.



- Rasio posyandu persatuan balita pada tahun 2009-2011 sebesar 1,1 dan pada tahun 2012-2013 sebesar 2.
- Jumlah Bidan pada tahun 2009 sebanyak 33 orang dan mendapat penambahan tenaga 1 orang pada tahun 2010 sampai tahun 2012.
- Jumlah Perawat pada tahun 2009 sebanyak 76 orang, dan mendapat penambahan tenaga pada tahun 2010-2011 menjadi 107 orang dan tahun 2012 bertambah sebanyak 132 orang.
- Jumlah Tenaga Apoteker tahun 2009-2011 sebanyak 3 orang dan bertambah 3 orang pada tahun 2012-2013 menjadi 6 orang.
- Jumlah Nutrisionis/tenaga gizi pada tahun 2009-2010 sebanyak 23 orang, tahun 2011 terdapat mutasi 1 orang sehingga berkurang menjadi 22 orang, tahun 2012 bertambah tenaga sebanyak 25 orang.
- Jumlah sanitarian/tenaga kesling pada tahun 2010 sebanyak 18 orang, tahun 2011 sebanyak 16 orang, dan tahun 2012 sebanyak 25 orang. Ketidakstabilan jumlah tenaga dikarenakan terjadi mutasi/perpindahan tempat kerja.
- Jumlah tenaga farmasi pada tahun 2009 sebanyak 1 orang, tahun 2010-2011 bertambah menjadi 7 orang, tahun 2012 bertambah menjadi 10 orang.
- Jumlah Tenaga Psikologi pada tahun 2010 sampai saat ini hanya sebanyak 1 orang.

- Jumlah Tenaga Fisiotherapy pada tahun 2010 sekarang hanya sebanyak 1 orang.
- Jumlah Tenaga Analisis pada tahun 2010-2011 sebanyak 1 orang dan tahun 2012-2013 sebanyak 2 orang.
- Jumlah Tenaga Atro tahun 2010-2011 sebanyak 1 orang dan pada tahun 2012 mengalami mutasi sehingga tidak terdapat tenaga Atro sampai sekarang.
- Jumlah Tenaga Pekarya tahun 2011 sebanyak 2 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 1 orang.
- Jumlah Tenaga Atem tahun 2012 sebanyak 1 orang.
- Jumlah Tenaga Hiperkes/Kesker tahun 2012 sebanyak 1 orang.
- Jumlah Dokter Umum (PNS) pada tahun 2009-2010 sebanyak 5 orang, pada tahun 2011 sebanyak 6 orang, pada tahun 2012 sebanyak 7 orang dan pada tahun 2013 sebanyak 10 orang.
- Jumlah Dokter Gigi (PNS) tahun 2009 sebanyak 2 orang, tahun 2010 sebanyak 3 orang, pada tahun 2011-2012 sebanyak 4 orang, dan pada tahun 2013 sebanyak 3 orang.
- Rumah Sakit Pemerintah tahun 2012 sebanyak 1 unit.
- Puskesmas Induk pada tahun 2009-2011 sebanyak 5 unit, tahun 2012 bertambah menjadi 8 unit (diantaranya 3 unit peningkatan dari pustu menjadi puskesmas induk)

- Puskesmas Pembantu/Pustu pada tahun 2009-2011 sebanyak 12 unit, dan tahun 2012 berkurang menjadi 9 unit karena 3 unit mengalami peningkatan menjadi Puskesmas Induk.
- Poskesdes pada tahun 2009 sebanyak 25 unit, tahun 2010-2011 bertambah menjadi 29 unit, dan tahun 2012 bertambah menjadi 33 unit.
- Posyandu pada tahun 2009-2011 sebanyak 84 unit, dan pada tahun 2012 bertambah menjadi 96 unit.
- Cakupan pelayanan penyakit menular Diare tahun 2009-2012 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan penyakit menular Malaria tahun 2009-2012 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan penyakit menular HIV tahun 2009-2012 sebesar 100%.
- Cakupan pelayanan penyakit menular DBD tahun 2009-2012 sebesar 100%.
- Jumlah Rumah Tangga Sehat tahun 2009-2010 sebesar 40% dan mengalami peningkatan pada tahun 2011-2012 sebesar 60%.
- Alat kesehatan pada tahun 2010 sebanyak 134 jenis, pada tahun 2011 sebanyak 119 jenis, dan tahun 2012 sebanyak 118 jenis. Pengurangan alat kesehatan karena terjadi kerusakan.
- Jenis Obat DPDF pada tahun 2009 sebanyak 108, DAU pada tahun 2009 sebanyak 105 dan tahun 2010 sebanyak 110,



sedangkan DAK tahun 2011 sebanyak 155 dan tahun 2012 sebanyak 115.

- Pusling darat tahun 2009-2010 sebanyak 2 unit.
- Pusling laut tahun 2009 sebanyak 1 unit, tahun 2010 sebanyak 3 unit, tahun 2012 berkurang 1 unit karena 2 unit mengalami kerusakan, tahun 2013 bertambah menjadi 5 unit.
- Askes PNS sebanyak 9.032 orang (15%).
- Pengadaan kendaraan operasional roda dua tahun 2009 sebanyak 25 unit, tahun 2010 sebanyak 21 unit, dan tahun 2011 sebanyak 7 unit. Jadi total sebanyak 53 unit.
- Jumlah peserta Jamkesmas sesuai SK Walikota Tual Nomor 27f Tahun 2010 sebanyak 30.927 jiwa (55,10%).
- Jumlah peserta Jamkesda sebanyak 20.576 jiwa (25,40%)

c) Pemulihan sistem transportasi yang handal dalam menunjang pengembangan wilayah terutama di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangka peningkatan aksesibilitas.

Alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperbaiki sarana transportasi khususnya perbaikan jalan dan jembatan di berbagai wilayah yang menunjang peningkatan produksi. Selain itu pengalokasian anggaran juga untuk mendukung kelancaran perhubungan perintis di wilayah terisolasi melalui jaringan laut. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual telah dilaksanakan program pembangunan jalan dan jembatan dengan beberapa kegiatan yang capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Pembangunan Jalan Kota Tayando.

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp.739.848.000, dengan realisasi sebesar Rp.702.855.600 atau %. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan lapen sepanjang 1km di Kota Tayando.

(2) Pembangunan Jalan Kota Kur

Pada tahun 2009 dialokasikan anggaran sebesar Rp.841.330.000, dengan realisasi sebesar Rp.799.263.500 atau %. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan lapen sepanjang 1 km di Kota Kur.

(3) Pembangunan Jalan Langgiar-Ohoitel

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.649.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.951.408.147 atau 57,70%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.698.906.590, dengan realisasi sebesar Rp.698.906.590 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di Langgiar-Ohoitel.

(4) Pembangunan Jalan Lingkar Kur

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.993.940.000, dengan realisasi sebesar Rp.284.870.000 atau 30%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.895.500.000, dengan realisasi sebesar Rp.850.725.000 atau 95%. Adapun untuk kegiatan luncuran 2010

dialokasikan anggaran sebesar Rp.713.709.000, dengan realisasi sebesar Rp.713.709.000 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.44.775.000, dengan realisasi sebesar Rp.44.775.000, atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan Lingkar Kur sepanjang 1 Km.

(5) Pembangunan Jalan Watran-Luv

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.786.024.000, dengan realisasi sebesar Rp.1.326.865.000 atau 47,63%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.1.459.159.000, dengan realisasi sebesar Rp.1.459.159.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di Watran-Luv.

(6) Pembangunan Pengaman Jalan Taar

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.116.036.000, dengan realisasi sebesar Rp.109.725.000 atau 94,56%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.5.775.000, dengan realisasi sebesar Rp.5.775.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya pengaman jalan di Taar.

(7) Pembangunan Jalan LPTQ-Ngadi

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.290.000.000, dengan realisasi sebesar



Rp.2.290.000.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di LPTQ-Ngadi.

**(8) Pembangunan Jalan Yamru-Ohoitom**

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.633.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.746.834.000 atau 45,73%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.886.166.000, dengan realisasi sebesar Rp.388.433.000 atau 56,17%.

**(9) Pembangunan Jalan Fidabot**

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.588.725.000, dengan realisasi sebesar Rp.559.288.000 atau 95%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.29.437.000, dengan realisasi sebesar Rp.29.437.000, atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di Fidabot.

**(10) Pembangunan Pengaman Jalan Tual-Ohoitel**

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.138.275.000, dengan realisasi sebesar Rp.130.112.263, atau 95%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.6.848.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.848.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jalan di Tual-Ohoitel.

**(11) Pembangunan Jalan SP-Ohoitel-Luv**

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.872.998.500, dengan realisasi sebesar Rp.872.998.500 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya sarana jalan sepanjang 1,5 Km pada jalan SP-Ohoitel-Luv.

**(12) Pembangunan Jalan Luv-Ohoitel Kampung Baru**

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.2.852.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.2.852.000.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya sarana jalan sepanjang 1,5 Km pada jalan Luv-Ohoitel Kampung Baru.

**(13) Pembangunan Jalan Luv-Ohoitel Kampung Baru**

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.2.852.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.2.852.000.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya sarana jalan sepanjang 1,5 Km pada jalan Luv-Ohoitel Kampung Baru.

**(14) Peningkatan Jalan Kecamatan Dullah Utara**

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.462.502.000, dengan realisasi sebesar Rp.1.462.502.000 atau 100%. Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp.860.688.000, dengan realisasi sebesar Rp.860.688.000 atau 100%. Kinerja yang

dicapai yaitu tersedianya sarana jalan sepanjang 1 Km di Kecamatan Dullah Utara.

(15) Pembangunan Jembatan Taar

Pada tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp.1.217.000.000, dengan realisasi sebesar Rp.612.713.000 atau 50.35%. Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran (luncuran 2010) sebesar Rp.654.214.000, dengan realisasi sebesar Rp.654.214.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu tersedianya jembatan Taar.

(16) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Fair

Pada tahun 2012 dialokasikan anggaran (luncuran 2011) sebesar Rp.98.950.000, dengan realisasi sebesar Rp.98.950.000 atau 100%. Kinerja yang dicapai yaitu terlaksananya rehabilitasi jembatan fair sepanjang 87,5 meter.

Sesuai hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kota Tual dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah serta beberapa Kepala SKPD, diketahui masih adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan anggaran yang telah diuraikan di atas. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengelolaan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut.



- a. Belum disiplinnya penggunaan anggaran. Masih banyak program dan kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang telah direncanakan bahkan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak mencukupi atau lebih besar dari yang direncanakan dan masih tidak tepat sasaran. Selain itu, jumlah anggaran yang tersedia untuk suatu program dan kegiatan sering mengalami pergeseran pemanfaatan atau tidak dilaksanakan dan dialihkan untuk program kegiatan lainnya yang diusulkan masuk dalam APBD Perubahan.
- b. Pengalokasian anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan proyek-proyek besar yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama walaupun menjanjikan keuntungan yang besar.
- c. Asistensi rencana kerja dan anggaran (RKA) selama ini masih dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Peran Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai unsur perencanaan daerah tidak dilibatkan samasekali. Akibatnya, masih didapatkan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan tujuan pengelolaan anggaran bagi pengembangan wilayah Kota Tual. Orientasi asistensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual hanya sebatas melihat besar kecilnya anggaran yang diusulkan bagi suatu kegiatan tanpa melihat maksud dan tujuan kegiatan itu secara luas.

- d. Masih sering terjadi keterlambatan dalam pembahasan APBD Kota Tual yang disebabkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual yang tidak disiplin dalam penyiapan dokumen perencanaan anggaran.

Hasil temuan lapangan tentang pengelolaan anggaran dan dukungan data sekunder telah menunjukkan adanya kesesuaian antara teori tentang pengelolaan anggaran yang dikemukakan oleh Valiani (2012) bahwa kebijakan pengelolaan anggaran adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai ekonomi yang mantap. Melalui pengaturan pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman tentu akan memberikan dukungan yang besar dan memacu upaya pengembangan wilayah di Kota Tual.

## **2. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia;**

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah di Kota Tual dibagi menjadi dua bagian yakni kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia masyarakat. Hal ini didasarkan atas informasi hasil wawancara dengan beberapa Kepala SKPD Kota Tual seperti Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai berikut.

“Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual sungguh menyadari bahwa keberhasilan pengembangan wilayah maupun pembangunan secara umumnya di Kota Tual sangat tergantung dari ketersediaan SDM yang handal, trampil, inovatif serta mempunyai semangat yang kuat dalam membangun. Sumber daya alam yang berlimpah maupun teknologi yang canggih sekalipun tanpa didukung dengan ketersediaan SDM yang berkualitas dan cukup jumlahnya, maka semua itu menjadi tidak ada manfaatnya bagi pengembangan

wilayah Kota Tual. Mengingat pentingnya SDM dalam proses pembangunan di Kota Tual, maka upaya pengembangan SDM yang telah kami lakukan dan terus kami lakukan setiap tahunnya yaitu pengembangan SDM aparatur khususnya dan melalui ketersediaan SDM aparatur yang handal ini menjadi pintu masuk pengembangan SDM masyarakat. Pengembangan SDM aparatur terlaksana melalui beberapa program dan kegiatan yang sebelumnya telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun pengembangan SDM masyarakat dilakukan melalui pengikusertaan mereka dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan daerah maupun monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013).

“Kunci dari keberhasilan pengembangan wilayah adalah terletak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai masalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, harus diawali dari masalah pendidikan, karena pendidikan adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dalam konteks pengembangan wilayah, penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk bekerja, dengan kata lain pendidikan menyiapkan tenaga-tenaga yang siap bekerja. Pentingnya keberadaan sumber daya manusia bagi pengembangan wilayah tersebut, mengharuskan kami untuk mengembangkannya secara lebih baik. Wujudnya terlihat pada setiap tahunnya, kami selalu menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia baik kegiatan pengembangan terhadap sumber daya manusia aparatur maupun terhadap sumber daya manusia masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual, tanggal 10 Juni 2013).

“Pengembangan wilayah merupakan upaya memberdayakan *stakeholders* baik masyarakat, pemerintah, maupun swasta di suatu wilayah, terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah tersebut. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dibutuhkan suatu kondisi dimana setiap pelaku pengembangan wilayah berada dalam kondisi yang sehat secara fisiknya. Bahwa hanya dengan sumber daya manusia yang sehat fisik sajalah yang dapat mengawal proses pengembangan wilayah yang sedang berjalan. Mendasari hal itu, maka dalam rangka mewujudkan aparatur dan masyarakat yang sehat fisiknya, memadai pengetahuannya tentang kesehatan diri dan lingkungannya serta terwujudnya kesehatan bagi semua pelaku pengembangan wilayah di Kota Tual, kami laksanakan berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas



Kesehatan Kota Tual” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, tanggal 11 Juni 2013).

“Dalam rangka pengembangan wilayah Kota Tual dibutuhkan adanya pembangunan yang lebih komprehensif yang tidak sekedar menekankan pada pertumbuhan ekonomi namun juga penekannya pada sisi sumber daya manusia. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia bagi pengembangan wilayah di Kota Tual, maka peningkatan sumber daya manusia yang kami lakukan meliputi pengembangan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat. Peningkatan jumlah maupun mutu sumber daya manusia aparatur dan masyarakat kami lakukan melalui program dan kegiatan yang setiap tahunnya sejak tahun 2009 hingga saat ini kami rencanakan dan kami laksanakan dan telah memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual, tanggal 10 Juni 2013).

“Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai merupakan pilar pengembangan wilayah Kota Tual. Kami terus mengembangkannya dalam rangka mewujudkan pemerataan pengembangan wilayah Kota Tual. Penyediaan sumber daya manusia tersebut melalui sistem pendidikan dan pelatihan atau sejenisnya yang baik sesuai dengan kebutuhan dan potensi pengembangan wilayah di Kota Tual. Kami menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak dapat hanya dilakukan terhadap aparatur atau PNS saja namun juga penting dilakukan terhadap masyarakat. Untuk itu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kami lakukan selama ini (2009-2012) yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual, tanggal 14 Juni 2013).

“Seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual memiliki akses yang tinggi bagi pengembangan pariwisata. Artinya, potensi pariwisata Kota Tual tersebar merata di seluruh kecamatan. Menjadi sia-sia banyaknya potensi pariwisata yang ada jika tidak terkelola dengan baik. Perlu kita ketahui bersama juga bahwa pariwisata dalam praktiknya bukan menjual barang namun menjual jasa yang tentu sangat bertumpu pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada, yang kami sebut sumber daya manusia pariwisata. Menyadari hal ini, maka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kami lakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012 meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat setempat. Berbagai program dan kegiatan penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat terus kami lakukan dan kami

masukkan dalam setiap perencanaan anggaran SKPD kami dan kami bersyukur bahwa apa yang telah kami rencanakan dalam penganggaran selalu mendapat persetujuan” (Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual, tanggal 17 Juni 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas juga diketahui bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bertumpu pada program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Tual. Selain itu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi percepatan pengembangan wilayah. Pemerintah Daerah Kota Tual juga melakukan pendekatan manajemen kepegawaian yang berorientasi mulai dari proses rekrutmen CPNS sampai dengan penempatan dalam jabatan sesuai keahlian teknis terkait pengembangan wilayah. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual sebagai berikut.

“Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, maka melalui pendekatan manajemen kepegawaian serta sesuai dengan prinsip *the right man on the right place*, kami telah menempatkan CPNS pada posisi atau SKPD sesuai dengan latar belakang pendidikannya, lebih khusus pada SKPD yang mengelola sektor yang berkontribusi bagi peningkatan penyelenggaraan pengembangan wilayah Kota Tual. Bukan hanya berorientasi pada penempatannya saja, namun kami juga fokus mulai dari saat rekrutmen CPNS tersebut. Hal ini terwujud dari besarnya lowongan penerimaan CPNS yang berlatar belakang pendidikan teknik, kelautan dan perikanan, tenaga pendidikan dan kesehatan, akuntansi, dan lainnya” (Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual, tanggal 10 Juni 2013).

Berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk program dan kegiatan hampir merata pada semua SKPD. Terhadap

kebijakan pengembangan sumber daya manusia dari SKPD yang memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan wilayah baik sebagai sektor unggulan daerah maupun sektor yang dipandang dapat mendorong sektor lainnya dalam pengembangan wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual;

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM aparatur antara lain:

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur.
- Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan kegiatan pelatihan pemantapan kurikulum satuan pendidikan, pelatihan kompetensi tenaga pendidikan.
- Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum.
- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan pelatihan kompetensi tenaga pendidikan, pembinaan kelompok kerja guru, pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan dana BOS PAUD, SD, SMP dan SMA, penyediaan dana rutin tiga dinas cabang kecamatan, dan pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).



- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan dan pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan.

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat antara lain:

- Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dengan kegiatan pembinaan siswa berprestasi, pelatihan kompetensi siswa berprestasi, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa serta penyelenggaraan paket A dan B.
- Program Pendidikan Menengah dengan kegiatan penyelenggaraan paket C setara SMA dan lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA.

Selain program dan kegiatan di atas, pada prinsipnya semua program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual baik yang berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan maupun non fisik seperti olimpiade sains nasional, penyelenggaraan pembelajaran secara tidak langsung diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan SDM aparatur dan masyarakat secara memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Tual;

(1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM aparatur antara lain:

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur, seleksi tenaga kesehatan teladan, pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas (SP3), dan seleksi tenaga kesehatan teladan
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan kegiatan pelatihan petugas pengelola obat.
- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan, pelatihan teknis berjenjang bagi bidan desa, petugas gizi, petugas kesehatan lingkungan dan pemegang program kesehatan lainnya.
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan kegiatan pelatihan petugas laboratorium puskesmas.

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat antara lain:

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat.
- Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan pelatihan produksi pangan bagi industri rumah tangga.

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan.

Selain program dan kegiatan di atas, pada prinsipnya semua program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Tual baik yang berupa pembangunan sarana dan prasarana kesehatan maupun non fisik seperti evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, revitalisasi promosi kesehatan, revitalisasi posyandu dan lainnya, secara tidak langsung diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan SDM aparatur dan masyarakat secara memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

- c. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual.

- (1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM aparatur antara lain:

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan perikanan tangkap bagi aparatur.
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan magang budidaya bagi aparatur dan pembudidaya dan pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan



kegiatan pendidikan dan pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi kelompok nelayan tangkap.
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan pelatihan manajemen usaha dan teknik budidaya bagi pembudidaya rumput laut dan ikan kerapu, pelatihan wirausaha budidaya rumput laut dan ikan kerapu, dan pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) bagi nelayan pembudidaya.
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan listrik tenaga surya, sosialisasi dan pelatihan pengelolaan ekosistem pesisir.
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan pembinaan dan pengukuhan kelompok masyarakat pengawas.
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan pelatihan pasca panen produk unggulan.

- Program Daya Saing Hasil Perikanan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bantuan paket olahan perikanan.
- d. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual.
- (1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM aparatur berupa bimtek-bimtek maupun pelatihan-pelatihan teknis di bidang kepariwisataan.
- (2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait manajemen pengelolaan dan pengembangan pariwisata.
- e. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual.
- (1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM aparatur berupa pelatihan-pelatihan, magang maupun bimbingan teknis di bidang pertanian.
- (2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat
- Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan dengan kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani, dan peningkatan kemampuan lembaga tani.
  - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan pelatihan penanggulangan penyakit pada ternak,
  - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna, pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna.
  - Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan.
- f. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Daerah Kota Tual.
- (1) Kebijakan pengembangan SDM aparatur;
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM aparatur antara lain:
- Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang (pelatihan pengaplikasian GIS) serta survey dan pemetaan pemanfaatan tata ruang.
  - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah.



(2) Kebijakan pengembangan SDM masyarakat;

Pengembangan SDM masyarakat pada dasarnya dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan.

Sesuai hasil wawancara diantara beberapa Kepala SKPD di atas, masih ditemui adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Kota Tual masih sebatas dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saja, belum diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku pengembangan wilayah.
- b. Masih terjadi mutasi bagi PNS yang telah terampil, mahir, dan berpengalaman serta telah lama bekerja pada suatu SKPD berdasarkan pertimbangan PNS yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan SKPD yang ditempatinya.

Hasil temuan lapangan tentang pengembangan sumberdaya manusia dan dukungan data sekunder penelitian telah menunjukkan adanya kesesuaian antara teori tentang kebijakan pengembangan SDM dalam pengembangan wilayah menurut Mulyanto (2008) yang dimaksudkan sebagai penyediaan

SDM pelaksana pengembangan wilayah dari berbagai sisi baik kuantitas, keahlian, wawasan, etos kerja, maupun integritas agar mampu merencanakan dan melaksanakan koordinasi, konsistensi, sinkronisasi serta mengatur sinergi program suatu sektor/satuan kerja maupun program-program antar sektor/satuan kerja dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. Kebijakan yang diambil dalam pengembangan sumberdaya manusia dalam penelitian ini difokuskan untuk pengembangan keahlian dan jumlah sumberdaya manusia baik aparatur maupun masyarakat yang bertumpu pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh setiap SKPD.

### **3. Kebijakan pengembangan data dan informasi;**

Keterbatasan data dan informasi pada kondisi awal pemekaran Kota Tual menjadi kendala utama yang menghambat upaya pengembangan wilayah Kota Tual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual sebagai berikut.

“Pada awal pemekaran Kota Tual, ketersediaan data dan informasi sangat terbatas bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. Pada tahun 2008 dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah Kota Tual khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan. Hal ini sungguh menjadi kendala utama dalam pengembangan wilayah Kota Tual” (Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, tanggal 5 Juni 2013).

Guna mengatasi kendala tersebut telah dilakukan intervensi kebijakan pengembangan data dan informasi. Bentuk intervensi kebijakan

pengembangan data dan informasi di Kota Tual berdasarkan wawancara dengan beberapa Kepala SKPD Kota Tual, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara intensif, rutin dan terus menerus serta melakukan pengolahan data dan informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional;

Hal ini dilakukan untuk menghindari pembuatan perkiraan-perkiraan statistik maupun proyeksi-proyeksi dengan menggunakan data statistik yang tidak lengkap maupun kurang dapat dipercaya.

Pada setiap SKPD yang menangani sektor unggulan di Kota Tual menjadikan profil sebagai basis data pengembangan wilayah. Profil ini disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Guna lebih mendukung ketersediaan data dan informasi, Pemerintah daerah Kota Tual juga menerapkan E-Database maupun E-Monev dalam sistem perencanaan pembangunan daerah hasil kerjasama dengan Bappenas.

- b. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem informasi geografis memiliki keunggulan dalam kemampuannya memberikan himpunan data yang sangat besar khususnya bagi analisis kewilayahan. Sistem Informasi Geografis (SIG) membantu dalam pelaksanaan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Pengembangan SIG di Kota Tual dilakukan melalui penyediaan data daerah yang baik dan berakurasi serta mudah dicari pada waktu yang digunakan, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui



pelatihan aplikasi SIG, dan penyediaan perangkat berupa software dan hardware untuk pengoperasian sistem informasi. Pengaplikasian Sistem Informasi Geografis (SIG) telah mendorong tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2010-2030, dan perencanaan penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Pulau Dullah, RDTR Kawasan Strategis Perkotaan, RDTR Kawasan Strategis pulau-pulau Tayando Tam, dan RDTR Kawasan Strategis Pulau-pulau Kur pada tahun 2014.

Sesuai hasil wawancara diantara beberapa Kepala SKPD, masih ditemui adanya berbagai permasalahan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual. Adapun permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pengembangan sumber daya manusia dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belum semua SKPD memiliki profil SKPD sebagai basis data pengembangan sektor/SKPD dimaksud.
- b. Belum semua pejabat yang menangani perencanaan mengikuti magang pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda, Litbang, dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual.
- c. Kualitas dan kuantitas tenaga pengelola SIG masih sangat terbatas begitupun dengan perangkat pengaplikasiannya.

Analisis penelitian terkait kebijakan pengembangan data dan informasi yang didasarkan pada dukungan hasil temuan lapangan baik melalui wawancara maupun observasi dan data sekunder penelitian lainnya, menunjukkan adanya kesesuaian dengan teori tentang kebijakan pengembangan data dan informasi yang dimaksudkan sebagai serangkaian upaya untuk menunjang perencanaan pengembangan wilayah serinci mungkin dan mengusahakan memberikan data dan informasi untuk mengetahui konsistensi dari perencanaan pengembangan wilayah tersebut (Mulyanto, 2008). Kesesuaian hasil penelitian ini dengan teori juga diperkuat dengan pendapat Harmadi (2011) yang menggambarkan tentang kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah sebagai serangkaian tindakan dari pusat-pusat informasi kewilayahan dengan memuat segala macam pengetahuan dalam berbagai bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan kewilayahan dan pengembangannya. Kota Tual dalam upaya pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah telah melakukan serangkaian tindakan yakni penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan serta pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG).

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya, maka pada bagian ini penulis memaparkan beberapa simpulan dan saran tindak yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini sebagai berikut.

#### A. Simpulan

1. Pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tual berkembang cukup pesat. Kondisi ini ditunjukkan oleh besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat sejak tahun 2009 hingga 2012. Selama periode tersebut, Kota Tual mengalami pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan klasifikasi sembilan sektor ekonomi secara sektoral, sektor perdagangan adalah penyumbang terbesar dalam perekonomian daerah. Penyumbang terbesar kedua yaitu sektor pertanian yang didominasi oleh sub sektor perikanan. Namun demikian pada beberapa sub sektor masih belum menunjukkan tingkat pertumbuhan yang signifikan diantaranya sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan. Tingkat kemakmuran penduduk di Kota Tual terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh peningkatan Pendapatan Regional Perkapita Penduduk Kota Tual sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Selain kontribusi peran pemerintah daerah Kota Tual yang begitu besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009-2012, dukungan peran masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan serta peran pelaku usaha selaku



pemilik modal dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah Kota

Tual juga turut berkontribusi besar bagi pengembangan wilayah Kota Tual.

2. Keberhasilan penyelenggaraan pengembangan wilayah di Kota Tual sangat ditentukan oleh intervensi berbagai kebijakan dari Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009-2012 yang didasari pada upaya mengatasi berbagai kendala utama yakni keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan data dan informasi. Keterbatasan ini merupakan kondisi awal Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara. Intervensi kebijakan pengembangan wilayah dalam mengatasi berbagai kendala utama dimaksud meliputi:

a. Kebijakan pengelolaan anggaran;

Kebijakan pengelolaan anggaran atau keuangan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual terdiri dari

1) Pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009-2012.

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Usaha-usaha penggalan pendapatan daerah ditujukan untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program-program pengembangan wilayah yang telah direncanakan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah yang dilakukan antara lain:

a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD.

- b) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan.
  - c) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD.
  - d) Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional.
- 2) Pengelolaan belanja daerah tahun 2009-2012

Kaitannya dengan pengembangan wilayah maka kebijakan pengelolaan Belanja Daerah ditujukan untuk:

a) Peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi:

- (1) Pemberdayaan masyarakat terutama dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan dan untuk mengurangi beban hidup masyarakat melalui program dan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, PPMM serta program dan kegiatan pengentasan kemiskinan lainnya yang tersebar pada SKPD yang mengelola berbagai urusan wajib dan pilihan (Lampiran 8). Upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual juga didukung komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah Kota Tual berupa Surat Keputusan Walikota Tual Nomor 08.d Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual (Lampiran 9).
- (2) Perbaiki struktur perekonomian yang dapat menunjang penciptaan daya saing melalui pengalokasian anggaran pada

sektor-sektor unggulan yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan visi pembangunan daerah.

**b) Pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat meliputi:**

- (1) Rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pelayanan masyarakat. Alokasi anggaran ditujukan bagi pembangunan infrastruktur dasar baik pembangunan jaringan listrik, air bersih, pemukiman, sanitasi, maupun komunikasi.
- (2) Peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (3) Mendukung pemulihan sistem transportasi yang handal dalam menunjang pengembangan wilayah terutama di kawasan pulau-pulau kecil dan terluar dalam rangka peningkatan aksesibilitas. Alokasi anggaran dimaksudkan untuk memperbaiki sarana transportasi khususnya perbaikan jalan dan jembatan di berbagai wilayah yang menunjang peningkatan produksi. Selain itu pengalokasian anggaran juga untuk mendukung kelancaran perhubungan perintis di wilayah terisolasi melalui jaringan laut.

**b. Kebijakan pengembangan sumber daya manusia;**

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan wilayah di Kota Tual dibagi menjadi dua bagian yakni kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia masyarakat. Kebijakan yang ada bertumpu pada program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota



Tual. Selain itu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi percepatan pengembangan wilayah, Pemerintah Daerah Kota Tual melakukan pendekatan manajemen kepegawaian yang beorientasi mulai dari proses rekrutmen CPNS sampai dengan penempatan dalam jabatan sesuai keahlian teknis terkait pengembangan wilayah. Berbagai terobosan kebijakan pengembangan sumber daya manusia telah memberikan kontribusi positif dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga telah mengantarkan Kota Tual sebagai terbaik peringkat kedua di Provinsi Maluku selama tiga tahun berturut-turut setelah Kota Ambon.

c. Kebijakan pengembangan data dan informasi;

Bentuk intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual terhadap pengembangan data dan informasi yaitu:

- 1) Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara intensif, rutin dan terus menerus serta melakukan pengolahan data dan informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembuatan perkiraan-perkiraan statistik maupun proyeksi-proyeksi dengan menggunakan data statistik yang tidak lengkap maupun kurang dapat dipercaya.
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) melalui penyediaan data daerah yang baik dan berakurasi serta mudah dicari pada waktu yang digunakan, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui

pelatihan aplikasi SIG, dan penyediaan perangkat berupa software dan hardware untuk pengoperasian sistem informasi.

## B. Saran

Berdasarkan deskripsi yang tertuang pada bagian kesimpulan, maka dirumuskan beberapa saran penelitian sebagai berikut.

1. Kontribusi sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan masih rendah dan laju pertumbuhannya lambat, sehingga sebaiknya perlu adanya perhatian pemerintah daerah Kota Tual melalui pengembangan dan peningkatan zona-zona komoditas tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan di Kota Tual, peningkatan kualitas hasil produksi tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan melalui penyediaan bibit unggulan dalam jumlah yang memadai serta peningkatan pemasaran produk tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan.
2. Bahwa keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual sangat tergantung dari intervensi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tual dalam bentuk kebijakan pengelolaan anggaran, kebijakan pengembangan sumber daya manusia maupun kebijakan pengembangan data dan informasi. Agar pengembangan wilayah ini berkelanjutan dan berkesinambungan dan terus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka sebaiknya perlu adanya perhatian bersama semua pelaku pengembangan wilayah di Kota Tual untuk melakukan beberapa tindakan sebagai berikut.
  - a. Aspek pengelolaan anggaran.

- 1) Perlu adanya disiplin anggaran yaitu ditaatinya penggunaan anggaran yang dialokasikan bagi suatu program pengembangan wilayah, hanya dapat dimanfaatkan bagi program itu dengan tepat jumlah dan tepat sasaran. Tepat jumlah dimaksudkan yaitu adanya fleksibilitas dalam batas-batas tertentu mengingat dalam pelaksanaan suatu program pengembangan wilayah mungkin ada perubahan-perubahan kualitatif maupun kuantitatif untuk menyesuaikan dengan suatu kondisi yang berkembang pada periode pelaksanaan yang pada akhirnya mengakibatkan berubahnya biaya apakah menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil dari yang direncanakan.
- 2) Pengalokasian anggaran perlu diprioritaskan kepada program-program atau proyek-proyek yang cepat memberikan hasil atau manfaat agar tersedia modal bagi pelaksanaan pembangunan lainnya daripada kepada proyek-proyek yang memerlukan waktu lama untuk memberikan manfaat walaupun menjanjikan keuntungan lebih besar.
- 3) Perlu adanya peningkatan dan penguatan peran Bappeda Kota Tual sebagai sinkronisator program-program pengembangan wilayah lintas sektor/satuan kerja dalam menyusun rencana pengembangan yang konsisten agar tidak terjadi tumpang tindih, inefisiensi, serta menciptakan sinergitas antar program dan kegiatan lintas sektor/satuan kerja.
- 4) Perlu adanya pemahaman bersama dari masing-masing Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual terhadap tugas dan tanggung jawabnya agar pembahasan APBD Kota Tual dapat terlaksana sesuai waktu yang telah ditetapkan.



b. Aspek pengembangan sumber daya manusia.

- 1) Bahwa pengembangan sumber daya manusia jangan hanya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas semata namun juga diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku pengembangan wilayah sehingga terbentuk komitmen yang kuat dalam membangun Kota Tual saat ini dan akan datang.
- 2) Bagi PNS yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai bidang kerjanya pada SKPD yang ditempatinya saat ini namun memiliki pengalaman kerja yang lama pada SKPD tersebut dan telah mahir, terampil dan sangat memahami seluk beluk pekerjaannya karena telah dibekali dengan berbagai pelatihan teknis, perlu dipertimbangkan untuk tidak dimutasikan guna menjaga kesinambungan dan mendukung kinerja SKPD dimaksud.

c. Aspek pengembangan data dan informasi.

- 1) Guna mendukung pelaksanaan pengembangan wilayah sebagai bagian dari pembangunan daerah perlu didukung dengan data yang akurat dan terkini. Untuk itu setiap satuan kerja perangkat daerah perlu menyusun profil SKPD karena sesuai kondisi riil masih banyak SKPD yang tidak memiliki profil sebagai sumber data. Selain itu perlu diutus beberapa PNS khususnya yang menangani perencanaan SKPD untuk magang pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda Kota Tual.
- 2) Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat penting bagi pengembangan suatu wilayah, karena SIG mampu menyajikan aspek spasial (keruangan) dari fenomena atau fakta yang dikaji. Untuk itu perlu terus dilakukan

pengembangan pengaplikasiannya berupa penyediaan aplikator SIG dalam jumlah yang memadai baik kualitas maupun kuantitas yang diperoleh dari pelatihan serta penyediaan kelengkapan perangkat baik software dan hardware dalam jumlah yang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirin, T. M. (1986). *Menyusun rencana penelitian suatu pendekatan proporsional*. Jakarta: Rajawali.
- Ardianto, E. (2010). *Metodologi penelitian untuk public relations: Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S. (2000). *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bohari, R. (2012). *Strategi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan di perairan pantai Makassar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Bratakusumah, D. S. & Solihin, D. (2002). *Otonomi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. (1994). *Research design: Qualitative and quantitative approach*. Oslo: Sage Publications.
- Damamain, S. (2012). Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan pengelolaan rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara. *Tesis*, Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Dhenov. (2007). *Pengembangan wilayah (deui)*. Diambil 15 Agustus 2012, dari situs [World Wide Web](http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pengembangan-wilayah-deui.html)  
<http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pengembangan-wilayah-deui.html>
- Dwidjowijoto, R. N. (2000). *Otonomi daerah: Desentralisasi tanpa revolusi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Haris, S., Pabottinggi, M., Hidayat, S., Salamm, A., Ratnawati, T. & Romli, L. (2004). *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Harmadi, S. H. B. (2011). *Kebijakan pengembangan wilayah dan perkotaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Haryadi, H. (2012). *Analisis kebijakan pengembangan wilayah Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat*. *Tesis*, Lampung: Universitas Lampung.
- Hasibuan, A. (2002). *Otonomi daerah peluang dan tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.



- Hogwood, B. W. & Gunn, L. A. (1985). *Policy analysis for the real world*. Oxford: Oxford University Press.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Ikhsan, M., Santosa, A. & Harmanti. (2011). *Administrasi keuangan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irawan, P. (2010). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iswanto, Y. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kismartini, Suwitri, S., Santoso, S., Purnaweni, H. & Yuwono, T. (2011). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kompasiana. (2012). Republik pemekaran . Diambil 12 Desember 2012, dari situs World Wide Web <http://www.kompasiana.com/topics/republikpemekaran>
- Kumorotomo, W. & Margono, S. A. (1994). *Sistem informasi manajemen dalam organisasi-organisasi publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyanto, H. R. (2008). *Prinsip-prinsip pengembangan wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Myrdal, G. (1968). *Asian drama: An inquiry into the poverty of nations*. London: Allen Lane.
- Nawawi, H. (1994). *Metode penelitian ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurana, A. C. & Muta'ali, L. (2010). Analisis dampak kebijakan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan Ciayumajakuning Provinsi Jawa Barat. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Nurcholis, H. (2007). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Parsons, W. (2008). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pratikno (2007). *Policy paper: Usulan perubahan kebijakan penataan daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Puspen Depdagri. (2011). 80% pemekaran wilayah gagal. Diambil 15 Agustus 2012, dari situs World Wide Web <http://www.puspen.depdagri.go.id>
- Putra. (2009). Konsep pengembangan wilayah dalam perencanaan pembangunan. Diambil 2 Nopember 2012, dari situs World Wide Web <http://putracenter.net/2009/01/21/konsep-pengembangan-wilayah-dalam-perencanaan-pembangunan/>
- Putra, R. A. S. (2006). Pemekaran daerah di Indonesia: Kasus di wilayah penelitian IRDA. Makalah disajikan pada *Seminar Internasional Percik ke-7, Juli 2006*. Salatiga.
- Sadyohutomo, M. (2008). *Manajemen kota dan wilayah realita dan tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Safi'i, H. M. (2009). *Perencanaan pembangunan daerah: Kajian dan aplikasi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Malang: Averroes Press.
- Sarundajang, S. H. (1999). *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saryono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Silalahi, U. (2010). *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, T. (1996). *Administrasi birokrasi dan pelayanan publik*. Jakarta: Nimas Multima.
- Suyanto, B. & Sutinah (2010). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, I. K., Tanjung, D. & Modeong, S. (1999). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsuar. (2003). *Dampak dan manfaat alokasi anggaran pembangunan sektoral dalam APBD terhadap masyarakat dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Thoha, M. (2011). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Valiani. (2012). Kebijakan fiskal. Diambil 18 Juni 2012, dari situs World Wide Web <http://valiani-softskill.blogspot.com/2012/10/kebijakan-fiskal-fiskal-adalah.html>
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan publik: Teori dan proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yudoyono, B. (2003). *Otonomi daerah desentralisasi dan pengembangan SDM aparatur pemda dan anggota DPRD*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## B. Referensi/Dokumen

- Badan Kepegawaian Daerah Kota Tual. (2012). *Database kepegawaian daerah kota Tual Tahun 2012*. Tual: Badan Kepegawaian Daerah, Kota Tual.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual. (2013). *Wilayah administrasi pemerintahan kota Tual tahun 2013*. Tual: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kota Tual.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. (2012). *Anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Tual tahun 2009-2012*. Tual: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Tual.
- Bappeda, Litbang dan PMD Kota Tual. (2009). *Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota Tual tahun 2009-2013*. Tual: Bappeda, Litbang dan PMD, Kota Tual.
- Bappeda, Litbang dan PMD Kota Tual. (2012). *Dokumen rencana aksi percepatan penanggulangan kemiskina kota Tual*. Tual: Bappeda, Litbang dan PMD, Kota Tual.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. (2008). *Maluku Tenggara dalam angka tahun 2008*. Langgur: BPS, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. (2012). *Tual dalam angka tahun 2012*. Langgur: BPS, Kabupaten Maluku Tenggara.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara. (2012). *PDRB Kota Tual menurut lapangan usaha*. Langgur: BPS, Kabupaten Maluku Tenggara.



- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual. (2012). *Profil dinas kelautan dan perikanan kota Tual*. Tual: Dinas Kelautan dan Perikanan, Kota Tual.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual. (2012). *Profil dinas kependudukan dan catatan sipil kota Tual* . Tual: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tual.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual. (2012). *Sejarah kota Tual: Vuut an mehe ngivun manut an mehe tilur*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual. (2012). *Profil dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kota Tual* . Tual: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kota Tual.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual. (2012). *Profil dinas pertanian dan kehutanan kota Tual* . Tual: Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kota Tual.
- Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. (2003). Pengembangan wilayah dan penataan ruang di Indonesia: Tinjauan teoritis dan praktis. Makalah disajikan pada *Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) 1 September 2003*. Yogyakarta.
- Inspektorat Kota Tual. (2012). *Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Tual tahun 2012*. Tual: Inspektorat, Kota Tual.
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 35/KepMen-KP/2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan (2011).
- Keputusan Walikota Tual No. 106 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah Kota Tual (2011).
- Peraturan Pemerintah No. 129 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (2000).
- Peraturan Daerah Kota Tual No. 05 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain dalam Wilayah Kota Tual (2009).
- Peraturan Daerah Kota Tual No. 03 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tual 2010-2030 (2010).
- Peraturan Walikota Tual No. 05 tentang Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan (2012).
- Undang-Undang RI No. 32 tentang Pemerintahan Daerah (2004).
- Undang-Undang RI No. 31 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (2007).

## Lampiran 1

**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TUAL TAHUN  
2009-2013**

- a. Visi: “Terwujudnya Kota Tual yang Aman, Sehat, Berdaya Saing, dan Sejahtera yang Berbasis Sumber daya Kelautan”.

Visi di atas mengandung pengertian dari beberapa kata kunci antara lain:

- 1) **Aman**, berarti bahwa kehidupan masyarakat Kota Tual senantiasa diliputi rasa aman dan damai melalui peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur, budaya, dan agama.
- 2) **Sehat**, berarti bahwa pembangunan kesehatan merupakan bentuk investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan meningkatkan derajat kesehatan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
- 3) **Berdaya Saing**, berarti bahwa pelaksanaan pembangunan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, meningkatkan infrastruktur yang maju, melaksanakan reformasi di bidang hukum dan aparatur pemerintah daerah, serta memperkuat perekonomian berbasis sumber daya keunggulan lokal.
- 4) **Sejahtera**, berarti bahwa pembangunan Kota Tual 5 (lima) tahun ke depan dilaksanakan terutama untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang ditempuh melalui pembangunan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas serta semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat.

- b. Misi:

- 1) Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, damai, dan demokratis dilandasi semangat religius, kebersamaan, keragaman, serta nilai-nilai luhur budaya;
- 2) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing berbasis kelautan dan perikanan, pariwisata, dan jasa melalui pengelolaan sumberdaya kepulauan secara terpadu dan berkelanjutan (*sustainable development*);
- 4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat berbasis kepulauan.

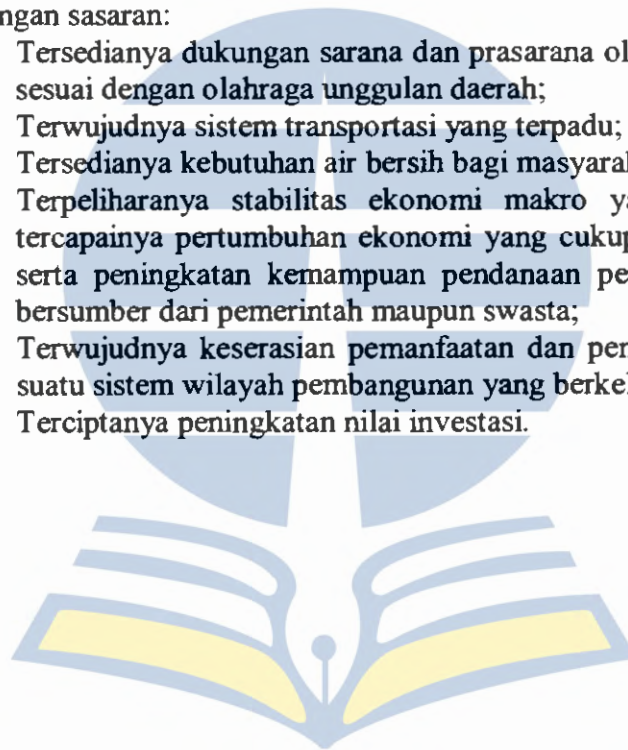
c. Tujuan dan Sasaran:

- 1) Tujuan meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran:
  - a) Terwujudnya daerah yang aman dan tertib;
  - b) Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik;
  - c) Terciptanya keadilan dan penegakan hukum;
  - d) Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah dengan berbagai peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan provinsi.
- 2) Tujuan meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan sasaran:
  - a) Terwujudnya masyarakat yang religius;
  - b) Terpeliharanya budaya dan kearifan lokal;
  - c) Terwujudnya masyarakat yang berbudaya dan beretika.
- 3) Tujuan merevitalisasi sektor pertanian (kelautan dan perikanan), pariwisata dan jasa untuk mendorong pengamanan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran:
  - a) Terwujudnya iklim usaha yang kondusif;
  - b) Terwujudnya peningkatan produktivitas UMKM;
  - c) Terbukanya peningkatan proporsi usaha kecil formal;
  - d) Terpeliharanya stabilitas harga barang yang didukung oleh meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan distribusi barang;
  - e) Tersedianya industri pengolahan yang berbasis potensi;
  - f) Terwujudnya Peningkatan PAD dari sektor-sektor potensial;
  - g) Terwujudnya masyarakat yang sadar wisata;
  - h) Terwujudnya ketahanan pangan dan kemandirian pangan daerah;
  - i) Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan terampil.
- 4) Tujuan meningkatkan partisipasi pada semua kalangan masyarakat khususnya perempuan dalam proses pembangunan sejak tahap perencanaan hingga pengawasan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan sasaran:
  - a) Terwujudnya ruang partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan proses pembangunan;



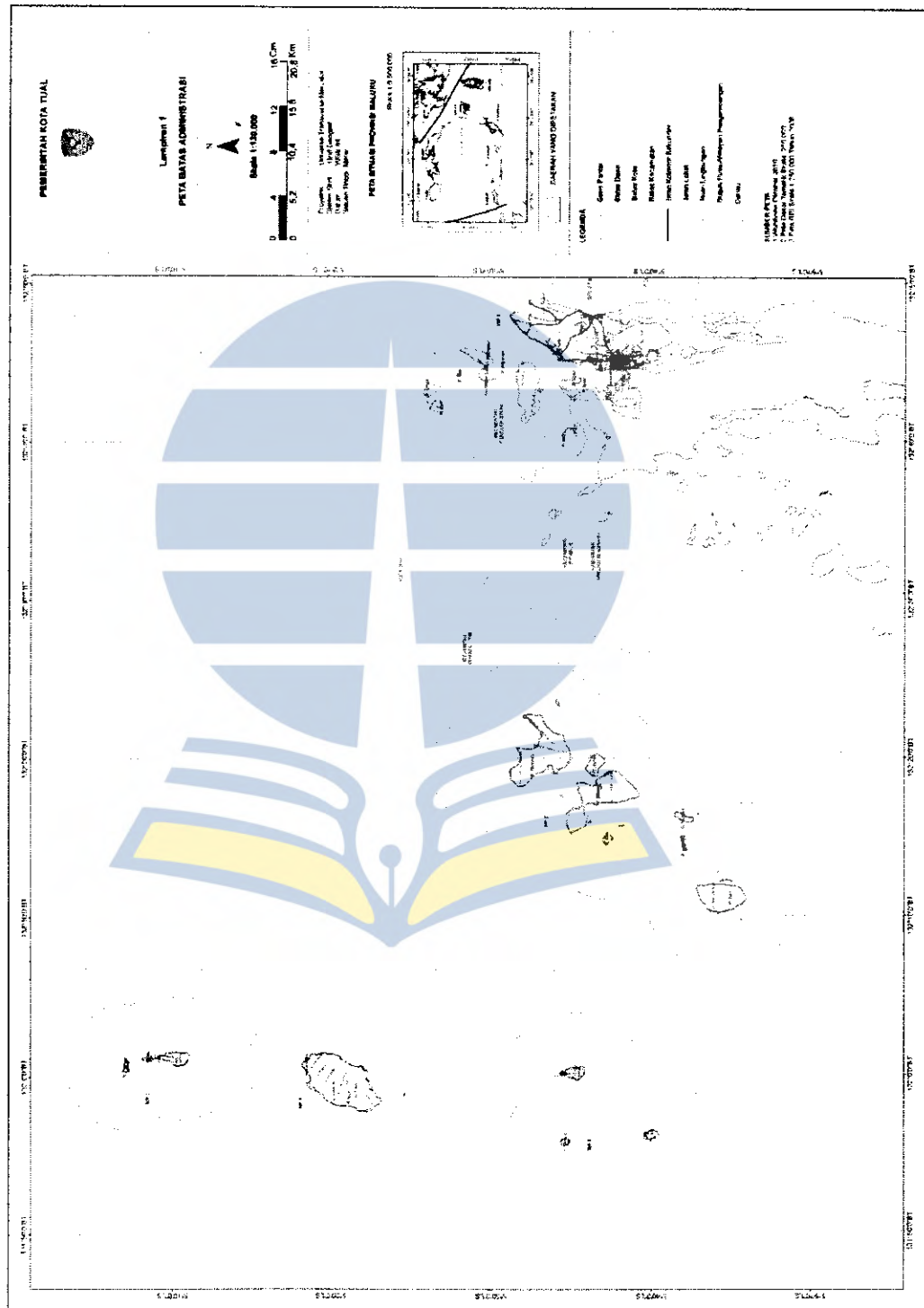
- b) Terwujudnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
  - c) Terwujudnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
  - d) Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
- 5) Tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta pelayanan birokrasi (pelayanan publik) kepada masyarakat, dengan sasaran:
- a) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pelayanan publik;
  - b) Terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
  - c) Terwujudnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan;
  - d) Terwujudnya sistem informasi administrasi kependudukan yang berkelanjutan;
  - e) Terciptanya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah desa;
  - f) Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu;
  - g) Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata.
- 6) Tujuan menurunnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, dengan sasaran:
- a) Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha;
  - b) Terwujudnya penurunan presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.
- 7) Tujuan mengurangi disparitas antar wilayah, dengan sasaran:
- a) Terwujudnya pembangunan daerah yang merata dan seimbang;
  - b) Terwujudnya pemerataan akses informasi dan komunikasi antar wilayah;
  - c) Terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis;
  - d) Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan.
- 8) Tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, dengan sasaran:
- a) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas;
  - b) Terciptanya kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat serta prestasi olahraga;
  - c) Terwujudnya masyarakat yang sehat;
  - d) Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas;
  - e) Terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil;
  - f) Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

- 9) Tujuan memperbaiki mutu lingkungan hidup, sistem pengelolaan sumber daya alam serta mitigasi bencana, dengan sasaran:
- Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial;
  - Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi, jaringan jalan, jaringan irigasi; perumahan, permukiman, energi dan ketenagalistrikan;
  - Terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu dan berkelanjutan;
  - Terwujudnya lingkungan yang bersih dan Stabil;
  - Terwujudnya sistem pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam secara terpadu yang berbasis mitigasi bencana.
- 10) Tujuan meningkatkan infrastruktur sosial, ekonomi, dan pemerintahan, dengan sasaran:
- Tersedianya dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah;
  - Terwujudnya sistem transportasi yang terpadu;
  - Tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat;
  - Terpeliharanya stabilitas ekonomi makro yang dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta;
  - Terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan;
  - Terciptanya peningkatan nilai investasi.



Lampiran 2

### PETA WILAYAH KOTA TUAL





## Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA**

***Ditujukan kepada: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tual dan Anggota DPRD Kota Tual***

1. Kontribusi beberapa sektor dan sub sektor terhadap perekonomian wilayah Kota Tual terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009-2012. Hal ini sekaligus mencerminkan kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tual. Menurut Bapak selaku unsur perencanaan pembangunan daerah, hal apakah yang paling mendasari peningkatan kontribusi beberapa sektor dan sub sektor ini?
2. Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak lihat selama ini?
3. Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat?
4. Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat diperlukan guna menunjang perencanaan program dan kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan data dan informasi?

5. Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?
6. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan infrastruktur (transportasi, komunikasi, jaringan listrik dan air bersih, perumahan dan pemukiman, sanitasi, irigasi, dan lainnya). Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur secara memadai baik kuantitas (jumlahnya) maupun kualitasnya di Kota Tual?
7. Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sementara di sisi lain pengembangan infrastruktur tetap harus dilakukan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah. Bagaimana kebijakan Bapak menyikapi hal ini?
8. Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa di tahun 2012 sub sektor listrik dan air bersih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonominya. Menurut Bapak, apa penyebabnya?
9. Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak lihat selama ini?
10. Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan wilayah. Apa kebijakan yang Bapak ambil guna mengatasi permasalahan ini?

11. Berdasarkan hasil evaluasi Departemen Keuangan (Depkeu) terhadap 145 daerah otonomi baru menunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Mayoritas (86%) sumber pendapatan APBD kabupaten/kota dan 53% APBD provinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan Depkeu. Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan biaya pembangunan cuma 21% (Puspen Depdagri, 2011). Bagaimana konsepsi penganggaran daerah Kota Tual terkait permasalahan di atas sehingga tujuan pokok perimbangan keuangan yakni mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya antarwilayah di Kota Tual dapat terwujud?
12. Apa saja permasalahan yang masih ditemui dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tual hingga tahun 2012?
13. Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan wilayah. Hal ini juga yang menyebabkan masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Guna mengatasi hal ini, apa kebijakan yang telah Bapak ambil?
14. Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mengembangkan pendidikan masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual?



15. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan infrastruktur diantaranya moda transportasi dan komunikasi dalam rangka membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi agar dapat menjangkau wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual sebagai upaya membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat?
16. Sektor perdagangan di Kota Tual merupakan sektor andalan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013. Bagaimana upaya Bapak dalam mendukung sektor perdagangan di Kota Tual?
17. Dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, ketersediaan SDM aparatur yang memadai menjadi modal utama percepatan pengembangan wilayah tersebut. Apa upaya yang telah Bapak lakukan dalam penyediaan SDM aparatur guna optimalnya pengembangan wilayah Kota Tual?
18. Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya yang telah Ibu lakukan dalam mengembangkan kesehatan masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual?
19. Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah masalah kemiskinan. Apa saja upaya khusus yang telah Ibu lakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual?

20. Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya?
21. Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya?
22. Ketersediaan sumberdaya alam merupakan modal bagi pengembangan wilayah. Sumberdaya alam pertanian pada beberapa kecamatan seperti Pulau-pulau Kur Tayando Tam, dan Kecamatan Dullah Utara cukup potensial untuk dikembangkan guna memperkaya sumber pangan lokal. Apa saja upaya yang Bapak lakukan dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian yang ada tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?
23. Sebagai Wilayah Bahari, Kota Tual tentunya kaya akan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mengembangkan wilayah pesisir serta potensi kelautan dan perikanan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual?
24. Apa upaya lainnya yang telah Bapak lakukan guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota Tual agar terus mampu berkontribusi bagi perekonomian wilayah Kota Tual?
25. Pengembangan industri baik industri rumah tangga, kerajinan rakyat, industri kecil, menengah maupun besar termasuk industri pengolahan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Untuk itu diperlukan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor

- dan sub sektor industri di Kota Tual dengan tetap berorientasi pada potensi unggulan daerah setempat. Terhadap maksud tersebut, apa yang telah Bapak lakukan?
26. Kendala yang ditemui bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari sentra pemerintahan khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar yaitu tidak dapat mengakses pasar padahal memiliki kemampuan mengelola sumberdaya alam. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan untuk mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau kemampuan mengakses pasar serta mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum di Kota Tual?
27. Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Daerah Kota Tual. Dalam konteks pengembangan wilayah, apa upaya yang telah dilakukan Bapak guna mendorong percepatan pengembangan wilayah Kota Tual dari sektor pariwisata tersebut?
28. Penciptaan lapangan kerja produktif merupakan usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pengembangan wilayah didalam kerangka sosial. Tujuan utama bertumpu pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah mendasar pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Ibu guna menciptakan lapangan kerja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual?
29. Faktor penghambat pengembangan wilayah diantaranya masalah ketahanan pangan karena erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Apa saja upaya



yang telah Bapak lakukan dalam rangka mengatasi masalah ketahanan pangan di Kota Tual sebagai upaya lebih lanjut dalam mendukung pengentasan kemiskinan?

30. Sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor penggalian berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Sesuai data yang ada, sub sektor ini cukup berkontribusi bagi perekonomian wilayah Kota Tual. Disisi lain, pengembangan wilayah sangat bertumpu pada tersedianya lingkungan yang lestari, dan ini perlu mendapat perhatian khusus dari semua pelaku pengembangan wilayah guna menjaga keseimbangan dan menjamin kesinambungan pembangunan pada suatu wilayah. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari dan terus dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat setempat?
31. Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD Kota Tual) juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru?
32. Apa saja masalah yang menurut anda masih terjadi saat ini dan mengganggu upaya pengembangan wilayah Kota Tual?

**Ditujukan kepada: Tokoh Masyarakat dan Pelaku Usaha.**

1. Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan

tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?

Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

2. Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat setempat?
3. Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?
4. Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Saudara sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?
5. Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Drs. B. A. Bandjar, M.Si  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual  
Tempat Wawancara : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 5 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Kontribusi beberapa sektor dan sub sektor terhadap perekonomian wilayah Kota Tual terus mengalami peningkatan sejak tahun 2009-2012. Hal ini sekaligus mencerminkan kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Daerah Kota Tual. Menurut Bapak selaku unsur perencana pembangunan daerah, hal apakah yang paling mendasari peningkatan kontribusi beberapa sektor dan sub sektor ini?

Jawaban : Peningkatan kontribusi sektor dan sub sektor terhadap perekonomian Kota Tual sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kota Tual. Kondisi ketersediaan infrastruktur dasar yang lengkap di Kota Tual juga telah menjadi pertimbangan ditambahkannya Kota Tual sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan Maluku pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

2. Pertanyaan : Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak lihat selama ini?

Jawaban : Peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual sangat besar. Peran ini diwujudkan dalam bentuk kemitraan yang serasi, selaras, dan seimbang, dengan tujuan utamanya untuk menciptakan keberdayaan. Secara nyata, peran masyarakat ini ditunjukkan berupa penyediaan SDM baik berupa tenaga terdidik dan terlatih, penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur, maupun sebagai pengawas



jalannya program dan kegiatan setiap SKPD, sedangkan peran pelaku usaha/pemilik modal di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya berupa pemasok jasa, keahlian, dana maupun material yang diperlukan dalam pengembangan wilayah.

3. **Pertanyaan** : Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

**Jawaban** : Kondisi sumber daya manusia pada awal terbentuknya daerah otonom baru Kota masih sangat terbatas. Sumber daya manusia aparatur maupun masyarakat dalam menunjang pengembangan wilayah Kota Tual sangat tidak memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pengembangan SDM. Kebijakan pengembangan SDM aparatur telah dilaksanakan secara bertahap dalam rangka penguatan pelayanan publik dalam bidang pengembangan wilayah. Fokus pengembangan SDM tingkat pertama adalah penguatan kemampuan aparatur di bidang Sistem Informasi Geografis (SIG) yang telah dilaksanakan dan direncanakan pada tahun 2014 akan dilaksanakan tahapan selanjutnya yaitu pengembangan SDM tingkat lanjut di bidang survey dan pemetaan.

4. **Pertanyaan** : Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat diperlukan guna menunjang perencanaan program dan kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan data dan informasi?

**Jawaban** : Ketersediaan data dan informasi pada awal terbentuknya daerah otonom baru Kota juga masih sangat terbatas bahkan hampir tidak didapatkan pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kota Tual. Pada tahun 2008 dan 2009, hampir tidak ada data dan informasi pada Sub Bidang Data dan Informasi Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah yang merupakan unit kerja sentral data dan informasi pemerintah daerah Kota Tual khususnya data dan informasi terkait penyelenggaraan pembangunan. Hal ini menjadi kendala utama dan menjadi dasar perlu adanya kebijakan pengembangan data dan informasi dalam pengembangan wilayah Kota Tual.

Guna kelengkapan data dan informasi dalam rangka percepatan pengembangan wilayah Kota Tual maka kebijakan yang telah diambil yaitu:

1. Penertiban penyiapan data regional oleh BPS dan lembaga-lembaga lain yang memerlukan melalui pengumpulan data dan informasi secara intensif, rutin dan terus menerus serta melakukan pengolahan data dan informasi yang terkumpul secara periodik dan profesional. Produk data dan informasi dapat diakses pada profil SKPD. Selain itu pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara profesional melalui penerapan E-Database dan E-Monev.
2. Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG), yang turut mendorong tersedianya dokumen perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) sebagai salah satu dokumen induk perencanaan. Sebagai kelanjutannya telah direncanakan pada tahun 2014 akan diadakan penyusunan dokumen turunan dari RTRW berupa penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah strategis yang secara bertahap akan disusun pada wilayah:
  - a. RDTR Kawasan strategis Pulau Dullah.
  - b. RDTR Kawasan strategis Perkotaan.
  - c. RDTR Kawasan strategis Pulau-pulau Tayando Tam.
  - d. RDTR Kawasan strategis Pulau-pulau Kur.

5. **Pertanyaan** : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

**Jawaban** : Permasalahan yang kami masih temukan yaitu pada kegiatan Asistensi rencana kerja dan anggaran (RKA) yang selama ini masih dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual. Peran Bappeda, Litbang dan Penanaman Modal Daerah sebagai unsur perencanaan daerah tidak dilibatkan samasekali. Akibatnya, masih didapatkan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah yang tumpang tindih dan tidak sinkron dengan tujuan pengelolaan anggaran bagi pengembangan wilayah Kota Tual. Orientasi asistensi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual hanya sebatas melihat besar kecilnya anggaran yang diusulkan bagi suatu kegiatan tanpa melihat maksud dan tujuan kegiatan itu secara luas. Permasalahan lainnya yaitu pengembangan sumber daya

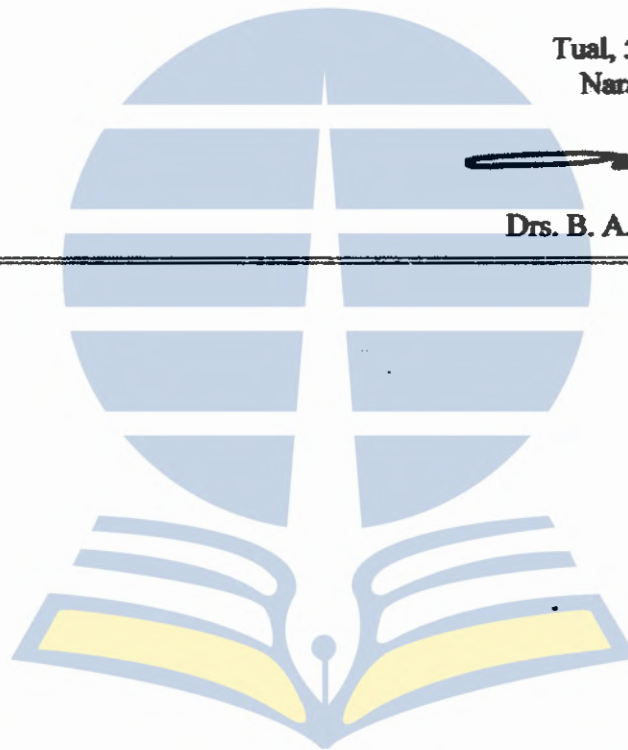
manusia belum diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku pengembangan wilayah, belum semua SKPD memiliki profil SKPD sebagai basis data pengembangan sektor/SKPD, belum semua pejabat yang menangani perencanaan mengikuti magang pengaplikasian E-Database dan E-Monev pada Bappeda, Litbang, dan Penanaman Modal Daerah Kota Tual, dan kualitas dan kuantitas tenaga pengelola SIG masih sangat terbatas begitupun dengan perangkat pengaplikasiannya

Tual, 5 Juni 2013  
Narasumber,



---

Drs. B. A. Bandjar, M.Si





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. Syukri Muhammad, MT  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 6 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan infrastruktur (transportasi, komunikasi, jaringan listrik dan air bersih, perumahan dan pemukiman, sanitasi, irigasi, dan lainnya). Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur secara memadai baik kuantitas (jumlahnya) maupun kualitasnya di Kota Tual?

Jawaban : Dalam rangka pengembangan infrastruktur secara memadai baik jumlah maupun kualitasnya di Kota Tual, prioritas kami tujukan bagi wilayah yang sebelum pemekaran tidak tersentuh oleh pembangunan atau tidak meratanya pembangunan ke wilayah tersebut seperti di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam. Sejak tahun 2009-2012 telah banyak infrastruktur terbangun. Kami mengalokasikan pembangunan tersebut melalui program dan kegiatan tahunan dengan sebelumnya telah memperhitungkan besaran manfaat yang akan diperoleh dari masyarakat di Kota Tual.

2. Pertanyaan : Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan anggaran yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sementara di sisi lain pengembangan infrastruktur tetap harus dilakukan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah. Bagaimana kebijakan Bapak menyikapi hal ini?

Jawaban : Kendala keterbatasan anggaran dalam pengembangan infrastruktur pengembangan wilayah disiasati oleh kami dengan cara menghitung atau menentukan dengan baik dan cermat volume maupun rencana anggaran dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program dan kegiatan tahunan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Selain itu diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang dipandang atau diperkirakan dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang cepat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. **Pertanyaan** : Dalam pembangunan infrastruktur dibutuhkan adanya koordinasi antar-sektor atau antar SKPD terkait sehingga sinergi dalam pelaksanaannya. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan selama ini dan apa dampaknya?

**Jawaban** : Keterbatasan infrastruktur kami siasati keberadaannya melalui koordinasi dan sinkronisasi secara rutin dengan berbagai SKPD terkait agar tercipta sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD. Infrastruktur yang merupakan kewenangan SKPD tertentu, pembangunan fisiknya menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum namun didukung dengan dana bersama SKPD terkait tersebut.

4. **Pertanyaan** : Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa di tahun 2012 sub sektor listrik dan air bersih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonominya. Menurut Bapak, apa penyebabnya?

**Jawaban** : Kita ketahui bersama bahwa pengembangan wilayah Kota Tual berlangsung pesat selama kurun waktu tahun 2009-2012. Berbagai sektor maupun sub sektor turut berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan wilayah Kota Tual ini. Namun diakui bahwa ada beberapa sub sektor yang mengalami perlambatan dalam laju pertumbuhan ekonominya diantaranya sub sektor tanaman pangan, peternakan, kehutanan serta sub sektor listrik dan air bersih. Perlambatan sub sektor listrik dan air bersih karena belum semua desa dan rumah tangga di Kota Tual terlayani listrik PLN, begitupun dengan pelayanan air bersih PDAM yang baru menjangkau desa-desa tertentu saja yang letaknya berdekatan dengan pusat perekonomian.

5. **Pertanyaan** : Peran masyarakat dan pelaku usaha (pihak swasta) sangat penting dalam pengembangan wilayah. Untuk Kota Tual, apa saja bentuk kontribusi peran masyarakat dan pelaku usaha bagi pengembangan wilayah Kota Tual yang Bapak lihat selama ini?

**Jawaban** : Kontribusi masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat dipungkiri sebagai daya dorong pengembangan wilayah di Kota Tual selama ini. Kontribusi masyarakat yang paling menonjol bagi pengembangan wilayah di Kota Tual yaitu kerelaan dalam membebaskan lahan yang dimilikinya untuk pembangunan berbagai infrastruktur

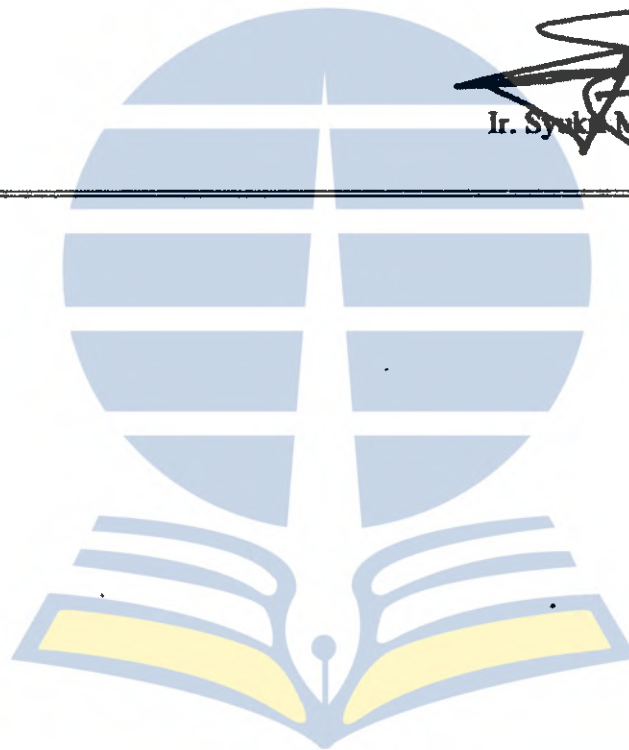
penunjang pembangunan, sedangkan peran pelaku usaha di Kota Tual juga telah memainkan peran pentingnya berupa pendistribusian tenaga-tenaga kerja yang trampil serta dana yang memadai bagi suatu kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah.

Tual, 6 Juni 2013  
Narasumber,



Ir. Syukri Muhammad, MT

---





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Effendi Renfaan, S.Com, M.Si  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual  
Tempat Wawancara : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 7 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan wilayah. Apa kebijakan yang Bapak ambil guna mengatasi permasalahan ini?

Jawaban : Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tual termasuk upaya pengembangan wilayah mengakibatkan tingginya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Tual. Kondisi ini dialami oleh Kota Tual sejak awal pemekaran hingga saat ini. Kondisi ini pula yang menunjukkan langsung bahwa Kota Tual masih tinggi celah fiskalnya atau masih besar ketergantungan pada pemerintah pusat dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahannya. Terhadap kondisi demikian, diperlukan adanya kebijakan terhadap pengelolaan anggaran yang ada. Upaya yang kami lakukan dalam mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengembangan wilayah yaitu memprioritaskan pengalokasian anggaran yang tersedia dengan persentase yang besar bagi program dan kegiatan belanja publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dasar serta pembangunan sarana dan prasarana sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kami juga menciptakan kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan pihak swasta selaku pemilik modal.

2. Pertanyaan : Berdasarkan hasil evaluasi Departemen Keuangan (Depkeu) terhadap 145 daerah otonomi baru menunjukkan bahwa sekitar 80% tidak berdampak positif, baik dalam konteks pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat. Mayoritas (86%) sumber pendapatan APBD kabupaten/kota dan 53% APBD provinsi dari dana perimbangan yang dialokasikan Depkeu. Sebagian besar alokasi APBD (58%) digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan biaya pembangunan

cuma 21% (Puspen Depdagri, 2011). Bagaimana konsepsi penganggaran daerah Kota Tual terkait permasalahan di atas sehingga tujuan pokok perimbangan keuangan yakni mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan aspirasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antardaerah khususnya antarwilayah di Kota Tual dapat terwujud?

**Jawaban** : Kaitannya dengan pengembangan wilayah Kota Tual, maka sebagai upaya mengakselerasi dan mensinergikan pengembangan wilayah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan mereka, kami mengambil kebijakan berupa pemberian porsi anggaran yang besar bagi program dan kegiatan belanja publik setiap SKPD. Pengalokasian anggaran belanja publik yang besar dibanding belanja aparatur kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Fokusnya ada pada pengelolaan belanja karena akar permasalahan ada pada kebijakan belanja daerah dimana persentase belanja publik lebih kecil dibanding belanja aparatur. Terhadap masalah tersebut segala dana yang ada baik yang bersumber dari APBD II, APBD I, maupun APBN, oleh kami diperuntukkan bagi sebesar-besarnya pelayanan publik. Hal ini dapat kami tunjukkan bahwa setiap tahun (2009-2012) anggaran belanja pembangunan publik mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibanding belanja aparatur/pegawai. Belanja perjalanan dinas pegawai terus kami tekan dan dilaksanakan jika benar-benar dibutuhkan saja dan bentuk belanja aparatur lainnya kami perlakukan yang sama.

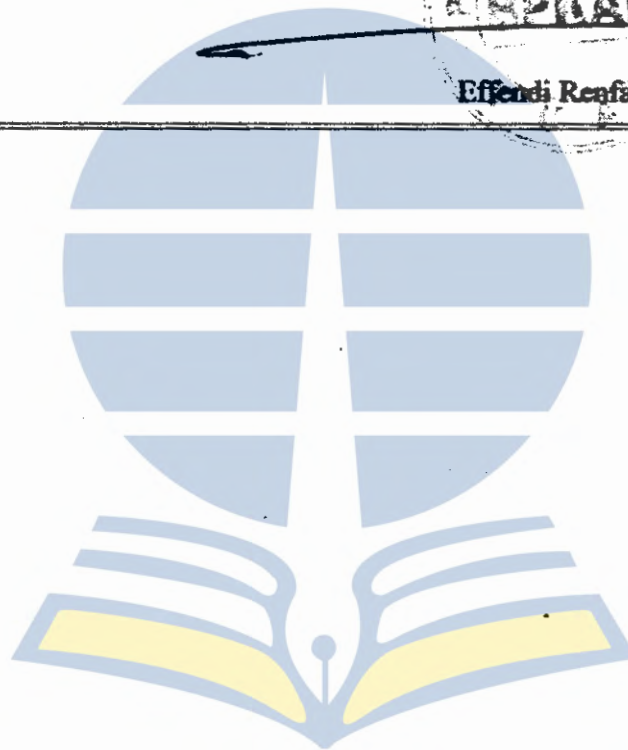
3. **Pertanyaan** : Apa saja permasalahan yang masih ditemui dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Tual hingga tahun 2012?

**Jawaban** : Pada beberapa SKPD masih ditemukan jumlah anggaran yang telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan untuk suatu program dan kegiatan sering mengalami pergeseran pemanfaatan atau tidak dilaksanakan oleh SKPD tersebut dan dialihkan untuk program kegiatan lainnya yang diusulkan masuk dalam APBD Perubahan. Hal ini tentu mengganggu perencanaan yang telah ada serta dapat saja mengganggu

setiap upaya kita dalam percepatan pengembangan wilayah Kota Tual untuk tahun-tahun mendatang. Belum lagi masih kami dapatkan dalam kapasitas kami selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual, beberapa kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Tual, 24 Juni 2013  
Narasumber,

Effendi Renfaan, S.Com, M.Si





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Arobi Bugis, SE  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 8 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :  
Pertanyaan : Keterbatasan anggaran merupakan kendala utama dalam pengembangan wilayah. Hal ini juga yang menyebabkan masih tingginya tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Guna mengatasi hal ini, apa kebijakan yang telah Bapak ambil?

Jawaban : Dalam rangka menunjang pengembangan wilayah Kota Tual serta mengurangi secara bertahap tingkat ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, maka pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Usaha-usaha penggalian pendapatan daerah ditujukan untuk menyediakan modal bagi pelaksanaan program-program pengembangan wilayah yang telah direncanakan. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Secara umum, upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah Kota Tual selama ini (2009-2012) yaitu mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD, meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan kegiatan pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD. Adapun intensifikasi pajak dan atau retribusi daerah dilakukan melalui: 1) penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah, 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah, 3) peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, 4) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah, 5) peningkatan

koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, 6) pengembangan sistem informasi Pendapatan Daerah secara on-line, dan 7) optimalisasi penagihan piutang pajak. Upaya ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dilakukan melalui: 1) pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah, 2) pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus, 3) pengkajian mekanisme pajak dan retribusi daerah untuk target group baru, 4) Peningkatan bagi hasil pajak, dan 5) penggalian potensi sumber-sumber Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : S. Nuhayanan, S.Pd, M.Si  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 10 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mengembangkan pendidikan masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual?

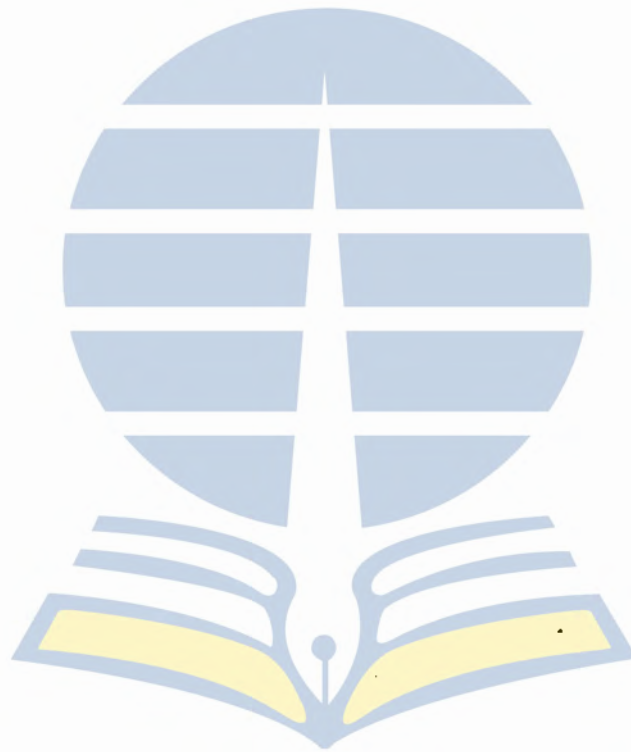
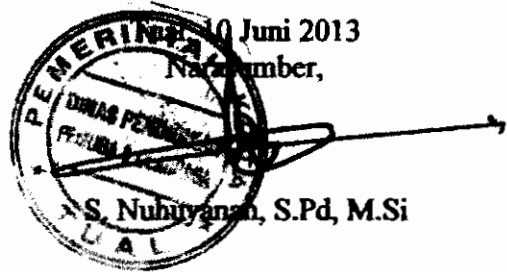
Jawaban : Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya di bidang pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Dinas Pendidikan Kota Tual telah melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kualitas pendidikan masyarakat di Kota Tual terutama yang tinggal di wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar Kota Tual. Upaya-upaya yang dilakukan ditujukan untuk mendukung kelangsungan proses belajar mengajar baik di tingkat pendidikan dasar, menengah bahkan tinggi melalui penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin dan berprestasi, mendukung kegiatan pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta penyediaan dan penyiapan tenaga terampil dan tenaga pendidik.

2. Pertanyaan : Kelengkapan atau ketersediaan data dan informasi sangat diperlukan guna menunjang perencanaan program dan kegiatan pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan data dan informasi?

Jawaban : Kebijakan yang telah kami ambil dalam pengembangan data dan informasi guna menunjang perencanaan program dan kegiatan pengembangan wilayah Kota Tual agar tepat sasaran yaitu melalui penyediaan profil SKPD yang memuat kondisi pengembangan pendidikan Kota Tual.



10 Juni 2013  
No. 100/2013  
S. Nuhiyannah, S.Pd, M.Si



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : A. Hamid Latar, SH  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 11 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah keterbatasan infrastruktur diantaranya moda transportasi dan komunikasi dalam rangka membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi agar dapat menjangkau wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual sebagai upaya membuka keterisolasian dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat?

Jawaban : Upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi dalam wilayah Kota Tual sudah sangat banyak dilakukan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan RI, telah dilakukan pembangunan infrastruktur sebagai berikut.

- Survey Induk Design (SID) Pelabuhan Laut di Tayando Yamtel dana bersumber dari APBD I Tahun Anggaran 2009 serta Survey Pelabuhan Penyeberangan di tayando Yamtel dana bersumber dari APBD I Tahun Anggaran 2010.
- Berdasarkan usulan dan koordinasi Pemerintah Kota Tual, maka Kementerian Perhubungan RI pada tahun 2010 dilakukan pembangunan Pelabuhan Laut Tayando Tahap I, serta dilanjutkan pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 ini yang sudah mencapai tahap keempat dan direncanakan selesai dibangun pada tahun 2014.
- Pada lokasi yang sama juga dibangun Pelabuhan Penyeberangan Tahap I pada tahun 2012, dan sekarang sudah masuk Tahap II dan direncanakan selesai dibangun pada tahun anggaran 2015.

- Untuk membuka keterisolasian pada wilayah pulau-pulau melalui Kementerian Perhubungan RI, diusulkan angkutan penyeberangan (kapal ferry) yang dirinci sebagai berikut.
  - Tahun 2010, mulai beroperasi KMP. Kormomolin yang melintasi Tual-Tayando-Kur Pp.
  - Tahun 2011 sampai 2013, terjadi peningkatan frekuensi pelayanan dari sekali seminggu menjadi dua kali seminggu.
  - Tahun 2013, terjadi penambahan armada kapal penyeberangan yang melintasi wilayah Kota Tual dari 1 unit kapal menjadi 3 unit kapal yaitu: KMP. Tanjung Madlahar, KMP. Teluk Cendrawasih II, dan KMP. Lobster.
- Pembangunan sarana prasarana yang dibiayai APBD II yaitu:
  - Pada tahun anggaran 2009 dilakukan pemeliharaan Terminal Wara, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan, dan pemeliharaan ruang tunggu Pelabuhan Tual.
  - Pada tahun anggaran 2010 dibangun 1 buah tambatan perahu di Dullah Selatan, pemeliharaan Terminal Wara, rehabilitasi pelabuhan penyeberangan, dan pemeliharaan ruang tunggu Pelabuhan Tual.
  - Pada tahun anggaran 2011 dilakukan pemeliharaan Terminal Wara Tual, rehabilitasi ringan pelabuhan penyeberangan Tual, dan rehabilitasi/pemeliharaan terminal, penataan Pelabuhan Tual dan ruang tunggu.
  - Pada tahun anggaran 2012 dilakukan pemeliharaan Terminal Wara Tual, rehabilitasi ringan pelabuhan penyeberangan Tual.
  - Pada tahun anggaran 2013 dilakukan pemeliharaan Terminal Wara Tual dan rehabilitasi berat pelabuhan penyeberangan Tual.

Adapun paket-paket bantuan dari Kementerian Kominfo RI (APBN) melalui Program Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Telekomunikasi sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 145/KEP/M.KOMINFO/04/2007 tentang Penetapan Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:



437/KEP/M.KOMINFO/12/2009, Kota Tual mendapat paket-paket bantuan sebagai berikut.

1) Desa berdering;

Dari 29 paket pelayanan Telepon Desa Berdering yang direncanakan, hingga saat ini telah terealisasi 5 paket, yaitu pada lokasi sebagai berikut.

- a. Desa Fair
- b. Dusun Mangon
- c. Desa Lairkamor
- d. Desa Watran
- e. Desa Duroa.

2) PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan);

Kota Tual terpasang 6 paket PLIK yang telah selesai dipasang pada tahun 2010 lalu, yaitu di lokasi:

- a. PLIK Kantor Dishubkominfo
- b. PLIK Kantor Camat Dullah Utara
- c. PLIK Kantor Camat Dulah Selatan
- d. PLIK Kantor Camat Tayando
- e. PLIK Kantor Camat Pulau-pulau Kur
- f. PLIK SMP Kristen Tual.

3) MPLIK (Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan);

Kota Tual mendapat 2 unit MPLIK yang telah berada sejak Juni 2011, hingga kini telah beroperasi di sekolah-sekolah dan kampus-kampus di Kota Tual.

4) Internet Wifi;

Pada tahun 2012 dibangun internet Wifi di Kota Tual pada 3 lokasi, yaitu di lokasi:

- a. Kantor Walikota Tual
- b. SMA Negeri 1 Tual
- c. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Tual.

5) Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO;

Paket ini dibangun pada tahun 2012, merupakan paket yang sangat penting dan sangat vital bagi masyarakat Kota Tual yang berada di Pulau-pulau yakni di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pp. Kur, Kecamatan Tayando Tam dan Kecamatan Dullah Utara. Lokasi tersebut telah dipasang menara Telkomsel dan telah dimanfaatkan masyarakat setempat. Kota Tual mendapat 4 titik pemasangan yakni:

- a. Di Desa Fatbuak Kecamatan Pp. Kur
- b. Di Desa Yamtel Kecamatan Tayando Tam
- c. Di Desa Tam Kecamatan Tayando Tam

d. Di Desa Ohoitahit Kecamatan Dullah Utara

2. **Pertanyaan** : Sektor perdagangan di Kota Tual merupakan sektor andalan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013. Bagaimana upaya Bapak dalam mendukung sektor perdagangan di Kota Tual?

**Jawaban** : Kami terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan RI dan outputnya telah ditetapkannya Pelabuhan Tual sebagai Pelabuhan Transmitter untuk wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. Pelabuhan Tual ini melayani rute pelayaran Jawa-Sulawesi-Maluku-Papua juga merupakan pelabuhan peti kemas. Tentunya hal ini kami lakukan dengan tujuan untuk lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan di Kota Tual. Kami yakin bahwa dengan tersedianya pelabuhan ini semakin menjadikan Kota Tual sebagai wilayah strategis perdagangan khususnya di wilayah selatan Maluku, Papua dan Papua Barat. Pengadaan tiga unit kapal ferry dengan frekuensi pelayaran dua kali seminggu dengan rute Tual-Tayando-Kur pulang pergi, hasil koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan Kementerian Perhubungan RI juga merupakan upaya positif dinas kami yang pada kenyataannya telah mampu menjangkau wilayah-wilayah yang sebelum pemekaran terisolir seperti Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam juga sangat membantu masyarakat setempat dalam upaya pendistribusian hasil alamnya ke Kota Tual.

3. **Pertanyaan** : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

**Jawaban** : Beberapa program dan kegiatan guna mendukung pengembangan wilayah yang telah kami rencanakan, sering tidak mendapat alokasi anggaran sebagaimana pagu yang kami usulkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran). Pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak mencukupi untuk sebuah pencapaian optimal kegiatan dimaksud. Selain itu masih terjadi mutasi PNS kami yang menurut kami PNS yang bersangkutan cukup terampil, mahir, dan berpengalaman serta telah lama mengabdikan bekerja pada Dinas kami walaupun kami akui PNS yang

bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan SKPD yang ditempatinya saat ini.





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ahmad Yani Renuat, S.Sos, M.Si  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Badan Kepegawaian Kota Tual  
Tempat Wawancara : Badan Kepegawaian Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 12 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

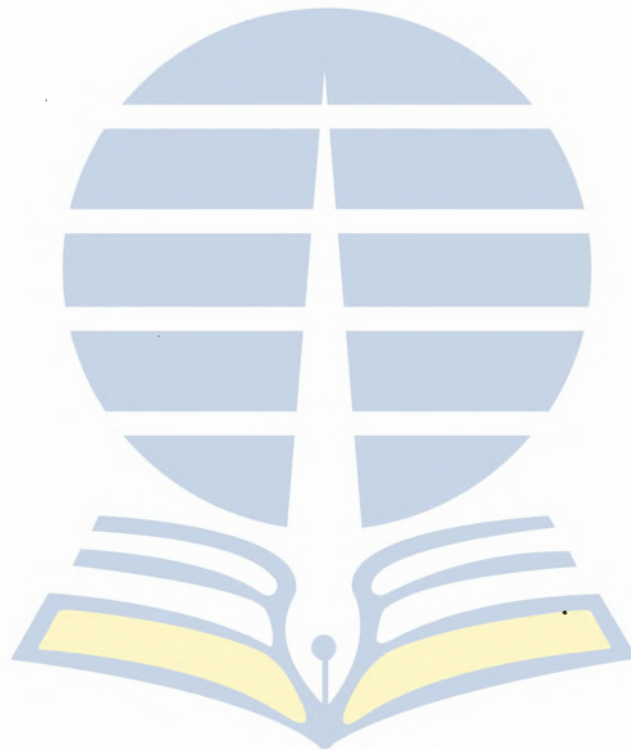
1. Pertanyaan : Dalam mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, ketersediaan SDM aparatur yang memadai menjadi modal utama percepatan pengembangan wilayah tersebut. Apa upaya yang telah Bapak lakukan dalam penyediaan SDM aparatur guna optimalnya pengembangan wilayah Kota Tual?

Jawaban : Guna mendukung pengembangan wilayah Kota Tual, maka melalui pendekatan manajemen kepegawaian serta sesuai dengan prinsip *the right man on the right place*, kami telah menempatkan CPNS pada posisi atau SKPD sesuai dengan latar belakang pendidikannya, lebih khusus pada SKPD yang mengelola sektor yang berkontribusi bagi peningkatan penyelenggaraan pengembangan wilayah Kota Tual. Bukan hanya berorientasi pada penempatannya saja, namun kami juga fokus mulai dari saat rekrutmen CPNS tersebut. Hal ini terwujud dari besarnya lowongan penerimaan CPNS yang berlatar belakang pendidikan teknik, kelautan dan perikanan, tenaga pendidikan dan kesehatan, akuntansi, dan lainnya.

2. Pertanyaan : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

Jawaban : Permasalahan yang masih ditemui yaitu pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Kota Tual masih sebatas dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas saja, belum diarahkan untuk menciptakan wawasan, etos kerja juga integritas pelaku pengembangan wilayah.

Tual, 10 Juni 2013  
GAB. PARASURANGI,  
KEPEGUNAAN  
DASAR  
Ahmad Yani Renuat, S.Sos, M.Si



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Dra. Bau Intang, Apt. M.Kes  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Kesehatan Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 13 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamber

Hasil Wawancara :

Pertanyaan : Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Apa saja upaya yang telah Ibu lakukan dalam mengembangkan kesehatan masyarakat khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar dalam lingkup Pemerintah Kota Tual?

Jawaban : Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang dimekarkan dari Kabupaten Induk Maluku Tenggara melalui Undang-Undang 31 Tahun 2007, Kota Tual memerlukan suatu pelayanan kesehatan dasar sehingga perlu peningkatan dan pembangunan Puskesmas untuk menjawab pelayanan kesehatan dasar yang sulit terjangkau dan wilayah yang memerlukan peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kota Tual. Perlindungan sosial masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya di bidang kesehatan merupakan bagian penting dari pengembangan wilayah. Dinas Kesehatan Kota Tual telah melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan kesehatan masyarakat di Kota Tual khususnya yang berada di wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan daerah terluar Kota Tual. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tual maka upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, penyediaan dan peningkatan tenaga kesehatan yang profesional dan bermutu serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan masyarakat terutama untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir dan masyarakat perkotaan khususnya masyarakat miskin. Upaya pengembangan fasilitas kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai instansi teknis dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013) adalah peningkatan status Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebanyak 3 puskesmas yang ditingkatkan statusnya pada tahun 2009



yaitu 2 di pulau terluar antara lain Puskesmas Kur ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas Rawat Inap Kur pada Kecamatan Pulau-pulau Kur, Puskesmas Tayando ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas Rawat Inap Tayando di Kecamatan Tayando Tam, dan Puskesmas Namser ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas Rawat Inap Namser di Kecamatan Dullah Utara Kota Tual. Tahun 2009 Puskesmas Pembantu Mangur ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Mangur di Desa Mangur Kecamatan Pulau-pulau Kur,



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Dra. Hj. F. Kabalmay  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual  
Tempat Wawancara : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 14 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :  
1. Pertanyaan : Salah satu faktor penghambat pengembangan wilayah adalah masalah kemiskinan. Apa saja upaya khusus yang telah Ibu lakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual?

Jawaban : Untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Kota Tual telah meluncurkan program unggulan dan inovatif yakni Program Pemberdayaan Masyarakat Maren (PPMM) Kota Tual yang (Maren artinya gotong royong, semangat kerjasama dalam bahasa lokal/bahasa Kei). PPMM merupakan pemberdayaan lokal berbasis APBD yang dialokasikan ke lima kecamatan dengan total pagu 2,8 Milyar pada tahun 2012 dan 4 Milyar pada tahun 2013. Melalui PPMM dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PPMM dimulai dengan Penyusunan Program Pembangunan Kelurahan/Desa Berjangka (PPKB) sebagai dasar pengembangan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa guna meningkatkan pengembangan infrastruktur dan suprastruktur, sosial, ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh wilayah masing-masing. Cakupan pelaksanaan PPMM telah menyentuh hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir yang belum atau kurang tersentuh oleh program-program lain menyangkut pemberdayaan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini sering berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat

diwujudkan. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PPM akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2016. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta percepatan target waktu pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDGs). Pelaksanaan PPM yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Kota Tual mewujudkan peningkatan IPM serta pencapaian target-target MDGs tersebut

2. **Pertanyaan** : Apakah terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual telah dilakukan evaluasi pelaksanaannya dan bagaimana dampaknya?

**Jawaban** : Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual terus dilakukan. Dampaknya yaitu angka kemiskinan dan pengangguran menurun setiap tahunnya.





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. M. S. Z. Bandjar  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 15 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Ketersediaan sumberdaya alam merupakan modal bagi pengembangan wilayah. Sumberdaya alam pertanian pada beberapa kecamatan seperti Pulau-pulau Kur Tayando Tam, dan Kecamatan Dullah Utara cukup potensial untuk dikembangkan guna memperkaya sumber pangan lokal. Apa saja upaya yang Bapak lakukan dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian yang ada tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat?

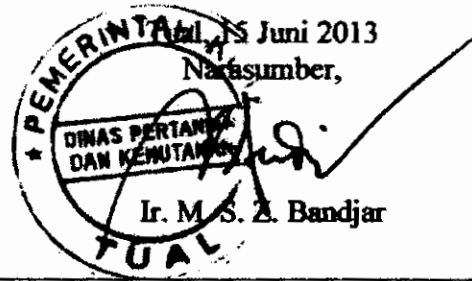
Jawaban : Upaya yang telah kami lakukan dalam mengembangkan potensi sumberdaya alam pertanian yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian berupa intensifikasi lahan dan produksi serta meningkatkan pengolahan hasil atau pasca panen.

2. Pertanyaan : Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

Jawaban : Kebijakan yang telah diambil dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat sebagai berikut.

- Pengembangan SDM aparatur pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Tual dilakukan melalui Bimtek-bimtek maupun pelatihan teknis di bidang pertanian
- Pengembangan SDM masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, magang dan pelatihan pengelolaan pertanian.

15 Juni 2013  
Narasumber,  
Ir. M. S. A. Bandjar



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. S. Wusurwut, M.Si  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 17 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. **Pertanyaan** : Sebagai Wilayah Bahari, Kota Tual tentunya kaya akan sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan yang dapat dijadikan sebagai modal dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mengembangkan wilayah pesisir serta potensi kelautan dan perikanan yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual?

Jawaban : Sebagai dinas yang baru definitif pada tanggal 1 September 2009, maka secara nyata kami baru melakukan kegiatan secara efektif pada tahun 2010. Beberapa kegiatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2012 terkait pengembangan kesejahteraan masyarakat pesisir antara lain adalah:

1. Peningkatan sarana prasarana perikanan (Tangkap, Budidaya dan Pengolahan).
2. Penyusunan Profil Tata Ruang Pulau-pulau Kecil bekerjasama dengan Politeknik Perikanan Negeri Tual.
3. Perlindungan ekosistem pesisir untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
4. Pengembangan Sarana Usaha Mikro Mitra Bahari.
5. Pemberdayaan masyarakat penerima bantuan perikanan.
6. Pembangunan tambatan perahu/jetty yang berguna sebagai sarana tambat labuh perahu nelayan dan armada perhubungan antar pulau berskala kurang dari 10 Gross Ton.
7. Pengadaan listrik tenaga surya pada wilayah-wilayah pesisir.

2. **Pertanyaan** : Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah



diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat?

**Jawaban** : Kebijakan pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat yang kami lakukan sebagai berikut.

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan perikanan tangkap bagi aparatur.
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan magang budidaya bagi aparatur dan pembudidaya dan pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung pengembangan SDM masyarakat yaitu:

- Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan pelatihan teknologi penangkapan ikan bagi kelompok nelayan tangkap.
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan kegiatan pelatihan manajemen usaha dan teknik budidaya bagi pembudidaya rumput laut dan ikan kerapu, pelatihan wirausaha budidaya rumput laut dan ikan kerapu, dan pelatihan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) bagi nelayan pembudidaya.
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan listrik tenaga surya, sosialisasi dan pelatihan pengelolaan ekosistem pesisir.
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan pembinaan dan penguatan kelompok masyarakat pengawas.
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan pelatihan pasca panen produk unggulan.
- Program Daya Saing Hasil Perikanan dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan bantuan paket olahan perikanan.

3. **Pertanyaan** : Apa upaya lainnya yang telah Bapak lakukan guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota Tual agar terus mampu berkontribusi bagi perekonomian wilayah Kota Tual?

**Jawaban** : Guna mendukung perkembangan sub sektor perikanan di Kota Tual dan mewujudkan peningkatan kontribusi sub sektor ini bagi perekonomian Kota Tual, maka kami telah membuat Masterplan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Tual yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual Nomor 106 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dalam Wilayah Kota Tual. Selain itu penetapan Kota Tual sebagai kawasan minapolitan di Provinsi Maluku melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/KepMen-KP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan juga merupakan penunjang percepatan perkembangan sektor perikanan di Kota Tual. Dalam perkembangannya, sub sektor perikanan di Kota Tual mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2012, produksi ikan laut di Kecamatan Pulau-pulau Kur sebesar 2.207,8 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 12.139.050.000, Kecamatan Tayando Tam sebesar 2.907,8 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 14.539.112.000, Kecamatan Dullah Utara sebesar 3.082,6 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 16.958.150.000, dan Kecamatan Dullah Selatan sebesar 17.278,2 Ton dengan nilai produksi mencapai Rp. 95.027.350.000. Upaya lain yang telah kami lakukan dalam mendongkrak sub sektor perikanan di Kota Tual yaitu terus meningkatkan peranan pihak swasta dalam rangka pemerataan dan peningkatan pendapatan nelayan melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha, memenuhi kebutuhan konsumen ikan masyarakat setempat dan peningkatan ekspor. Disamping itu, diarahkan juga untuk pemerataan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja. Peningkatan sub sektor perikanan juga tidak terlepas dari andil Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang menempatkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kota Tual. Aktifitas pada PPN ini sangat mendukung laju pertumbuhan ekonomi Kota Tual dari sub sektor perikanan.

**4. Pertanyaan** : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

**Jawaban** : Masih terdapat beberapa program dan kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah yang telah

kami rencanakan dalam rencana kerja anggaran SKPD kami, tidak mendapat anggaran sebagaimana pagu indikatif yang kami usulkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengalokasikan anggaran sering melihat pada besarnya pagu dan jarang melihat pentingnya pagu yang diusulkan untuk optimalnya pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Pada pelaksanaannya pagu anggarannya tidak mencukupi atau terkadang pada program dan kegiatan yang tidak menjadi fokus kami dalam upaya pengembangan wilayah mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dari yang direncanakan. Selain itu pengalokasian anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan proyek-proyek besar yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama walaupun menjanjikan keuntungan yang besar.

Tual, 17 Juni 2013  
Narasumber,  
\* DINAS KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
Dr. S. Wusurwut, M.Si

---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. M. Talahatu, M.Si  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 18 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Pengembangan industri baik industri rumah tangga, kerajinan rakyat, industri kecil, menengah maupun besar termasuk industri pengolahan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Untuk itu diperlukan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pembangunan sektor dan sub sektor industri di Kota Tual dengan tetap berorientasi pada potensi unggulan daerah setempat. Terhadap maksud tersebut, apa yang telah Bapak lakukan?

Jawaban : Perkembangan industri di Kota Tual khususnya sektor industri pengolahan yang terus meningkat dan tentunya memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah Kota Tual lebih dikarenakan adanya upaya Pemerintah Kota Tual melalui penetapan zona atau kawasan pengembangan industri dan bersama-sama dengan Kementerian Perindustrian telah menetapkan Kompetensi Inti Industri Daerah dengan lingkup pengolahan rumput laut menjadi tepung karagenan serta ditetapkannya Kota Tual sebagai pusat pengembangan inovasi rumput laut Maluku. Selain itu guna lebih mendukung perkembangan sektor industri pengolahan khususnya pengolahan rumput laut hasil panen masyarakat, maka kami juga telah membangun *cold storage* dan depo rumput laut di Desa Labetawi Kecamatan Dullah Utara. Pembangunan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang terwujud melalui kesediaan membebaskan lahannya bagi pembangunan dimaksud. Pengembangan industri pengolahan juga tidak terlepas dari dukungan pihak swasta melalui pengembangan ruang lingkup usaha Perusahaan Pengalengan Ikan PT. Maritim Timur Jaya yang berlokasi di Desa Ngadi Kecamatan Dullah Utara dengan pasar ekspor sampai ke luar negeri. Perusahaan ini juga telah mampu memperkerjakan banyak karyawan. Kami memandang ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antara kami selaku unsur pemerintah daerah, pelaku usaha

atau pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan wilayah Kota Tual saat ini dan seterusnya.

2. **Pertanyaan** : Kendala yang ditemui bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari sentra pemerintahan khususnya yang tinggal pada wilayah pedesaan, wilayah pesisir dan terluar yaitu tidak dapat mengakses pasar padahal memiliki kemampuan mengelola sumberdaya alam. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan untuk mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau kemampuan mengakses pasar serta mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum di Kota Tual?

**Jawaban** : Guna mendukung dan memperlancar jaringan distribusi perdagangan atau kemampuan mengakses pasar untuk lebih mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum di Kota Tual yang juga merupakan *leading sector* dalam RPJMD Kota Tual Tahun 2009-2013, maka upaya yang telah kami lakukan diantaranya melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual dalam rangka penyediaan sarana prasarana transportasi untuk memperlancar akses perdagangan hasil alam masyarakat khususnya yang berdomisili di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam menuju pasar Masrum dan pasar Lodar El di pusat Kota Tual serta pembangunan beberapa pasar diantaranya pasar Masrum dan pasar Lodar El sumber dana APBD Kota Tual serta pasar tradisional dengan sumber dana Kementerian Perdagangan RI, yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan Tual. Selain itu untuk mendukung perkembangan sektor perdagangan secara umum dilakukan penyederhanaan proses pendirian usaha perdagangan, pengembangan kemitraan dengan para pedagang sebagai upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta peningkatan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa dalam rangka perlindungan konsumen.

Tual, 18 Juni 2013

Narasumber,



Ir. M. Talahatu, M.Si

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Halik Sahabudin, SE  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 19 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan Daerah Kota Tual. Dalam konteks pengembangan wilayah, apa upaya yang telah dilakukan Bapak guna mendorong percepatan pengembangan wilayah Kota Tual dari sektor pariwisata tersebut?

Jawaban : Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam konteks pengembangan pariwisata di Kota Tual adalah sebagai berikut.

- Menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kota Tual.
- Mengadakan survey potensi pariwisata pada empat kecamatan di Kota Tual, baik wisata bahari maupun budaya.
- Mengidentifikasi titik-titik destinasi untuk dapat dikembangkan. Hasilnya telah ditetapkan Tayando Tam sebagai destinasi wisata bawah laut, Kur sebagai wisata penangkaran penyu, Ngadi sebagai destinasi wisata tirta, serta beberapa titik destinasi wisata bahari dan budaya lainnya.
- Penataan beberapa objek wisata seperti objek wisata Pantai Dullah, objek wisata tirta Danau Ngadi, dan Pantai wisata Difur.
- Mempromosikan Kota Tual didalam maupun luar negeri melalui website, leaflet, booklet, pameran-pameran dan tempat-tempat strategis seperti Bandara Pattimura di Ambon, hotel-hotel serta kerjasama dengan PT. Pos Indonesia untuk membuat perangko wisata dan kartu pos.

2. Pertanyaan : Perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan program-program pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Bapak dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat?




**Jawaban** : Kebijakan yang telah diambil dalam pengembangan SDM baik SDM aparatur maupun SDM masyarakat sebagai berikut.

- Pengembangan SDM aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tual dilakukan melalui Bimtek-bimtek maupun pelatihan teknis di bidang kepariwisataan.
- Pengembangan SDM masyarakat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Selain itu pengalokasian anggaran masih diprioritaskan kepada pelaksanaan proyek-proyek besar yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama walaupun menjanjikan keuntungan yang besar.

**3. Pertanyaan** : Apa saja kendala yang dirasakan anda saat ini baik kaitannya dengan pengelolaan APBD, pengembangan sumber daya manusia, maupun pengembangan data dan informasi sebagai bagian dari upaya pengembangan wilayah Kota Tual sejak tahun 2009-2012?

**Jawaban** : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mengalokasikan anggaran masih memprioritaskan pada terlaksananya beberapa proyek besar yang jika dilihat pelaksanaannya membutuhkan waktu lama walaupun tidak dipungkiri memberikan keuntungan yang besar. Selain itu masih terjadi mutasi beberapa orang staf dinas kami yang selama ini kami nilai kinerjanya baik pada dinas atau unit kerja lain pada dua tahun terakhir . Hal ini cukup mengganggu kinerja kami

Tual, 09 Juni 2013  
Narasumber,  
  
Hafik Sahabudin, SE

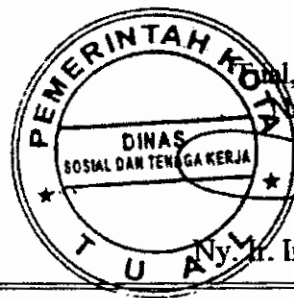
## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ny. Ir. Irene A. Ngabalin  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual  
Tempat Wawancara : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 20 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :  
Pertanyaan : Penciptaan lapangan kerja produktif merupakan usaha mencapai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan pengembangan wilayah didalam kerangka sosial. Tujuan utama bertumpu pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah mendasar pengembangan wilayah. Apa saja kebijakan yang telah diambil oleh Ibu guna menciptakan lapangan kerja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual?

Jawaban : Kebijakan yang telah diambil guna menciptakan lapangan kerja produktif di Kota Tual sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tual yaitu melalui kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai tahun 2012 baik dari dana APBD II maupun APBN antara lain:

- Pemberdayaan masyarakat miskin lewat dana usaha bersama (KUBE) untuk 10 kelompok sebesar Rp. 200.000.000.
- Jaminan sosial bagi lanjut usia sebanyak 50 orang sebesar Rp. 200.000.000.
- Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan padat karya produktif dan padat infrastruktur.



Tual, 20 Juni 2013

Narasumber,

Ny. Ir. Irene A. Ngabalin

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ahmad Syakir Renwarin, SP  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual  
Tempat Wawancara : Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 21 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :  
Pertanyaan : Faktor penghambat pengembangan wilayah diantaranya masalah ketahanan pangan karena erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam rangka mengatasi masalah ketahanan pangan di Kota Tual sebagai upaya lebih lanjut dalam mendukung pengentasan kemiskinan?

Jawaban : Upaya yang telah kami lakukan dalam rangka mengatasi masalah ketahanan pangan di Kota Tual dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan di Kota Tual sebagai berikut.

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
- Pengembangan pertanian tanaman pangan pada lahan kering.
- Penanganan daerah rawan pangan.
- Pembuatan peta kerentanan dan kerawanan pangan.
- Pembangunan gudang penyimpanan cadangan pangan (lumbung pangan).
- Pembangunan rumah produksi tepung ubi kayu (MOCAY) serta pengadaan mesin pengolah tepung.
- Pemanfaatan lahan pekarangan.
- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat.
- Pengisian lumbung pangan.

Tual, 21 Juni 2013  
Narasumber,

Ahmad Syakir Renwarin, SP



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. M. Renur  
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual  
Tempat Wawancara : Kantor Lingkungan Hidup Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 22 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :  
Pertanyaan : Sektor pertambangan dan penggalian, khususnya sub sektor penggalian berkaitan erat dengan daya dukung lingkungan. Sesuai data yang ada, sub sektor ini cukup berkontribusi bagi perekonomian wilayah Kota Tual. Disisi lain, pengembangan wilayah sangat bertumpu pada tersedianya lingkungan yang lestari, dan ini perlu mendapat perhatian khusus dari semua pelaku pengembangan wilayah guna menjaga keseimbangan dan menjamin kesinambungan pembangunan pada suatu wilayah. Apa saja upaya yang telah Bapak lakukan dalam mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari dan terus dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat setempat?

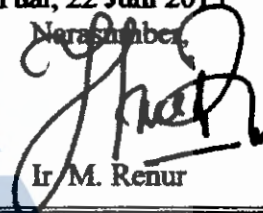
Jawaban : Mengingat usaha pertambangan dan penggalian sangat berhubungan erat dengan lingkungan maka upaya yang telah dilakukan dimaksudkan selain untuk mencegah kerusakan lingkungan agar tetap lestari juga agar dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan daerah. Perlu diinformasikan bahwa peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian bagi perekonomian Kota Tual disebabkan oleh banyaknya masyarakat dan pelaku usaha (kontraktor) yang memanfaatkan pasir dan tanah putih (bahan galian C) bagi kegiatan pembangunan. Upaya pemanfaatan pasir dan tanah putih ini, dalam prakteknya dibingkai dengan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Usaha Wajib Dokumen Lingkungan dan Perda Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Hawear atau Nama Lain dalam Wilayah Kota Tual. Mengingat pengembangan wilayah juga sangat bertumpu pada ketersediaan lingkungan yang lestari maka Pemerintah Daerah Kota Tual telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan fungsi monitoring dan pengawasan lingkungan setiap tahun berjalan pada wilayah Kota Tual.

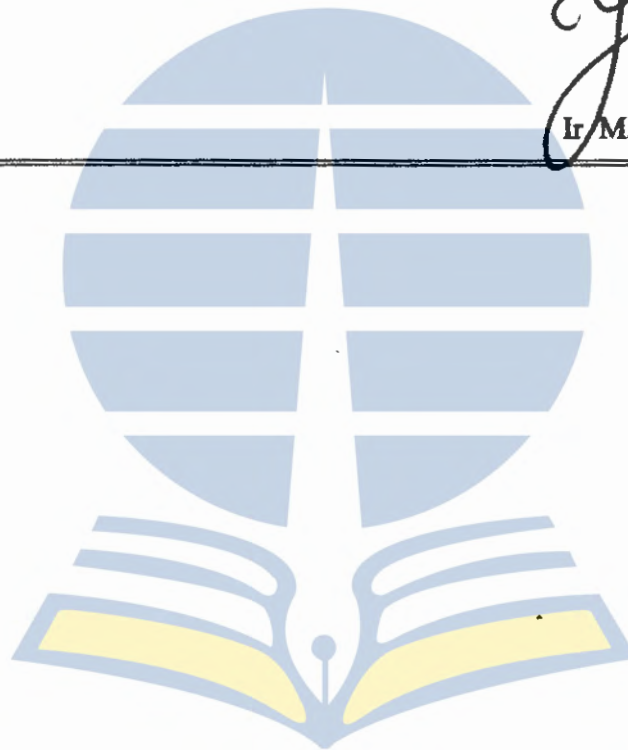
2. Pengadaan serta penanaman bibit pohon pada wilayah-wilayah sumber air di wilayah Kota Tual.
3. Konservasi sumberdaya alam dengan melibatkan para pelaku usaha maupun masyarakat setiap tahun.
4. Peningkatan peran dan kewenangan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.

Tual, 22 Juni 2013

Narasumber,



Ir. M. Renur



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Fadillah Rahawarin, S.Pi  
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Tual.  
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 21 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. **Pertanyaan** : Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD Kota Tual) juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru?

**Jawaban** : Kaitannya dengan fungsi anggaran, kami mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran fokus bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pelayanan publik yang terus menerus dalam bentuk pemberian porsi lebih pada belanja publik di setiap program dan kegiatan yang diusulkan/direncanakan dari setiap SKPD. Adapun pelaksanaan fungsi pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah menjadi dapat terkontrol guna mencegah terjadinya penyimpangan. Kaitannya dengan pengembangan wilayah maka fungsi legislasi telah dijalankan dengan maksimal yakni ditetapkannya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual sebagai pedoman induk pelaksanaan pengembangan wilayah di Kota Tual.

2. **Pertanyaan** : Apa saja masalah yang menurut anda masih terjadi saat ini dan mengganggu upaya pengembangan wilayah Kota Tual?

**Jawaban** : Permasalahan yang masih sering kami temui kaitannya dengan upaya percepatan pengembangan wilayah Kota Tual yaitu masih sering terjadi keterlambatan dalam pembahasan APBD Kota Tual yang disebabkan kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual yang tidak disiplin dalam penyiapan dokumen perencanaan anggaran. Hal ini berdampak bagi terlambatnya waktu penetapan APBD sehingga secara langsung juga berdampak bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ada dan telah direncanakan dengan



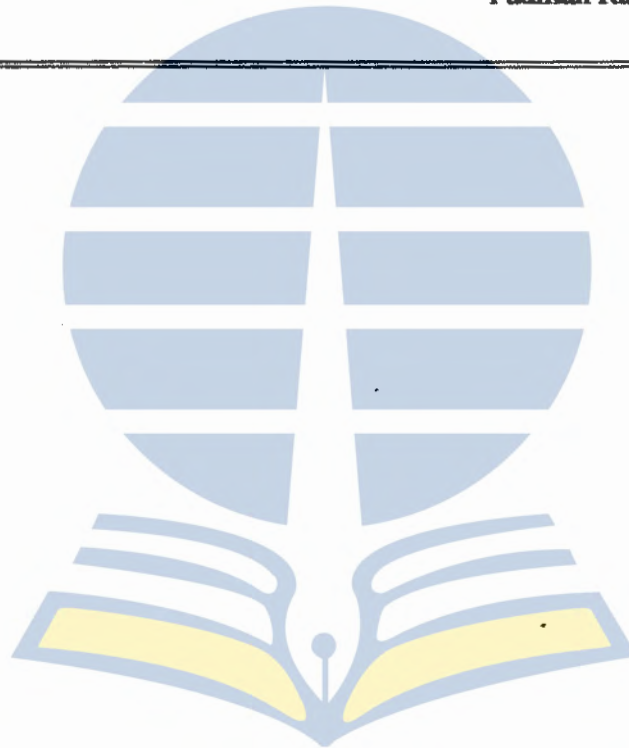
matang oleh setiap SKPD dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah di Kota Tual.

Tual, 21 Juni 2013

Narasumber,

Fadilah Rahawari 

---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : R. M. Waremra, S.AP  
Jabatan/Pekerjaan : Ketua DPRD Kota Tual.  
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 22 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta eksekutif, peran serta legislatif (DPRD Kota Tual) juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Bapak sebagai legislatif kaitannya dengan pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah Kota Tual sebagai Daerah Otonom Baru?

Jawaban : Menurut pendapat saya, kurang lebih 4 tahun masa pengabdian kami sebagai anggota DPRD Kota Tual, DPRD Kota Tual sudah cukup pro aktif dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD dalam penganggaran, pengawasan maupun legislasi sudah berjalan dengan baik melalui kondisi kerjasama yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun stakeholder lainnya. Secara teknis, penyusunan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada Tim Anggaran eksekutif Pemerintah Kota Tual, namun tetap digodok dan dibahas melalui Badan Anggaran DPRD Kota Tual, setelah itu dibawa pada tingkat paripurna untuk dibahas dan ditetapkan sebagai APBD Kota Tual pada setiap tahunnya. Dengan demikian, maka fungsi anggaran yang melekat pada DPRD Kota Tual telah dilaksanakan dengan baik. Setiap tahun, dalam agenda Masa Sidang DPRD Kota Tual diagendakan tugas penting yakni pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga pembangunan baik fisik maupun non fisik, melalui dana APBD I, APBD II, dan DAK maupun bantuan-bantuan lainnya tetap terkontrol oleh DPRD Kota Tual. Kaitannya dengan fungsi legislasi yang melekat pada DPRD Kota Tual, setiap tahunnya DPRD Kota Tual telah berhasil membahas berbagai Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tual untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tual diantaranya Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tual. Selain itu ada beberapa buah Ranperda yang menjadi usul inisiatif dari DPRD Kota Tual yang sedang berproses. Ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Tual telah melaksanakan fungsi legislasi

dengan sangat baik. DPRD Kota Tual telah membangun hubungan kerjasama yang baik dan harmonis dengan pihak eksekutif dalam rangka kemajuan daerah dan pentingnya mensejahterakan masyarakat.

2. **Pertanyaan** : Apa saja masalah yang menurut anda masih terjadi saat ini dan mengganggu upaya pengembangan wilayah Kota Tual?

**Jawaban** : Masalah utama dan menurut kami cukup mendasar yaitu masih ditemui adanya keterlambatan pembahasan APBD Kota Tual. Hal ini disebabkan tidak disiplinnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Tual dalam penyiapan dokumen perencanaan anggaran. Akibatnya penetapan APBD juga terlambat dan menghambat pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pembangunan.

Tual, 22 Juni 2013  
Narasumber,



R. M. Waremra, S.AP



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Djamaludin Rahareng, S.Sos  
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Tempat Wawancara : Desa Tamngurhir Kecamatan Tayando Tam  
Tanggal Wawancara : 30 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

Jawaban : Sebelumnya kami atas nama masyarakat Desa Tamngurhir ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kota Tual yang selama ini telah memperhatikan kami dan mengangkat kehidupan ekonomi kami menjadi lebih baik. Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual bagi peningkatan kesejahteraan kami. Wujud nyatanya berupa pembangunan sarana prasarana baik jalan yang menghubungkan kami dengan beberapa desa lain yang ada di Kecamatan Tayando Tam, penyediaan kapal feri sehingga kami dapat menjangkau Kota Tual dan memasarkan hasil alam kami, pembangunan beberapa sekolah dasar serta sarana prasarana kesehatan puskesmas, dan masih banyak bantuan lainnya yang kami peroleh dari beberapa SKPD Kota Tual.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat setempat?

Jawaban : Pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD, secara umum kami nilai telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat kami.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Jawaban : Guna mendukung pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual maka upaya yang kami

lakukan yaitu melalui penyediaan lahan bagi pembangunan sarana prasarana atau infrastruktur serta penyediaan tenaga kerja bagi kegiatan pembangunan atau proyek yang dilaksanakan di wilayah kami.

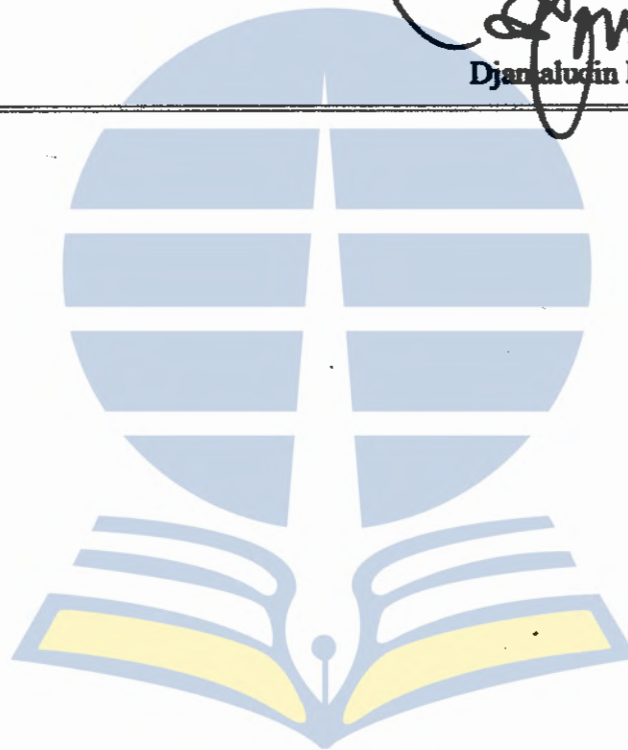
Tua, 30 Juni 2013

Narasumber,



---

Djanaludin Rahareng, S.Sos



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Ismail Renhoat  
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Tempat Wawancara : Desa Tayando Yamtel Kecamatan Tayando Tam  
Tanggal Wawancara : 30 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

Jawaban : Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami rasakan telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa kami. Wujud nyata pengembangan wilayah tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur penunjang seperti infrastruktur pendidikan berupa pembangunan beberapa sekolah dasar, infrastruktur kesehatan, penyediaan tenaga pendidik dan kesehatan yang memadai, jalan, jaringan komunikasi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat setempat?

Jawaban : Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Tual, telah sesuai dengan aspirasi masyarakat kami yang kami sampaikan pada saat Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Jawaban : Adapun yang kami lakukan guna mendukung pengembangan wilayah meliputi penyediaan lahan bagi proyek pembangunan fisik serta berpartisipasi sebagai subyek atau pelaku utama pembangunan yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sumber daya

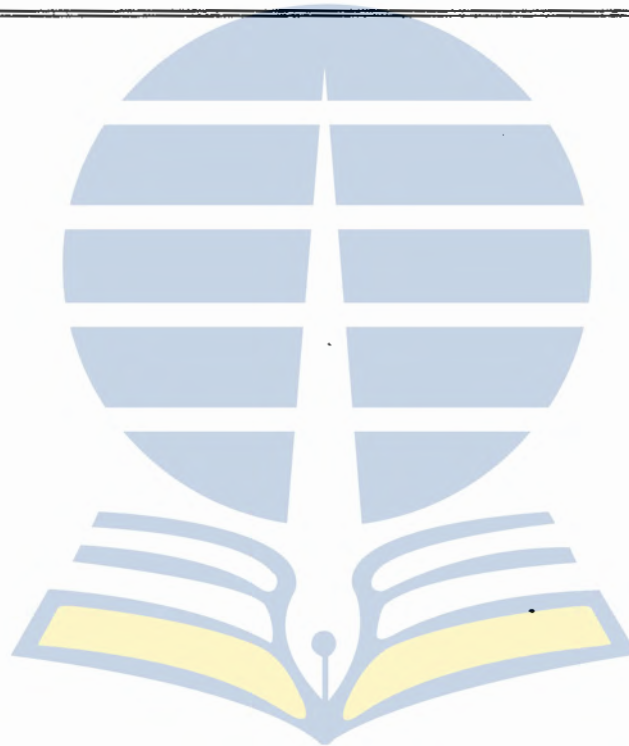


manusia setempat dalam berupa tenaga kerja siap pakai dalam pelaksanaan proyek pembangunan.

Tual, 30 Juni 2013  
Narasumber,



Ismail Renhoat



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ibu Dra. Umi Fadirubun  
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Tempat Wawancara : Desa Dullah Laut Kecamatan Dullah Utara  
Tanggal Wawancara : 8 Juli 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. **Pertanyaan** : Menurut Ibu apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

**Jawaban** : Kesejahteraan masyarakat setempat meningkat sejak pemekaran Kota Tual terjadi. Kondisi berbeda kami rasakan sebelum pemekaran atau ketika kami masih menjadi bagian dari Kabupaten Maluku Tenggara. Berbagai bentuk nyata pengembangan wilayah dalam yang dirasakan mampu mengangkat kesejahteraan kami terasa nyata melalui berbagai bantuan yang masuk ke desa kami seperti diantaranya bantuan dari dinas kelautan dan perikanan, dinas pertanian, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa). Selain itu melalui program dan kegiatan dinas pendidikan, dinas kesehatan serta dinas PU (Pekerjaan Umum) juga telah terbangun beberapa sarana dan prasarana yang sangat menunjang kegiatan kami sehari-hari.

2. **Pertanyaan** : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat setempat?

**Jawaban** : Pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah daerah Kota Tual, kami rasakan sudah sangat sesuai dengan apa yang kami butuhkan dan tentunya telah sesuai dengan apa yang kami pada saat Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbang Kota Tual.

3. **Pertanyaan** : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

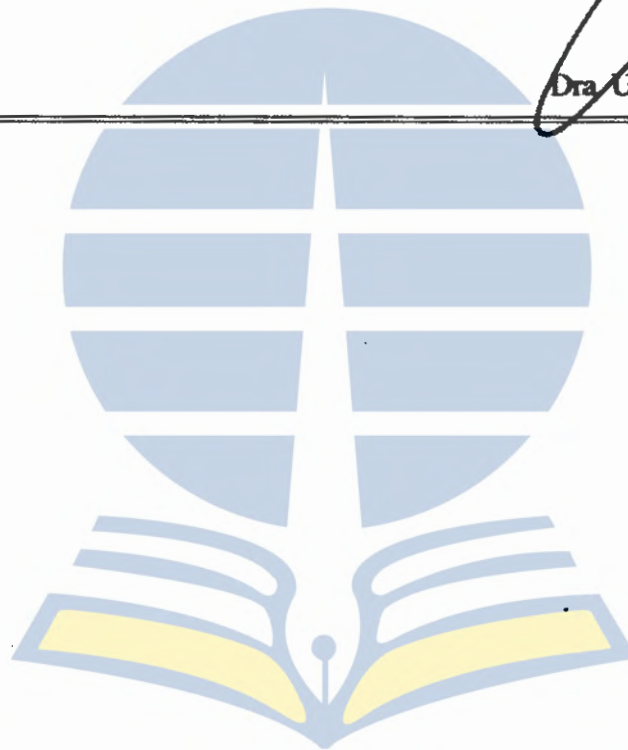
**Jawaban** : Dukungan kami terhadap pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tual berupa penyediaan tenaga kerja secara sukarela dari masyarakat bagi pelaksanaan proyek pembangunan atau kegiatan dari masing-masing SKPD Kota Tual.

Tual, 8 Juli 2013  
Narasumber,



---

Dra. Umi Fadiruban





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Mahmud Rahanyamtel, S.Sos  
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Tempat Wawancara : Desa Kamear Kecamatan Pulau-pulau Kur  
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

Jawaban : Upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 kami rasakan telah banyak memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Konkrit pembangunan yang terjadi seperti pembangunan jalan lingkar yang telah mampu membuka keterisolasian desa ini dengan desa-desa lainnya seperti Desa Lokwirin, Desa Tubyal, Desa Sermaf serta Desa Finualen. Pembangunan lainnya seperti pembangunan sekolah dan rehab sekolah, penyediaan layanan kesehatan dan yang tak kalah pentingnya desa ini sebagaimana desa-desa yang disebutkan tadi dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Pulau-pulau Kur ini telah terjangkau kapal ferry. Komunikasi juga bukan lagi menjadi masalah bagi kami saat ini karena pelayanan paket komunikasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tual telah menyediakannya bagi kami sehingga informasi menjadi cepat kami terima. Pelayanan listrik PLN diakui belum menjangkau desa kami tapi melalui pelayanan PLTS pemerintah daerah hal ini sudah bukan merupakan kendala bagi kami.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat setempat?

Jawaban : Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Tual sudah sangat sesuai dengan kehendak atau aspirasi kami. Jalur Musrenbang pada setiap

tingkatan baik desa, kecamatan, dan Kota Tual merupakan jalur utama didalam menyampaikan aspirasi dan peran serta masyarakat kami didalam penentuan perencanaan pembangunan.

3. **Pertanyaan** : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

**Jawaban** : Wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual berupa perencanaan kegiatan desa melalui jalur musrenbang, penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sekolah, pembangunan poskesdes, serta penyediaan tenaga pendidik sukarela di sekolah-sekolah.

Tual, 11 Juli 2013

Narasumber,



Mahmud Rahanyamtel, S.Sos

---

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Kasim Rahawarin, SE  
Jabatan/Pekerjaan : Tokoh Masyarakat  
Tempat Wawancara : Desa Kanara Kecamatan Kur Selatan  
Tanggal Wawancara : 11 Juli 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak apakah upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat? Jika Ya, apa saja wujud nyata pengembangan wilayah tersebut?

Jawaban : Beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa masyarakat di desa kami telah beranjak menuju kondisi sejahtera tersebut yang nyata dari peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Kondisi tersebut disadari sebagai kinerja pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual selama kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

2. Pertanyaan : Dalam melaksanakan pengembangan wilayah, apakah berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan kehendak atau aspirasi masyarakat setempat?

Jawaban : Program maupun kegiatan sebagai upaya percepatan pengembangan wilayah Kota Tual selama ini kami pandang telah memenuhi aspirasi kami atau sesuai dengan apa yang kami butuh dan perlukan di desa ini. Kami selalu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya melalui mekanisme musrenbang desa, musrenbang kecamatan juga musrenbang Kota Tual, walaupun banyak juga dari usulan kami tidak diakomodir namun kami pahami bahwa pemerintah daerah punya perhitungan tersendiri yang pada dasarnya berupa masalah keterbatasan anggaran pembangunan.

3. Pertanyaan : Apa saja wujud nyata partisipasi masyarakat setempat dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual?

Jawaban : Terhadap upaya positif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tual dalam pengembangan



wilayah Kota Tual maka bentuk partisipasi kami dalam mendukung upaya pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Tual tersebut yaitu melalui pembebasan sejumlah lahan untuk pembangunan infrastruktur, peran serta dalam pengelolaan prasarana yang terbangun, penyediaan tenaga kerja bagi pelaksanaan proyek pembangunan, serta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang berlangsung di desa kami.

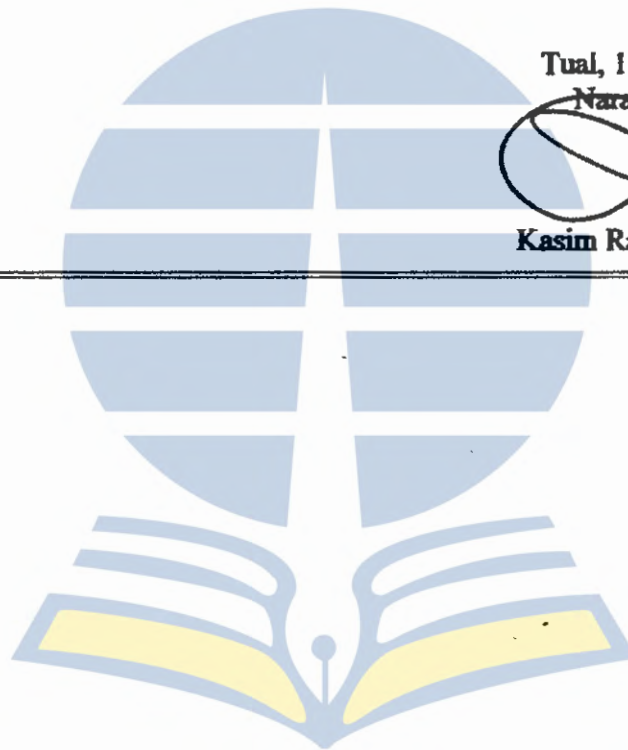
Tual, 11 Juli 2013

Narasumber,



Kasim Rahawarn, SE

---



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Jhon Fadirubun  
Jabatan/Pekerjaan : Pelaku Usaha  
Tempat Wawancara : Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 26 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

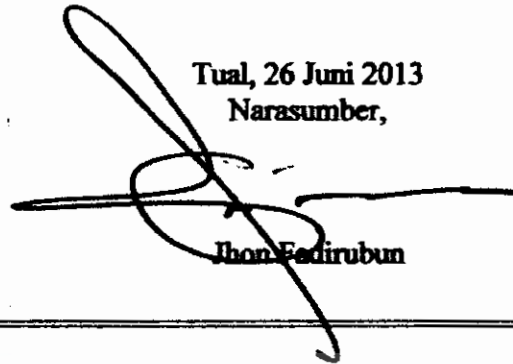
1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Saudara sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Peran kami selaku pelaku usaha di Kota Tual dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual berupa penyedia dana dan tenaga kerja trampil dan terdidik yang diperlukan dalam kegiatan pengembangan wilayah.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

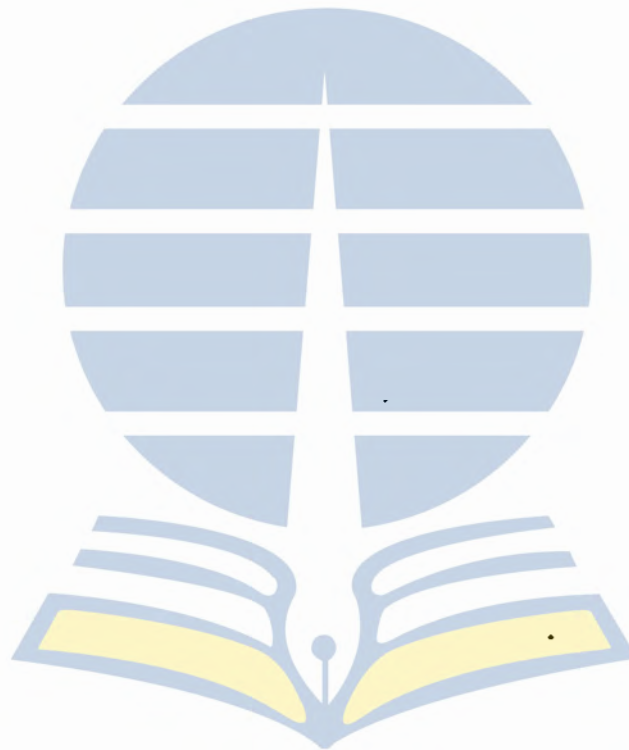
Jawaban : Tidak dapat disangkal bahwa peran pemerintah daerah Kota Tual begitu besar bagi pengembangan wilayah di Kota Tual. Melalui kemitraan yang terbangun selama kurun waktu tahun 2009-2012, pemerintah daerah telah menempatkan kami pelaku usaha sebagai mitra sejajar yang dinilai dapat berkontribusi besar bagi upaya pengembangan wilayah yang diselenggarakan di Kota Tual. Berbagai keuntungan telah kami peroleh melalui kemitraan ini. Penciptaan iklim sosial dan politik serta keamanan yang menunjang serta penyediaan berbagai kemudahan seperti pemberian pinjaman, pembukaan lahan usaha yang dapat memberikan keuntungan dari usaha dimaksud serta fasilitas lainnya bagi kami termasuk melakukan berbagai pembinaan merupakan bentuk keuntungan yang kami peroleh dari pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan ini.

Tual, 26 Juni 2013  
Narasumber,



Ibon Fadirubun

---





## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Honganda Lestari  
Jabatan/Pekerjaan : Pelaku Usaha  
Tempat Wawancara : Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 26 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual, upaya yang telah kami lakukan meliputi pemberian pinjaman lunak kepada kelompok usaha kecil menengah, pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat, serta perekrutan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kami yang telah diberikan ruang selama ini untuk berusaha.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah Kota Tual telah berlangsung dengan baik selama ini. Melalui pola kemitraan mutualistik yang didasarkan atas kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan pemerintah daerah Kota Tual banyak hal yang telah kami terima seperti penciptaan kondisi yang aman dan kondusif dari pemerintah daerah Kota Tual kepada perusahaan kami untuk melakukan aktifitas juga penyederhanaan berbagai regulasi daerah yang menguntungkan bagi pengembangan usaha yang kami jalankan.

Tual, 26 Juni 2013  
Narasumber,



Honganda Lestari

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Wan Hamud  
Jabatan/Pekerjaan : Pelaku Usaha  
Tempat Wawancara : Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 27 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Peran kami sebagai pelaku usaha dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual diantaranya melalui pengalokasian dana bagi pembangunan infrastruktur dasar.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Pemerintah Daerah Kota Tual tetap berkomitmen untuk menerapkan strategi pembangunan yang selain *pro poor* juga *pro bisnis*. Untuk itu strategi kebijakan pembangunan yang disusun telah benar-benar memberikan peluang bagi kami selaku pihak swasta untuk berpartisipasi aktif dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

Tual, 27 Juni 2013  
Narasumber,



Wan Hamud

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Iwan Pace  
Jabatan/Pekerjaan : Pelaku Usaha  
Tempat Wawancara : Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 27 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?

Jawaban : Sebagai pelaku usaha tentu ada tanggung jawab moril untuk mengembangkan Kota Tual melalui pembangunan. Bentuk peran kami meliputi penyediaan dana sharing bagi pelaksanaan pembangunan dan penyiapan alat serta tenaga ahli maupun tenaga terampil.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

Jawaban : Fasilitasi pemerintah daerah Kota Tual dalam kemitraan yang dibangun bersama dengan kami berupa fasilitasi dana, jaminan regulasi untuk kepastian usaha yang kami jalankan serta penyediaan informasi peluang investasi di daerah.

Tual, 27 Juni 2013  
Narasumber,



Iwan Pace



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Bapak Opick  
Jabatan/Pekerjaan : Pelaku Usaha  
Tempat Wawancara : Kota Tual  
Tanggal Wawancara : 28 Juni 2013  
Pewawancara : Drs. Hi. Mahmud M. Tamher

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Selain peran serta masyarakat, peran serta pelaku usaha/pemilik modal juga merupakan penentu keberhasilan pengembangan suatu wilayah tertentu. Apa saja peran Saudara/Saudari sebagai pelaku usaha/pemilik modal dalam mendukung keberhasilan pengembangan wilayah di Kota Tual?

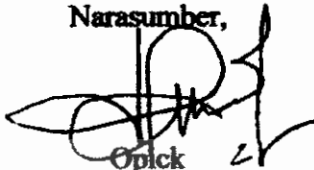
Jawaban : Peran kami sebagai pemilik modal sudah tentu sebagai penyedia dana bagi pengembangan wilayah di Kota Tual. Dana yang ada merupakan modal bagi pengembangan wilayah yang dipergunakan dalam wujud pembangunan infrastruktur. Kami menyadari ini merupakan upaya kami dalam mensiasati keterbatasan anggaran pembangunan yang dimiliki pemerintah. Lewat dana bersama ini kami yakin mampu mempercepat rencana pengembangan wilayah yang telah ada. Selain itu kami juga mengalokasikan sejumlah tenaga ahli dan siap pakai dalam setiap kegiatan pembangunan sesuai klasifikasi pekerjaan yang dilaksanakan. Tenaga kerja ahli dan siap pakai ini berupa konsultan maupun tenaga yang mampu mengaplikasikan alat-alat yang ada yang digunakan dalam kegiatan proyek yang sedang berlangsung.

2. Pertanyaan : Pelaku usaha selaku pemilik modal merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Bagaimana pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini?

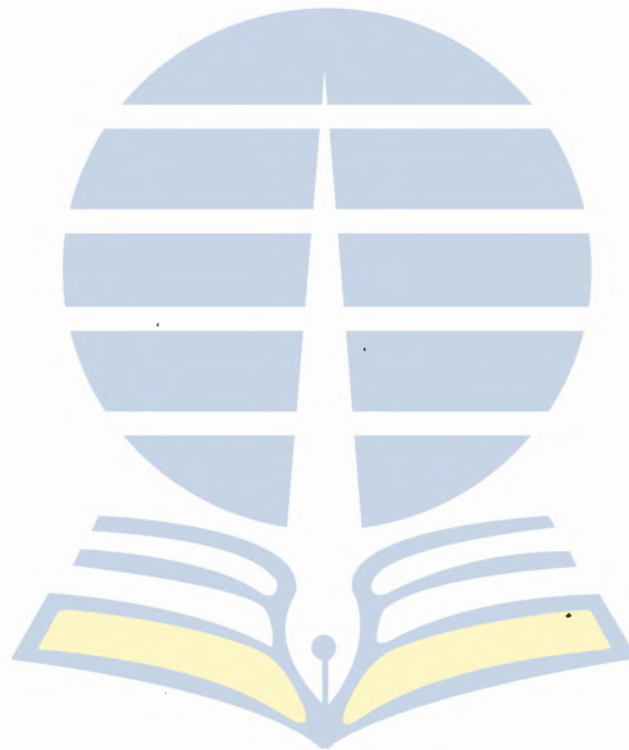
Jawaban : Pola kemitraan Pemerintah Daerah Kota Tual dengan pelaku usaha yang dijalankan selama ini dalam bentuk konsultasi bersama rencana sebuah kebijakan yang akan diambil. Kami juga dibuka peluang yang luas dalam memberikan rekomendasi terhadap sebuah kebijakan tersebut. Mediasi pemerintah daerah Kota Tual terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara kami dengan masyarakat menjadi sebuah produk kemitraan yang

positif selama ini karena menentukan masa depan usaha yang kami tanam saat ini dan seterusnya di Kota Tual.

Tual, 28 Juni 2013  
Narasumber,



Opick



## Lampiran 5

**PEDOMAN OBSERVASI**

No.	Hal yang diamati		Tanggal dan Hasil Observasi
	Aspek	Indikator	Tanggal.....2013
1.	Pembangunan fisik	Ketersediaan infrastruktur dasar meliputi: transportasi baik berupa jalan dan jembatan maupun moda transportasi, jaringan komunikasi, sanitasi, jaringan air bersih, dan jaringan listrik, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.	<i>Hasil observasi</i>
2.	Pembangunan spasial	Penetapan wilayah berdasarkan kekhasan suatu wilayah dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.	<i>Hasil observasi</i>



## Lampiran 6

**LEMBAR HASIL OBSERVASI**

No.	Hal yang diamati		Tanggal dan Hasil Observasi
	Aspek	Indikator	Tanggal 29 Juni s.d. 16 Juli 2013
1.	Pembangunan fisik	Ketersediaan infrastruktur dasar meliputi: transportasi baik berupa jalan dan jembatan maupun moda transportasi, jaringan komunikasi, sanitasi, jaringan air bersih, dan jaringan listrik, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan	<p>Observasi tanggal 29 Juni s.d. 5 Juli 2013 di Kecamatan Tayando Tam</p> <p><u>Hasil observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Pelabuhan Laut Tayando yang hampir selesai dibangun.</li> <li>- Terdapat Pelabuhan Penyeberangan yang masih dalam tahap pembangunan.</li> <li>- Kondisi jalan di Ibukota Kecamatan baik, begitupun dengan beberapa desa sehingga mempermudah aksesibilitas masyarakat. Untuk beberapa desa yang lain sedang dilaksanakan peningkatan kualitas jalan.</li> <li>- Terdapat 3 armada kapal penyeberangan yang melintasi wilayah Kecamatan Tayando Tam yaitu: KMP. Tanjung Madlahar, KMP. Teluk Cendrawasih II, dan KMP. Lobster dengan rute Tual-Tayando-Kur pulang pergi. Frekuensi 2 kali dalam seminggu.</li> <li>- Terdapat PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) pada Kantor Camat Tayando, Jasa Akses Telekomunikasi</li> </ul>

			<p>dan Informatika di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO tepatnya di Desa Yamtel dan Desa Tam.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sumber air minum utama yang digunakan masyarakat Tayando Tam adalah sumur. Mereka juga menggunakan air hujan sebagai sumber air minum ketika musim hujan. Terdapat beberapa bak penampung berukuran besar yang dibangun pemerintah sehingga dapat menampung kebutuhan air minum masyarakat setempat.</li><li>- Belum semua desa di Kecamatan Tayando Tam terjangkau listrik PLN. Guna memenuhi kebutuhan listrik pemerintah menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Tenaga Diesel, diantaranya terdapat di Desa Taam Nguhur.</li><li>- Terdapat 9 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di seluruh Desa di Kecamatan Tayando Tam, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 4 dan berada di desa-desa tertentu saja, tetapi semua Desa rata-rata bisa menjangkau fasilitas SLTP yang ada dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang terletak di ibukota Kecamatan Tayando Tam, yaitu di Desa Tayando Yamtel.</li></ul>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Kecamatan Tayando Tam terdapat 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 9 Posyandu dan 2 Polindes/Poskesdes. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, terdapat 1 dokter, 23 mantri kesehatan, 5 bidan, 17 dukun terlatih dan 19 dukun yang tidak terlatih.</li> </ul> <p>Observasi tanggal 6 s.d. 9 Juli 2013 di Kecamatan Dullah Utara</p> <p><u>Hasil observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Dullah Utara dapat dijangkau dengan kendaraan darat dengan desa terjauh yakni Desa Labetawi, hanya Desa Dullah Laut dijangkau menggunakan kendaraan laut.</li> <li>- Kondisi jalan baik di Ibukota Kecamatan maupun desa-desa lainnya sangat baik.</li> <li>- Terdapat PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) pada Kantor Camat Dullah Utara, Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO tepatnya di Desa Ohoitahit.</li> <li>- Terdapat pembangunan Jaringan-jaringan atau saluran sanitasi pada setiap pemukiman penduduk tertata dengan baik.</li> <li>- Sumber air minum utama yang digunakan</li> </ul>
--	--	--	---



			<p>masyarakat Dullah Utara, kecuali masyarakat di beberapa desa lainnya menggunakan ledeng dengan tekanan surya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sumber penerangan listrik PLN menjangkau semua Desa di Kecamatan Dullah Utara, kecuali Desa Dullah Laut yang letaknya di pulau terpisah. Masyarakat Desa Dullah Laut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai penerangan.</li><li>- Terdapat 12 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di seluruh Desa di Kecamatan Dullah Utara, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 5 dan berada di desa-desa tertentu saja, tetapi semua Desa rata-rata bisa menjangkau fasilitas SLTP yang ada dan 4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang terletak di Desa Fiditan, Desa Tamedan, dan Desa Dullah.</li><li>- Di Kecamatan Dullah Utara terdapat 1 Puskesmas, 4 Puskesmas Pembantu, 9 Poskesdes. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, terdapat 4 dokter, 13 mantri kesehatan, 17 bidan, 19 dukun terlatih dan 18 dukun yang tidak terlatih.</li></ul> <p>Observasi tanggal 10 s.d. 14 Juli 2013 di Kecamatan Pulau-Pulau Kur</p> <p><u>Hasil observasi:</u></p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat jembatan penyeberangan antar pulau.</li><li>- Tersedia dermaga tambat kapal ferry.</li><li>- Kondisi jalan di Ibukota Kecamatan baik, begitupun dengan beberapa desa sehingga mempermudah aksesibilitas masyarakat. Tersedia juga jalan lingkaran yang menghubungkan antar desa-desa terluar dari Kota Tual. Untuk beberapa desa yang lain sedang dilaksanakan peningkatan kualitas jalan.</li><li>- Terdapat 3 armada kapal penyeberangan yang melintasi wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur yaitu: KMP. Tanjung Madlahar, KMP. Teluk Cendrawasih II, dan KMP. Lobster dengan rute Tual-Tayando-Kur pulang pergi. Frekuensi 2 kali dalam seminggu.</li><li>- Terdapat PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) pada Kantor Camat Pulau-pulau Kur, Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika di daerah Perbatasan dan Pulau Terluar (Telinfo-Tuntas) KPU/USO tepatnya di Desa Fatbuak.</li><li>- Sumber air minum utama yang digunakan masyarakat Pulau-pulau Kur adalah sumur. Mereka juga menggunakan air hujan sebagai sumber air minum ketika musim hujan. Terdapat beberapa</li></ul>
--	--	--	--

			<p>bak penampung berukuran besar yang dibangun pemerintah sehingga dapat menampung kebutuhan air minum masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum semua desa di Kecamatan Pulau-pulau Kur terjangkau listrik PLN. Guna memenuhi kebutuhan listrik pemerintah menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Tenaga Diesel, diantaranya terdapat di Desa Sermaf dan Desa Mangur.</li> <li>- Terdapat 11 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di seluruh Desa di Kecamatan Pulau-pulau Kur, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 4 dan berada di desa-desa tertentu saja, tetapi semua Desa rata-rata bisa menjangkau fasilitas SLTP yang ada dan 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang terletak di Desa Tubyal dan Desa Kanara.</li> <li>- Di Kecamatan Pulau-pulau Kur terdapat 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 4 Polindes/Poskesdes. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, terdapat 2 dokter, 19 mantri kesehatan, 3 bidan, 5 dukun terlatih dan 24 dukun yang tidak terlatih.</li> </ul> <p>Observasi tanggal 15 s.d. 16 Juli 2013 di Kecamatan Dullah Selatan</p>
--	--	--	--



			<p><u>Hasil observasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Dullah Selatan dapat dijangkau dengan kendaraan darat dengan desa terjauh yakni Desa Dumar, hanya Desa Dusun Pulau Ut dijangkau menggunakan kendaraan laut.</li> <li>- Kondisi jalan baik di Ibukota Kecamatan maupun desa-desa lainnya sangat baik</li> <li>- Terdapat pelabuhan laut yang melayani pelayaran kapal Pelnis dan dijadikan sebagai pelabuhan peti kemas.</li> <li>- Terdapat PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) pada Kantor Camat Dullah Selatan.</li> <li>- Terdapat pembangunan Jaringan-jaringan atau saluran sanitasi pada setiap pemukiman penduduk tertata dengan baik.</li> <li>- Sumber air minum utama yang digunakan masyarakat Dullah Utara adalah sumur. Beberapa juga menggunakan air ledeng dari PDAM.</li> <li>- Sumber penerangan listrik PLN menjangkau semua Desa di Kecamatan Dullah Utara, kecuali Dusun Pulau Ut yang letaknya di pulau terpisah. Masyarakat Dusun Pulau Ut menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai penerangan.</li> <li>- Terdapat 20 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>di seluruh Desa di Kecamatan Dullah Selatan, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 6 dan berada di desa-desa tertentu saja, tetapi semua Desa rata-rata bisa menjangkau fasilitas SLTP yang ada dan 7 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang terletak di Desa Taar, Desa Tual, Kelurahan Ketsoblak dan Lodar El, Perguruan Tinggi sebanyak 3 buah. Di Kecamatan Dullah Selatan terdapat 2 Puskesmas, 2 Puskesmas Pembantu, 10 Poskesdes. Sedangkan untuk tenaga kesehatan, terdapat 11 dokter, 48 perawat kesehatan, 10 bidan, 44 dukun terlatih dan 10 dukun yang tidak terlatih.</p>
<p>Pembangunan spasial</p>	<p>Penetapan wilayah berdasarkan kekhasan suatu wilayah dalam aktivitas sosial maupun ekonomi.</p>	<p><b>Kawasan Perdagangan:</b></p>	<p>Kecamatan Dullah Selatan merupakan kawasan perdagangan. Hal ini nampak dari adanya 3 buah pasar besar yakni Pasar Tual, Pasar Masrum, dan Pasar Lodar El. Jumlah toko/kios sebanyak 1.429 buah yang letaknya tersebar baik di pasar itu sendiri maupun di lokasi-lokasi pemukiman. Aktifitas perdagangan ini berkembang pesat juga karena adanya Pelabuhan Laut yang melayani rute pelayaran Kapal PELNI dari Jawa-Sulawesi-Ambon-Tual-Papua pulang pergi serta adanya aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan dimaksud.</p>

		<p>Terdapat 3 Bank Pemerintah (BRI, BNI, BPTN) dan 2 BPR (Bank Artha Graha dan Bank Danamon), 6 KSP dan 14 koperasi lainnya.</p> <p><b>Kawasan Pertanian:</b> Kecamatan Dullah Utara merupakan kawasan pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi utama yang menunjang kehidupan masyarakat di Kecamatan Dullah Utara, terutama pertanian palawija. dari keseluruhan luas areal Kecamatan Dullah Utara sebesar 70,85 Km<sup>2</sup>, yang digunakan sebagai areal pertanian adalah sebesar 10,25 Km<sup>2</sup> atau sekitar 15% dari luas areal. Desa Ohoitel misalnya, merupakan sentra sayur-sayuran di Kota Tual dan dipasok ke seluruh pasar-pasar di Kota Tual. Selain terkenal sebagai kawasan pertanian, di perairan Kecamatan Dullah Utara juga terlihat banyak aktifitas budidaya rumput laut masyarakat setempat.</p> <p><b>Kawasan Pesisir:</b> Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam merupakan kawasan pesisir. Hal ini nampak dari aktifitasnya yang bertumpu pada subsektor Perikanan. Subsektor ini meskipun sangat besar kontribusinya di Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam tetapi masih didominasi oleh nelayan tradisional. Hal itu terlihat dari perahu yang digunakan, yang sebagian</p>
--	--	---



			<p>besar Perahu tak Bermotor, dan alat penangkapan ikan utama yang digunakan yaitu Pancing. Potensi wisata bahari sangat indah di 2 kecamatan ini. Panorama bawah lautnya sangat indah dan menjadi tujuan para penyelam baik lokal maupun mancanegara. Di perairan Kecamatan Pulau-pulau Kur dan Kecamatan Tayando Tam terlihat banyak sekali kegiatan budaya rumput laut.</p> <p><b>Kawasan Industri:</b> Kecamatan Dullah Utara merupakan kawasan industri karena di Kecamatan ini tepatnya di Desa Ngadi terdapat Perusahaan Pengalengan Ikan (PT. Maritim Timur Jaya) dengan pasar ekspor sampai ke luar negeri. Lokasinya sangat luas dengan karyawan yang sangat banyak. Selain itu di Desa Labetawi juga berdiri Cold Storage dan Depo Rumput Laut.</p>
--	--	--	--

Lampiran 7

**DOKUMENTASI HASIL OBSERVASI**



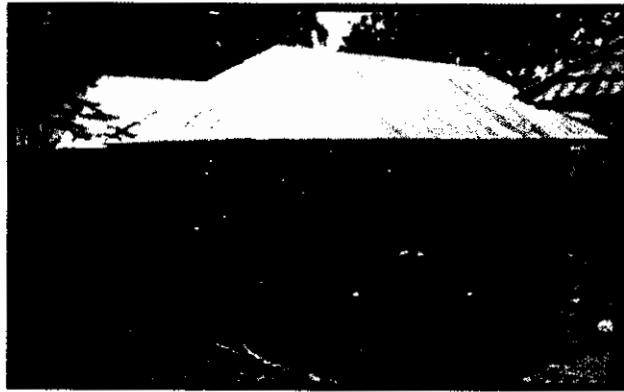
**Pembangunan Poskesdes Fitarlor,  
Kecamatan PP. Kur Kota Tual**



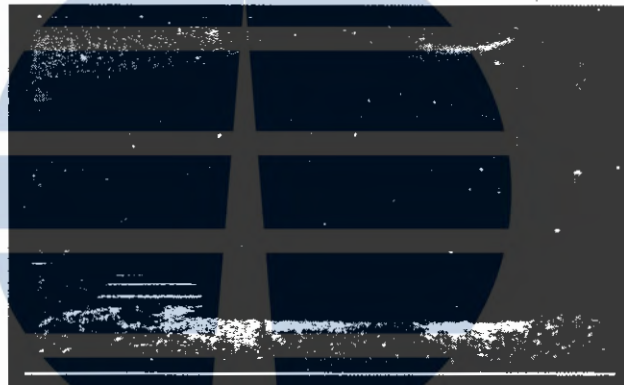
**Pembangunan Rumah Dinas Perawat  
Puskesmas Tam, Kecamatan Tayando Tam  
Kota Tual**



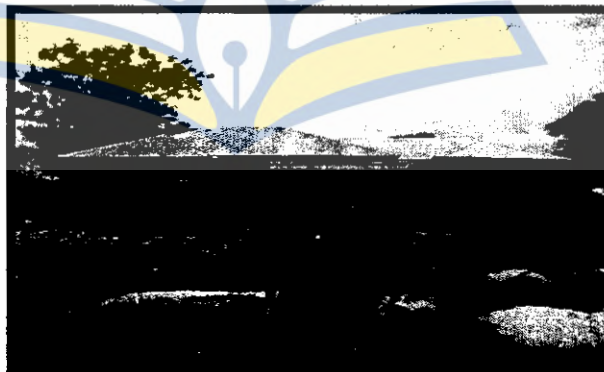
**Pembangunan Rumah Dinas Dokter  
Puskesmas Tam, Kecamatan Tayando Tam  
Kota Tual**



**Pembangunan Gedung Puskesmas Tam  
Ngurhir, Kecamatan Tayando Tam Kota  
Tual**



**Pembangunan Rumah Dinas Perawat  
Puskesmas Ohoitahit, Kecamatan Dullah  
Utara Kota Tual**



**Pembangunan Gedung Puskesmas Warkar,  
Kecamatan PP. Kur Kota Tual**





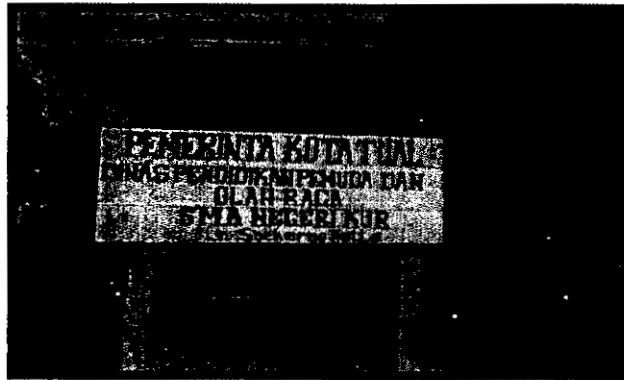
**Pembangunan Gedung Puskesmas Yamru,  
Kecamatan Tayando Tam Kota Tual**



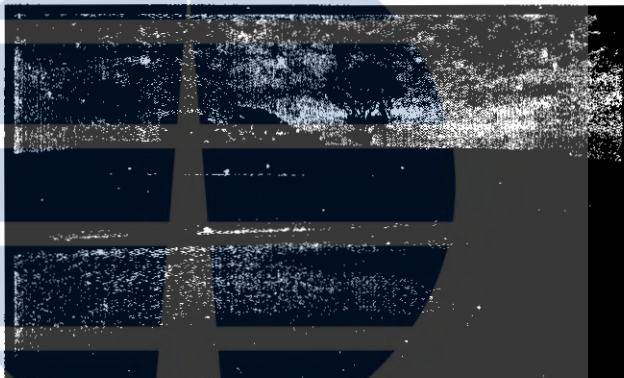
**Rehab SDN Kilsoin, Kecamatan PP. Kur  
Kota Tual**



**Rehab SDN Warkar, Kecamatan PP. Kur  
Kota Tual**



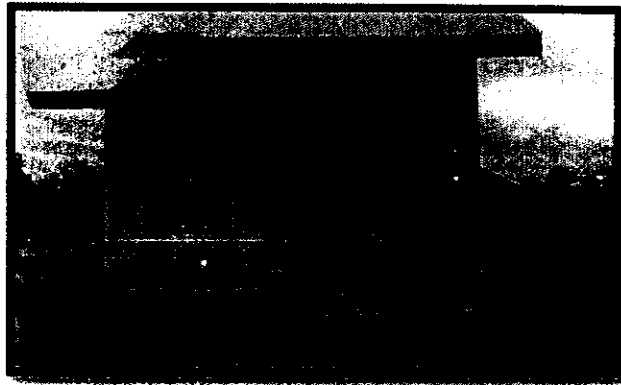
**Rehab SMA Negeri Kur, Kecamatan PP.  
Kur Kota Tual**



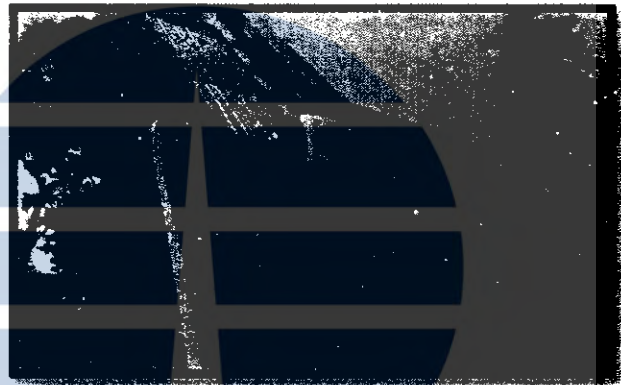
**Rehab SDN Kanara, Kecamatan PP. Kur  
Kota Tual**



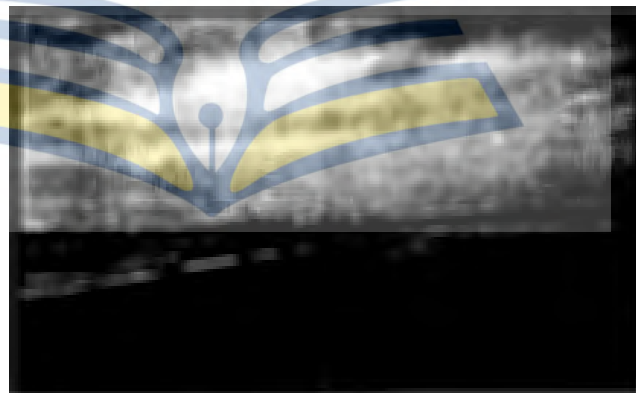
**SMP Negeri 1 Kecamatan PP. Kur Kota  
Tual**



**Pembangunan Rumah Dinas Jabatan  
Kepala SMA Negeri Tayando, Kecamatan  
Tayando Tam Kota Tual**

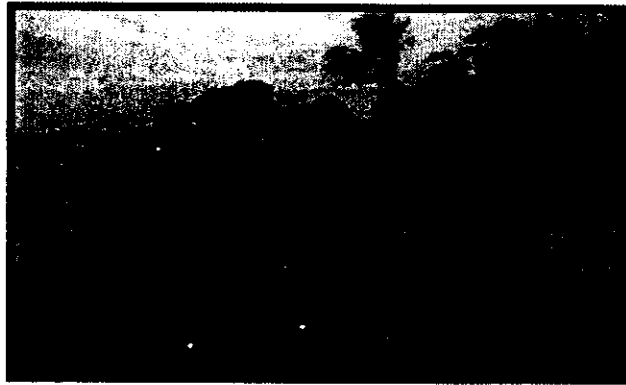


**Pembangunan Rumah Dinas Jabatan  
Kepala SMA Negeri Kur, Kecamatan PP.  
Kur Kota Tual**

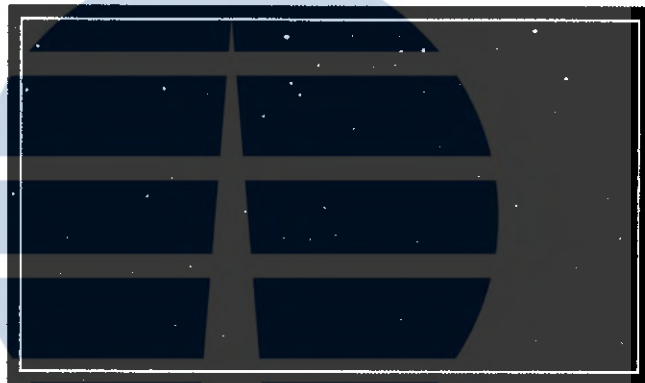


**Pembangunan Jembatan Penghubung antar  
Pulau di Kecamatan PP. Kur Kota Tual**

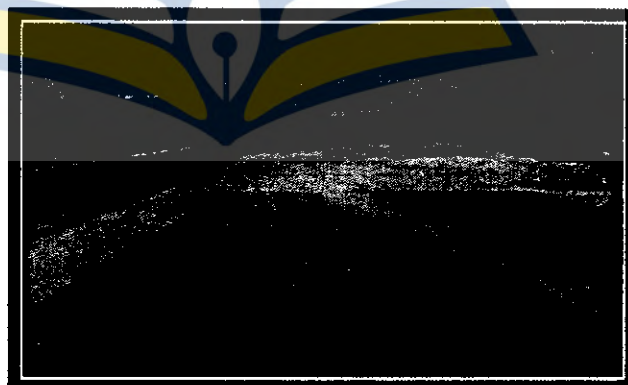




**Pembangunan Jalan Lingkar di Kecamatan  
PP. Kur Kota Tual**



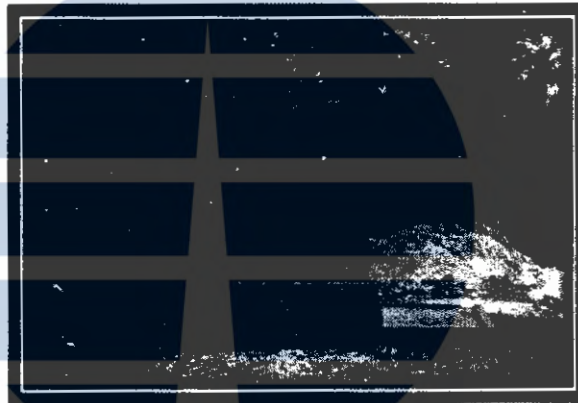
**Peningkatan Jalan di Kecamatan Tayando  
Tam Kota Tual**



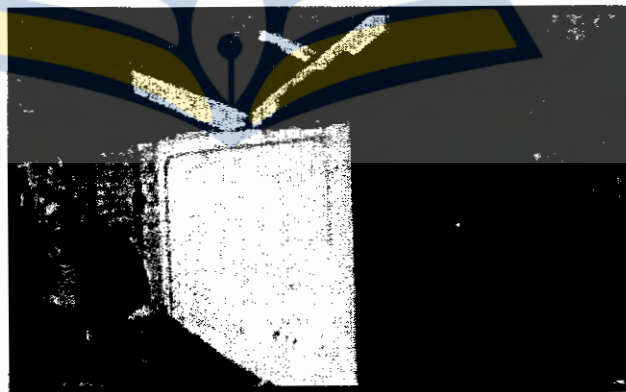
**Peningkatan Jalan Raya Ohoitel,  
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual**



**Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa Ohoitahit, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual**



**Peningkatan Jaringan Air Bersih Desa Dullah, Kecamatan Dullah Utara Kota Tual**



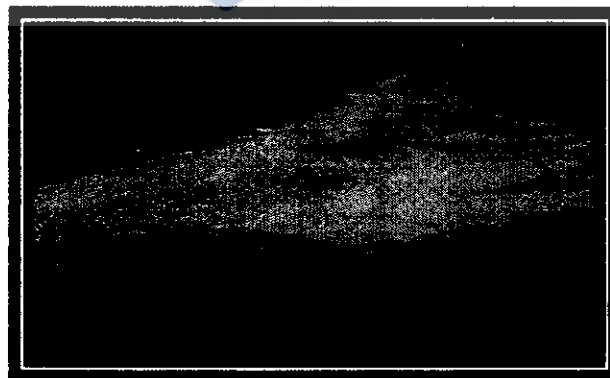
**Pembangunan Bak Penampung Air Hujan Desa Kaimear, Kecamatan PP. Kur Kota Tual**



**Pembangunan Bak Penampung dan Jaringan Pipa, Kecamatan Tayando Tam Kota Tual**

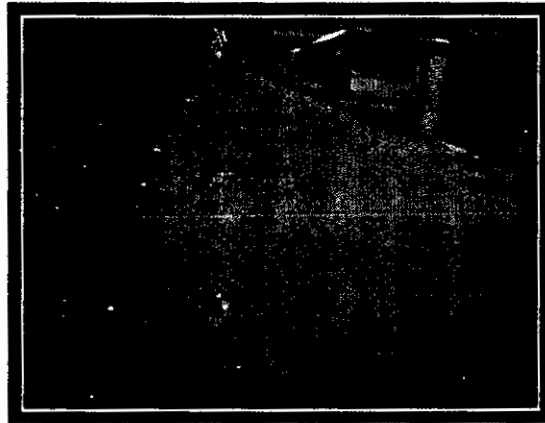


**Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa Sermaf, Kecamatan PP. Kur Kota Tual**

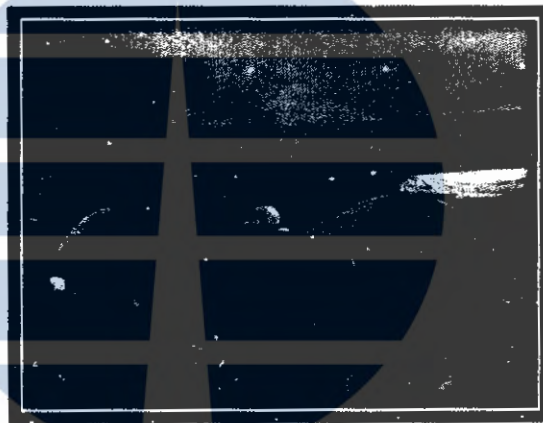


**Peningkatan Jalan Taar Belakang, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual**

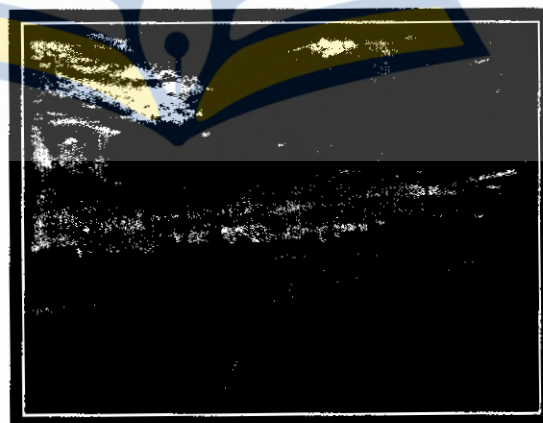




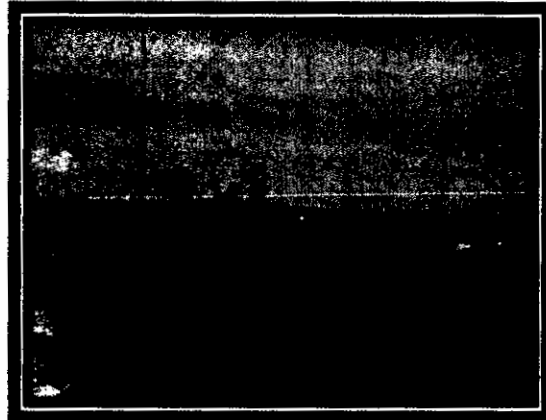
**Peningkatan Jalan Dusun Mangon,  
Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual**



**Rehabilitasi Pasar Ikan, Kecamatan Dullah  
Selatan Kota Tual**



**Pengadaan Lampu Jalan PLTD, Kecamatan  
Dullah Selatan Kota Tual**



**Pengadaan Lampu Jalan PLTS, Kecamatan  
Tayando Tam Kota Tual**



**Pembangunan Cold Storage Desa Labetawi,  
Kecamatan Dullah Utara Kota Tual**



**Pembangunan Depo Rumput Laut Desa  
Labetawi, Kecamatan Dullah Utara Kota  
Tual**

**PROGRAM/KEGIATAN SKPD KOTA TUAL DALAM  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  
SELAMA TAHUN 2011-2013**

**MATRIK RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN LAPORAN TARGET SERTA PENDANAAN  
FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAD PERCEPATAN PERCAJAPAN MDGs KOTA TUAL TAHUN 2011**

**Kota Tual**

Tujuan 1 : Meneradaskan Kemiskinan dan Kelaparan

NO	PROGRAM / AKBARAT	INDIKATOR / OUTPUT	Target RAD MDGs 2011	Target APBD/APBN	REALISASI TARGET 2011				Alokasi Dana APBD/APBN 2011	Realisasi Pelaksanaan Dana DDI1 Triwulan I - III	Realisasi Pelaksanaan Dana DDI1 Triwulan IV	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4					
1													
	<p><b>Target 1.A : Memeratakan Income dan mengurangi kesenjangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, terutama untuk penduduk miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah</b></p> <p><b>Indikator MDGs :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proportional share of population living on less than US\$ 1.00 (PPP) per day per year</li> <li>2. Ratio of population living on less than US\$ 1.00 (PPP) per day per year</li> <li>3. Proportional share of population living on less than US\$ 1.00 (PPP) per day per year</li> </ol>												
	<p><b>Program Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdilaksanakannya kegiatan pelatihan/ seminar</li> <li>2. Terdilaksanakannya pemberian bantuan/ subsidi</li> <li>3. Terdilaksanakannya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin</li> </ol>												
			127 orang	127 orang								APBD	Dinas
			200 orang	200 orang				60.000.000,00			30.822.300.000,00	APBD	Dinas
			500 Org	500 Org								APBD	Dinas
	<p><b>Program Kegiatan Bina Desa</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdilaksanakannya kegiatan KB dan ARI (Kampung Sehat) bagi Kampung Sehat</li> </ol>												
			37 orang	37 orang				31.015.000,00			31.015.000,00	DAN	BKPCPA
	<p><b>Program Pemberdayaan Rata-Rata, Mekanisme Keterkaitan Sosial (PKS) dan Mekanisme Keterkaitan Sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme keterkaitan sosial</li> <li>2. Mekanisme keterkaitan sosial</li> </ol>												
			50 KK	50 KK								APBD	Dinas
	<p><b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya kegiatan pertemuan</li> <li>2. Meningkatnya jumlah pertemuan</li> </ol>												
			20 Dikumen	20 Dikumen				138.180.000,00			130.285.000,00	APBD	BKPCPA
			100 Jml	100 Jml				642.750.000,00			612.081.000,00	APBD	BKPCPA
	<p><b>Target 1.B : Meningkatkan kesempatan kerja untuk dan produktivitas dan lapangan kerja layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda</b></p> <p><b>Indikator MDGs :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan PKB per kapita</li> <li>2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</li> <li>3. Proportional share of population living on less than US\$ 1.00 (PPP) per day per year</li> </ol>												
	<p><b>Program Peningkatan Keterampilan Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya kegiatan pelatihan/ seminar</li> </ol>												
			50 Org	50 Org				112.248.000,00			112.248.000,00	APBD	Dinas



NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	Target RAD 2011	Target APBUDPMS	REALISASI TARGET 2011				Alokasi Dana APBD/APBN 2011	Realisasi Pengeluaran Dana 2011	SUMBER PERORANGAN	PELAKSANA
					Triwulan 1 - IV							
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4				
<b>Program Pemeliharaan Anak Terancam</b> 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terancam												
		1. Meningkatnya ketertarikan kerja anak Terancam Terancam	2 Orang	2 Orang					32.850.000,00		APBD	Dinas
<b>Program Perbaikan dan Pemeliharaan Lantai</b> 1. Meningkatnya penguasaan, peningkatan dan peningkatan mutu terhadap keselamatan dan kesehatan kerja												
		1. Meningkatnya penguasaan, peningkatan dan peningkatan mutu terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	30 Perbaikan	30 Perbaikan					33.798.000,00		APBD	Dinas
2. Penyusunan Database Keterselamatan												
		2. Tersedianya database ketersediaan	Buku	Buku					32.785.000,00		APBD	Dinas
<b>TARGET (C) : Meningkatkan NPMs dengan upaya Koperasi, Pendukung, dan Mendukung Koperasi</b> Indikator MOGA : 1. Meningkatkan 2. Kegiatan Koperasi												
<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b> 1. Peningkatan layanan makanan dan vitamin 2. Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Berat, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zink Gizi Mikro lainnya												
		1. Tersedianya layanan makanan dan vitamin bagi ibu hamil dan bayi balita	2.500 Ibu Hamil dan bayi balita	2.500 Ibu Hamil dan bayi balita					49.775.000,00		APBD	Dinas
		2. Tersedianya menu status gizi bayi balita	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, dan 30 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, dan 30 Puskesmas					20.000.000,00		APBD	Dinas
		3. Tersedianya 36 petugas gizi Puskesmas dan Puskesmas dari 103 petugas yang ditransfer	18 Puskesmas	18 Puskesmas					30.000.000,00		APBD	Dinas
<b>Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat</b> 1. Peningkatan layanan kesehatan												
		1. Tersedianya Dana Koperasi	Dana Koperasi	Dana Koperasi					64.128.000,00		APBD	Kantor Kesehatan Pangan
<b>Program Pemeliharaan Praktek Terampil (PMP)</b> 1. Tersedianya kegiatan pelatihan dengan pangan												
		1. Tersedianya kegiatan pelatihan dengan pangan	1 Unit	1 Unit					471.880.000,00		APBD	Kantor Kesehatan Pangan

**MATRIKS RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN LAPORAN TARGE1 SERTA PENDANAAN  
FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs KOTA TUAL TAHUN 2012**

Kota Tual  
Tujuan 1 : Mمبرantas Kemiskinan dan Kelaparan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	Targe1 RAD SIDG 2012	Yang di APD/RUP 2012	REALISASI TARGE1 2012				Alokasi Dana APD/RUP 2012	Realisasi Pelaksanaan Dana 2012				SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
					Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4		Triwulan I - III	Triwulan IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<p><b>Targe1 JA :</b> Meningkatkan harga ekspor/nilai tambah produk dan pendapatan rumah tangga dari USD 1,00 (Rp1) per kepala per hari</p> <p><b>Indikator MDGs :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosesi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (Rp1) per kepala per hari</li> <li>2. Rasio kesenjangan kemiskinan</li> <li>3. Proporsi warga miskin dalam konsumsi pangan</li> </ol> <p><b>Program Pelayanan Kesehatan Perilaku</b></p>															
1	Pelayanan Operasi Katerak	1 Terlaksananya operasi katerak	127 orang/tahun	127 orang/tahun	127 orang/tahun				286.563.776,00	193.663.776,00			APBD	Dinas	
2	Pelayanan Buntan Masud	2 Terlaksananya buntan masud	200 orang/tahun	200 orang/tahun					30.000.000,00	21.980.000,00			APBD	Dinas	
3	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tula Mampu	3 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Tula mampu	800 Orng	800 Orng					60.000.000,00	48.146.000,00			APBD	Dinas	
<p><b>Program Kesehatan, Bercocok</b></p>															
1	Pelayanan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	1 Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin secara gratis	37 Orang	37 Orang					82.878.000,00	82.866.000,00			DAK	BPPR/BPA	
<p><b>Program Pemberdayaan Palar Miskin, Komunitas (KPM), Sekolah (PKPS), Lembaga</b></p>															
1	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	1 Meningkatkan keterampilan keluarga miskin	60 KK	60 KK					66.746.000,00	21.875.000,00			APBD	Dinas/mater	
<p><b>Program Perbaikan Fasilitas Masyarakat</b></p>															
1	Atasi Dasa Kerdahan Dasa	1 Terlaksananya atasi kerdahan daseh	20 Dukuhan	20 Dukuhan					128.160.000,00	120.265.000,00			APBD	BRMPD	
2	Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Merau (PMM)	2 Meningkatkan jumlah penduduk miskin menjadi 800 Jwa pada tahun 2015	100 Jwa	100 Jwa					842.730.000,00	812.021.000,00			APBD	BRMPD	
<p><b>Targe1 JB :</b> Meningkatkan kemampuan bagi pemilik dan produsen yang layak untuk menjual, termasuk perantara dan pasar modal</p> <p><b>Indikator MDGs :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja</li> <li>2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 16 tahun ke atas</li> <li>3. Proporsi warga yang terampil untuk bekerja di sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, perikanan</li> </ol> <p><b>Program Perbaikan Keterampilan Kerja</b></p>															
1	Pengembangan Kemampuan Produktifitas dan Pelatihan Keterampilan	1 Terlaksananya kemampuan keahlihan produk dan meningkatnya kemampuan keterampilan keahlihan	40 Orng	40 Orng					113.739.000,00	113.739.000,00			APBD	Dinas/mater	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	Target RAG MDOs 2012	Target APRODIAPAN 2012	REALISASI TARGET 2012				Abstrak Dana APRODIAPAN 2012	Realisasi Pengeluaran Dana 2012	SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
					Trimester 1	Trimester 2	Trimester 3	Trimester 4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Program Pembinaan Anak Terbelakang</b> 1. Pelatihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi Anak Terbelakang													
			2 Orang	2 Orang					24.925.000,00		APBD	Diklat	
<b>Program Peningkatan dan Penguatan Lembaga</b> 1. Meningkatkan program, peningkatan dan peningkatan forum pengabdian publik terhadap Kementerian dan Kesehatan Kerja													
			30 Perusahaan	30 Perusahaan					48.275.000,00		APBD	Diklat	
2. Teradanya database kategorisasi													
			Buku	Buku					21.425.000,00		APBD	Diklat	
<b>Target IC: Meneruskan Inisiatif Program Pendukung yang Mendukung Kelahiran Indikator MDOs:</b> 1. Makanan Anak 2. Kesehatan Keluarga MSB01													
<b>Program Peningkatan Gizi Masyarakat</b> 1. Pembinaan Timbunan dan Vitamin													
			2.800 Ibu hamil dan bayi balita	2.800 Ibu hamil dan bayi balita					86.000.000,00		APBD	Diklat	
2. Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gempolan Akut, Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya													
			12 Puskesmas, 7 Puskesmas, dan 38 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, dan 38 Puskesmas					20.000.000,00		APBD	Diklat	
3. Peningkatan keterampilan Petugas Gizi													
			18 Petugas pemangkas program gizi di Puskesmas dan Petak dari 100 petugas yang direncanakan	18 Petugas pemangkas program gizi di Puskesmas					30.000.000,00		APBD	Diklat	
<b>Program Peningkatan Kesehatan Pemasok</b> 1. Peningkatan Desa Rawan Pangan													
			Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan					64.128.000,00		APBD	Kantor Kabupaten Pangan	
<b>Program Peningkatan Produksi Vegetasi Pangan</b> 1. Penyediaan Gudang Penyimpanan Cadangan Pangan													
			1 Unit	1 Unit							APBD	Kantor Kabupaten Pangan	





**MATRIKS RENCANA PROGRAM/KEGIATAN DAN LAPORAN TARGET SERTA PENDANAAN  
FORMULIR PEMANTAUAN PELAKSANAAN RAD PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs KOTA TUAL TAHUN 2013**

Kota Tual

Tujuan 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	Target RAD MDGs 2013	Target APBD/APBN 2013	REALISASI TARGET 2013				Alokasi Dana APBD/APBN 2013	Realisasi Penyerapan Dana 2013		SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA
					Trialulan 1	Trialulan 2	Trialulan 3	Trialulan 4		Trialulan 2	Trialulan 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Target 1A : Menurunkan tingkat ketidakhaya proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi kurang dari US\$ 1 per hari dalam kurun waktu 1999 - 2016</b>													
<b>Indikator MDGs :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US\$ 1,00 (PPP) per kapita per hari</li> <li>Rasio kesenjangan kemiskinan</li> <li>Proporsi laki-laki termiskin dalam konsumsi nasional</li> </ol>													
<b>Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin</b>													
1	Pelayanan Operasi Katarak	1 Terlaksananya operasi katarak	127 org/tahun	127 org/tahun			127 Org		200.000.000,00			APBO	Dinas
2	Pelayanan Sunatan Massal	2 Terlaksananya sunatan massal	200 org/tahun	200 org/tahun			200 org/tahun		25.000.000,00			APBO	Dinas
3	Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu	3 Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu	500 Org	500 Org	150	100	150	100	30.000.000,00	13.296.000		APBO	Dinas
<b>Program Keluarga Berencana</b>													
1	Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	1 Tersedianya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	37 Orang	37 Orang			37 Orang		40.083.000,00	4.408.000		DAK	BPPR/BPA
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya</b>													
1	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	1 Meningkatnya keterampilan keluarga miskin	50 KK	50 KK			50 KK		103.155.000,00			APBO	Dinas/dinas
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam</b>													
1	Analisis Data Kemitraan Daerah	1 Tersedianya data kemitraan daerah	20 Dokumen	20 Dokumen			20 Dokumen		131.282.400,00			APBO	BPM/BD
2	Operasional Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin (PPMM)	2 Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 500 jiwa pada tahun 2016	100 jiwa	100 jiwa			100 jiwa		500.000.000,00	171.145.000,00	66.650.000	APBO	BPM/BD
<b>Target 1B : Meningkatkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda</b>													
<b>Indikator MDGs :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laju pertumbuhan PDG per tenaga kerja</li> <li>Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</li> <li>Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan sebagai keluarga terhadap total kesempatan kerja</li> </ol>													
<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>													
1	Pengembangan Lembaga Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	1 Terwujudnya lembaga produktif dan meningkatkan kemampuan kewirausahaan	40 Org Wirausaha Baru	40 Org Wirausaha Baru			40 Org Wirausaha Baru		112.246.500,00			APBO	Dinas/dinas
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>													
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Kerja bagi Anak Terlantar	1 Meningkatnya keterampilan kerja anak terlantar	2 Orang	2 Orang			2 Orang		32.850.000,00			APBO	Dinas/dinas

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	Tempat RAO MDGs 2015	Tempat APBUDAH 2015	REALISASI TARGET 2015					Alokasi Dana APBD/APBN 2015	Realisasi Pelaksanaan Dana 2015			SUMBER PENDANAAN	PELAKSANA	
					TRIMESTER						Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3			Triwulan 4
					1	2	3	4	5							
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14		
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Lembaga</b>																
1	Peningkatan Perencanaan, Perinderaan dan Peningkatan Mutu terhadap Kelembagaan dan Kesehatan Kerja	1. Meningkatkan perencanaan, perinderaan dan peningkatan mutu bagi 20 perusahaan dan Kelembagaan Kerja 2. Tersedianya database Kelembagaan/Perencanaan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	30 Perusahaan SD Perumahan	
2	Penyusunan Database Kelembagaan/Perencanaan	1. Meningkatkan perencanaan, perinderaan dan peningkatan mutu bagi 20 perusahaan dan Kelembagaan Kerja 2. Tersedianya database Kelembagaan/Perencanaan	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	Buku	
<b>Target IG: Memurahkan Ningsa segenapnya Propors Pembudid yang Mendefinis Kelapastrah</b>																
<b>Indikator MDGs :</b>																
1. Memurahi Anak																
2. Kelompok Keluarga Kabari																
<b>Program Peningkatan Gizi Masyarakat</b>																
1	Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Vitamin	1. Tersedianya materi pembaruan terdistribusi ke rumah-rumah dan vitamin bagi ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	2.000 Ibu hamil dan bayi balita	
2	Peningkatan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gempuan Akut, Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	1. Tersedianya materi pembaruan terdistribusi ke rumah-rumah dan vitamin bagi ibu hamil dan bayi balita 2. Tersedianya materi pembaruan terdistribusi ke rumah-rumah dan vitamin bagi ibu hamil dan bayi balita	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	12 Puskesmas, 7 Puskesmas, 33 Puskesmas	
3	Peningkatan Keterampilan Pelugas Gizi	1. Tersedianya 30 pelugas gizi Puskesmas dan Puskesmas dari 103 pelugas yang direncanakan	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	18 Pelugas pemegang program gizi di Puskesmas	
<b>Program Peningkatan Kesehatan Pangan</b>																
1	Peningkatan Daerah Rawan Pangan	1. Tersedianya Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan	
<b>Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</b>																
1	Peningkatan Guding Penyempitan Cadangan Pangan	1. Tersedianya Guding penyempitan cadangan pangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	

## KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL NOMOR 08.d TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA TUAL



### WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 08.d TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM SEKRETARIAT PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KOTA TUAL

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Pasal 23 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten Kota, maka dalam rangka percepatan Penanggulangan dan Pemberantasan Kemiskinan di Kota Tual perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku dalam Daerah Swatantra tingkat I dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645 )
  - 2. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  - 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288 )
  - 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 )
  - 5. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 )
  - 6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );



- 2 -

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1952 tentang Pengelolaan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
13. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ( Lembaran daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 102 );

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.6/3186/SJ Tanggal 14 Desember 2009 Perihal Tindak Lanjut Penanggulangan Kemiskinan.
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 740/1045/PMD Tanggal 2 Maret 2011 tentang Penyampaian Laporan Pembentukan dan Penyempurnaan TKPK Provinsi dan Kabupaten / Kota

-3-

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas mempunyai tugas:
- Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tual
  - Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Tual
- KETIGA :** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatas, Tim menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi :
- Pengorganisasian Penyusunan SKPD Kota Tual sebagai dasar Penyusunan RPJMD Kota Tual di bidang Penanggulangan Kemiskinan
  - Pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD Bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana Strategi SKPD;
  - Pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKP
  - Pengorganisasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD.
  - Pengorganisasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana Pembangunan Daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
  - Pengendalian, pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - Pengendalian, pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - Pengendalian Evaluasi pelaksanaan Program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan
  - Pengendalian pengaduan masyarakat bidang penanganan penanggulangan kemiskinan dan
  - Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota Tual dan TKPK Propinsi.
- KEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM ke Dua dan Ke TIGA , Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual mengadakan rapat secara berkala sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- KELIMA :** Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Tual.

- 4 -

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dikurn KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Tual melalui Wakil Walikota Tual selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Tual Nomor 128 Tahun 2010 tentang Perubahan Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Kota Tual dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tual pada SKPD masing – masing;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual

Pada tanggal : 08 Januari 2011



H. MAHRUD MUHAMMAD TAMHER

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta
2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta
3. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta
5. Sekjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta
6. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jakarta
7. Gubernur Maluku di Ambon
8. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon
9. Kepala BPMPD Propinsi Maluku di Ambon
10. Kepala Bapeda Propinsi Maluku di Ambon
11. Ketua DPRD Kota Tual, di Tual;
12. Sekretaris Daerah Kota Tual, di Tual;
13. Kepala Bapeda Kota Tual di Tual
14. Inspektur Kota Tual, di Tual;
15. Kepala BPMPD Kota Tual di Tual
16. Kepala BPK&AD Kota Tual di Tual
17. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kota Tual di Tual
18. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Lampiran 10

**Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/LL/2012,  
Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan  
Data dan Informasi Penelitian**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Ambon

Jl. Wolter Mongoesidi Latari, Ambon 97231

Telepon: 0911-361303, Faksimile: 0911-361304

Laman: ut-ambon@ut.ac.id

**SURAT KETERANGAN  
Nomor : 813/UN31.51/LL/2012**

Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Ambon, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa S2 Universitas Terbuka yang namanya *terlampir* sedang melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul tertulis pada lampiran ini pada kolom *judul TAPM sebelum BTR (Bimbingan Tesis Residensial) I*. Namun dalam kegiatan Seminar Proposal pada tanggal 15 dan 16 September 2012, ternyata ada perubahan judul atas saran pembimbingnya, sehingga judul proposalnya menjadi tertulis pada kolom *Judul TAPM setelah BTR I*.

Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat mengumpulkan data /informasi sesuai kebutuhannya pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat keterangan ini diberikan atas bantuan, dukungan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ambon, 10 Oktober 2012

Kepala



Drs. Supriomo, C.B. M.Si

NIP.195210221982031002



NO	NAMA	NIM	JUDUL TAPM SEBELUM BTR 1	JUDUL TAPM SETELAH BTR 1
19.	Joseph Sikteubun	016755916	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Prosedur Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	Implementasi Kebijakan tentang Prosedur Pengobatan Gratis di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur Kabupaten Maluku Tenggara
20.	Izak Thedy Betaubun	016756022	Optimalisasi Penerapan Fungsi Akademik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Mahasiswa pada Politeknik Perikanan Negeri Tual	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>
21.	Abas Ames Hanubun, S.Sop	017106479	Analisis Kinerja DPRD Kota Tual dalam Era Otonomi Daerah	
22.	Semoel Aren Melanton Metengoen	016760459	Kinerja Pemerintah Kecamatan dalam Penyelenggaraan Good Governance (Studi Kasus tentang Pelayanan Akte Kelahiran di Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara)	Kinerja Camat dalam Peningkatan Pelayanan Akte Kelahiran di Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara
23.	Rony Lexy Putnarubun	016762889	Pelaksanaan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>
24.	Maryam Matdoan	016756362	Hubungan antara Pelayanan Dasar dan Sektor Unggulan terhadap Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Maluku Tenggara	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>
25.	Mahmud M. Tamher	016759906	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)	<b>Kebijakan Pengembangan Wilayah pada Daerah Otonom Baru (Studi Kasus Kota Tual Provinsi Maluku)</b>
26.	Anwar Renwarin	016762112	Transparansi dalam Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kota Tual	<i>Tidak mengalami perubahan judul</i>

**Surat Keterangan Izin Penelitian Kepala Badan  
Kesbangpolinmas Kota Tual, Nomor 070/170/2013,  
Tanggal 3 Juni 2013**



**PEMERINTAH KOTA TUAL**

**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS**

*Jalan Gajah Mada No. 1 Tlp/Fax ( 0916 ) 22364*

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
NOMOR : 070/170/2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka Nomor : 8833/JN 30.4/Kep/2012 Tanggal 21 Juni 2012 dan Surat Direktur Pps. UT Asisten Direktur Bidang Akademik Nomor : 15447/JN 31.4/AK/2012 tanggal 19 September 2012 perihal Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan Izin kepada :

Nama	: MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
N i m	: 016759906
Semester	: Terakhir
Program Studi	: Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka (MAP-UT)
Judul Penelitian/Skripsi	: <b>KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH PADA DAERAH OTONOM BARU (STUDI KASUS KOTA TUAL PROVINSI MALUKU)</b>
Lokasi	: Kota Tual
Waktu	: 2(Dua) Bulan/ Hingga Selesai

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

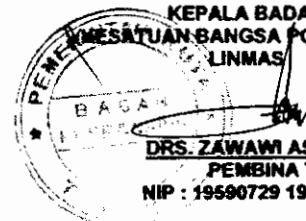
- Melaporkan kepada Instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk.
- Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku.
- Surat Izin ini hanya berlaku bagi kegiatan Penelitian.
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 ( satu ) rekaman/copy hasil Penelitian dimaksud kepada Pemerintah Kota Tual, melalui Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Tual pada saat mengambil surat keterangan selesai melaksanakan Penelitian.
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 s/d 4 Agustus 2013

Dianjurkan Kepada Camat, Pihak/Instansi terkait agar dapat memfasilitasi dan membantu memberikan data serta informasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian Surat Izin ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tual  
Pada tanggal : 3 Juni 2013

a.n. WALIKOTA TUAL  
KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA POLITIK DAN  
LINMAS



**DRS. ZAWAWI ASYATHRI**  
PEMBINA TK. I  
NIP : 19590729 198101 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth;

- Walikota Tual di Tual ( sebagai laporan )
- Wakil Walikota Tual di Tual
- Inspektur Kota Tual di Tual
- Direktur Pps UT Tangerang Selatan di Tangerang Selatan
- Kepala UPBJJ Ambon di Ambon
- Yang Bersangkutan
- Arsip.



Lampiran 12

**Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan  
Kesbangpolinmas Kota Tual Nomor 070/006/SKSP/2013,  
Tanggal 18 Juli 2013**



**PEMERINTAH KOTA TUAL  
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS**

*Jalan Gajah Mada No. 1 Tlp/Fax (0916) 22364*

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
NOMOR : 070/006/SKSP/2013.**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Tual dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAHMUD MUHAMMAD TAMHER  
N I M : 016759906  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik Universitas Terbuka (MAP-  
UT)  
Judul Penelitian/Skripsi : " **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
PADA DAERAH OTONOM BARU (STUDI  
KASUS KOTA TUAL PROVINSI MALUKU** "  
Lokasi : Kota Tual

Telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Pada Wilayah Kota Tual, terhitung mulai tanggal 4 Juni 2013 s/d 17 Juli 2013 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Tual  
Pada Tanggal : 18 Juli 2013

a.n. WALIKOTA TUAL  
KEPALA BADAN  
KESATUAN BANGSA POLITIK DAN LINMAS



**Dr. ZAWAWI ASYATHRI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19590729 198103 1 013

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. *Direktur Pps-Ut Tangerang Selatan di Tangerang Selatan*
2. *Kepala UPBJJ Ambon di Ambon*
3. *Yang Bersangkutan Untuk Diketahui*
4. *Arsip*

## Lampiran 13

**BIODATA PENELITI**

Nama/NIM : Drs. H. Mahmud Muhammad Tamher /016759906

Tempat dan Tanggal Lahir : Tual, 11 Juni 1946

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anggota Keluarga : - Istri: Rubiyanti Tamher  
- Jumlah Anak 4 (empat) orang

Alamat Rumah dan Telp. : Jalan BTN Indah Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku.

No. Hp. : 085210111616

Alamat E-mail : mmtamher@yahoo.com

Pengalaman Pendidikan : - SD Negeri 1 Tual, Lulus Tahun 1959  
- SMP Negeri Tual, Lulus Tahun 1962  
- SMA Katolik Sanata Karya Langgur Lulus Tahun 1965  
- Sarjana Muda Fekon Universitas Pattimura Ambon, Lulus Tahun 1972  
- S1 Fekon Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 1984

Pengalaman Pekerjaan : a. Diangkat sebagai PNS Tahun 1972  
b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1974-1980  
c. Tugas Belajar Tahun 1980-1984  
d. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1984-1990  
e. Ketua BAPPEDA Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1990-1997  
f. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 1997-1999  
g. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004-2008

- h. Penjabat Ketua DPRD Kota Tual Tahun 2008
- i. Walikota Tual Masa Bakti Tahun 2008-2013
- j. Walikota Tual Terpilih Masa Bakti Tahun 2013-2018.

Tual, 20 September 2013

Peneliti,

Mahmud Muhammad Tamher

